



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IRAN VERSUS AMERIKA SERIKAT  
(PEREBUTAN PENGARUH DAN HEGEMONI  
DI KAWASAN TIMUR TENGAH  
TAHUN 1979-2008)**

**T E S I S**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang Politik dan Hubungan  
Internasional pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam  
Program Pascasarjana Universitas Indonesia

**Halifatullah Al-Khawarizmi  
0706192823**


**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM  
POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Halifatullah Al-Khawarizmi

NPM : 0706192823

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 Juli 2009



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, rahmat dan hidayah yang diberikanNya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dalam penulisan tesis, penulis merasa berhutang kepada banyak orang yang tidak seluruhnya bisa disebutkan disini. Kepada mereka semua, penulis mengucapkan terima kasih, penghargaan, dan permohonan maaf. Pertama, tentu saja, kepada pembimbing tesis ini Bapak Achmad Ramzy Tadjoeidin, BA., MPA. yang telah membimbing penulis. Kritik, saran, dan masukan-masukannya membuat penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Juga kepada Dr. Hanief Saha Ghafur, M.Si, pembimbing metodologi penelitian penulis, serta Drs. Moh. Hamdan Basyar, M.Si, pengujui proposal tesis ini. Dengan masukan dari semuanya, telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini juga merupakan bagian dari proses perjalanan intelektual penulis selama menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Univesitas Indonesia, Jakarta. Untuk itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Zainuddin Djafar, Prof. Dr. Badri Yatim, Dr. Moh. Luthfi Zuhdi, Soesiswo Soenarko, SH, MA., Dr. Adian Husaini, MA., Dr. Adnin Armas, MA., dan Henri Shalahuddin, MA. Berkat kuliah-kuliah yang beliau-beliau berikan sehingga membuka wawasan dan menambah pengetahuan penulis.

Disaat penulis merasa lelah dan jenuh dalam menyelesaikan tesis ini. Kehadiran dan kepedulian dari kawan-kawan, sungguh telah membangkitkan motivasi kepada penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Anwar Nuris, Wirawan Soekarwo, Mohammad Aliardo, mas Hussein, dan mas Wiwied.

Penulis tentunya harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu tercinta, Basthari Ibrahim dan Suryati Nurulhuda atas dorongan, motivasi, dan kasih sayangnya. Juga kepada adik, Halifatullah Al-Giphari atas segala bantuan dan dorongan semangatnya. Terima kasih!

Depok, 12 Juli 2009  
Halifatullah Al-Khawarizmi

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halifatullah Al-Khawarizmi

NPM : 0706192823

Program Studi : Politik dan Hubungan Internasional Timur Tengah

Departemen : Timur Tengah dan Islam

Fakultas : Pascasarjana

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Iran versus Amerika Serikat (Perebutan Pengaruh dan Hegemoni di Kawasan Timur Tengah Tahun 1979-2008).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 20 Juli 2009  
Yang menyatakan



(Halifatullah Al-Khawarizmi)

## ABSTRAKSI

Nama : Halifatullah Al-Khawarizmi  
Program Studi : Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah  
Judul : Iran Versus Amerika Serikat (Perebutan Pengaruh dan Hegemoni di Kawasan Timur Tengah Tahun 1979-2008)  
Kata Kunci : *Pengaruh, Hegemoni, Timur Tengah*

Tesis ini membahas tentang Iran Versus Amerika Serikat (Perebutan Pengaruh dan Hegemoni di kawasan Timur Tengah tahun 1979-2008). Fokus masalah dalam penelitian ini terumuskan dalam tiga pertanyaan: Bagaimana upaya Iran untuk menciptakan pengaruh dan hegemoni ditengah kekuatan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah; Bagaimana perebutan pengaruh dan hegemoni antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah; Bagaimana prospek kawasan Timur Tengah ditengah persaingan antara Iran dan Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil sebuah negara dalam menciptakan hegemoni, dan untuk mengetahui bagaimana implikasi dari perebutan hegemoni di suatu kawasan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hegemoni. Hegemoni berarti keunggulan atau supremasi dari negara, kelompok ataupun individu yang berupaya menguasai pihak lain. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari neo-Gramscian yang mengemukakan ada tiga aspek penting dalam menciptakan hegemoni, yakni, politik; ekonomi; militer. Untuk melihat prospek kawasan Timur Tengah ditengah persaingan antara Iran dan Amerika Serikat, maka digunakan teori Hegemonic War. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni, penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang dapat berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati.

Upaya Iran dalam menciptakan hegemoni dapat dilihat dalam hubungan antara Iran dan Syria, Iran dan Hizbullah di Lebanon, Iran dan HAMAS di Palestina, serta peranan Iran di Iraq. Iran mampu untuk menciptakan nilai-nilai dan cita-cita bersama yang disepakati oleh negara ataupun kelompok tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat cukup berhasil membangun kekuatan militernya. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan militer yang dibangun oleh Amerika Serikat dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Secara ekonomi, Amerika Serikat menjadi pasar yang besar bagi negara-negara pengekspor minyak di Timur Tengah, hal ini menciptakan adanya interdependensi antara Amerika Serikat dan negara-negara penghasil minyak. Kekuatan dari hegemoni Amerika Serikat terletak pada kemampuan koersifnya. Baik Iran ataupun Amerika Serikat kerap menyebarkan nilai-nilai untuk mempengaruhi negara-negara lain di kawasan. Iran pernah menyebut Amerika Serikat sebagai "setan besar", lalu presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad (2005-...) mempertanyakan kebenaran *Holocaust*, yang dianggap sebagai dasar berdirinya negara Israel yang merupakan salah satu kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat juga menuduh Iran sebagai negara pendukung terorisme, dan juga negara yang berupaya untuk menciptakan senjata nuklir. Persaingan antara Iran dan Amerika Serikat masih akan berlangsung. Selama distribusi kekuatan masih berlangsung seperti ini, maka dapat dikatakan tidak akan terjadi perang besar di kawasan Timur Tengah.

## Abstract

Name : Halifatullah Al-Khawarizmi  
Studies : Politic and International Relation in Middle East  
Title : Iran Versus United States of America (The Seizure of Influence and Hegemony in the Middle East Regions 1979-2008)  
Keywords : *Influence, Hegemony, Middle East*

This thesis discusses Iran Versus the United States of America (The Seizure of Influence and Hegemony in the Middle East Regions 1979-2008). The focus in this research is covered by three main questions: How Iran's efforts to create the influence and hegemony in the domination of the United States in the Middle East Regions; How the seizure of influence and hegemony between United States and Iran in the Middle East Regions; How do prospects the Middle East Region in the rivalry between Iran and the United States. The objectives of this research are to know the policy has been taking by a country in creating hegemony and to find out how implications of seizing influence and hegemony in the region. Theoretical framework used in this research is the Hegemony Theory. Hegemony means preeminence or supremacy of the state, groups or individuals may exercise over others. The more specific, this research used Hegemony Theory of neo-Gramscian revealed that there are three important aspects in creating hegemony, there are political, economic, and military. Theory of Hegemonic War used to analyze the prospect of the Middle East Region in the rivalry between Iran and the United States of America. The methodology in this research is a qualitative method. Qualitative method is a research that produces descriptive data which can be a speech, writing, and behavior.

Iran's efforts in creating influence and hegemony can be seen in the relationship between Iran and Syria, Iran and Hizbullah in Lebanon, Iran and HAMAS in Palestine, and the role of Iran in Iraq. Iran success to create consensus of the common values and ideals with them. Meanwhile, United States of America was successful to build military power. It can be seen from a military cooperation that was built by the United States of America with the Middle East countries such as Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, and Bahrain. Economically, United States of America became a major market for the oil countries exporter in the Middle East, it creates the interdependence between the United States of America and the oil countries exporter. Strength of the hegemony of the United States of America lies in the coercive ability. Neither Iran nor the United States of America often transmit values to influence other countries in the region. Iran is ever mentions the United States as the "Great Satan", then Iranian President Mahmoud Ahmadinejad (2005-....) asking the truth of Holocaust tragedy, which is considered as a basic reason for the state of Israel, is one of the United States of America's interest in the Middle East. Meanwhile, The United States of America accuses Iran as a state terrorism sponsors, and also the country that attempts to create nuclear weapons. The rivalry between Iran and the United States of America will be held. If the distribution of power were still in progress like this, a war will not occur in the Middle East Region.

## التجريد

الاسم : خليفة الله الخوارزمي  
قسم : الدراسات العليا للشرق الأوسط و الإسلام  
العنوان : إيران ضد أمريكا ( المنافسة في جلب التأثير و  
الهيمنة في مناطق الشرق الأوسط منذ عام 1979  
إلى 2008  
الكلمات المفتاحية : التأثير ، الهيمنة ، الشرق الأوسط

هذا البحث عن إيران ضد أمريكا ( المنافسة في جلب التأثير و الهيمنة في مناطق الشرق الأوسط منذ عام 1979 إلى 2008 . ينطلق هذا البحث عن ثلاث أسئلة أتية : كيف تسعى إيران في التأثير و الهيمنة في الشرق الأوسط التي استولتها التأثير الأمريكي ، ثم كيف تكون المنافسة بين إيران و أمريكا في جلب التأثير و الهيمنة في مناطق الشرق الأوسط ، ثم كيف مستقبل مناطق الشرق الأوسط في ظل المنافسة بين إيران و أمريكا . ثم الإجابة تلك الأسئلة تكون هدف هذا البحث . فالنظرية المستعملة في هذا البحث هي نظرية الهيمنة تعني التعالي و السيطرة عند دولة ما أو أي فريق ما أو أي شخص ما في تحقيق استيلاء و السيطرة على الآخرين . صراحة النظرية المستعملة هي الهيمنة عيد أتباع جرامسيان الذين رأوا بأن هناك ثلاثة عوامل في تحقيق الهيمنة ، تلك العوامل هي : العامل السياسي ، والاقتصادي ، والقوى المسلحة . فلمعرفة مستقبل مناطق الشرق الأوسط في تلك المنافسة تستعمل النظرية الهيمنة الحربية . هذا البحث عبارة عن دراسة الواقع التي تبين المعلومات عن الأشياء المبحوثة من التقارير و الوثائق والسلوك لدى الشخص

مما فعله إيران في تحقيق الهيمنة ينظر إلى الجوانب الأتية : علاقة إيران بسورية وحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين كذا من دورها في عراق . تستطيع إيران في تكوين القيم والأهداف التي اتفق عليها الجميع . ثم في الناحية الأخرى تنجح أمريكا في بناء قوتها المسلحة . و ذلك في علاقتها الدفاعية مع الدول في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية و الإمارة العربية المتحدة و و كويت و قطر البحرين . أمريكا هي السوق لبتترول الشرق الأوسط ، هذا الذي جعل العلاقة أمريكا و الشرق الأوسط علاقة الدولة المصدرة والمستورد . كلتا الدولتين تسعيا كل سعي في إنجاح و تحقيق كل مطامعهما في التأثير و الهيمنة في الشرق الأوسط . فاتبرت إيران أمريكا هي الشيطان الأكبر ، و كذا تساعل أحمد نجاة في عام 2005 عن هولوقوص العلة وراء قيام الدولة الإسرائيلية التي هي من مصالح أمريكا في الشرك الأوسط . في نظر أمريكا إيران هي الدولة التي تساند الإرهابية وتسعى إلى تحقيق الصلاح النووية . المنافسة بينها الدولتين لاتزال تستمر طالما توزيع القوى جار كالآن ، فلذلك استحال أن تقع الحرب الكبيرة في مناطق الشرق الأوسط .

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
AL-KHULASHAH.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Kerangka Teori.....	13
1.5. Metode Penelitian.....	14
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II. TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
II.1. Teori Hegemoni.....	16
II.1.1. Konsep Dasar.....	16
II.1.2. Hegemoni Neo-Gramscian.....	20
II.1.3. Hegemonic War.....	23
II.2. Hegemoni di Timur Tengah.....	27
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
III.1. Konsep Dasar.....	29
III.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	32
III.2.1. Batasan Objek Masalah.....	32



III.2.2. Karakteristik Data.....	33
III.3. Metode Penelitian.....	33
III.4. Metode Pengumpulan Data.....	35
III.5. Analisis Data.....	36

#### **BAB IV. PEREBUTAN PENGARUH DAN HEGEMONI**

##### **DI KAWASAN TIMUR TENGAH.....40**

IV. 1. Upaya Iran Dalam Menciptakan Pengaruh dan Hegemoni di Kawasan Timur Tengah.....	40
IV.1.1. Unsur Politik.....	40
IV.1.1.1. Aliansi Iran-Syria.....	44
IV.1.1.2. Peranan Iran di Lebanon.....	49
IV.1.1.3. Peranan Iran di Palestina.....	55
IV.1.1.4. Peranan Iran di Iraq.....	59
IV.1.2. Unsur Militer .....	65
IV.1.3. Ekonomi Iran.....	72
IV.2. Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah.....	75
IV.2.1. Unsur Politik.....	76
IV.2.1.1. Demokratisasi di Timur Tengah.....	76
IV.2.1.2. Eksistensi Israel.....	78
IV.2.2. Unsur Militer.....	82
IV.2.3. Unsur Ekonomi.....	85
IV.3. Perebutan Pengaruh dan Hegemoni Antara Iran-Amerika Serikat.....	89
IV.4. Prospek Kawasan Timur Tengah Ditengah Persaingan Antara Iran dan Amerika Serikat.....	100

#### **BAB.V. KESIMPULAN DAN SARAN.....105**

V.1. Kesimpulan.....	105
----------------------	-----

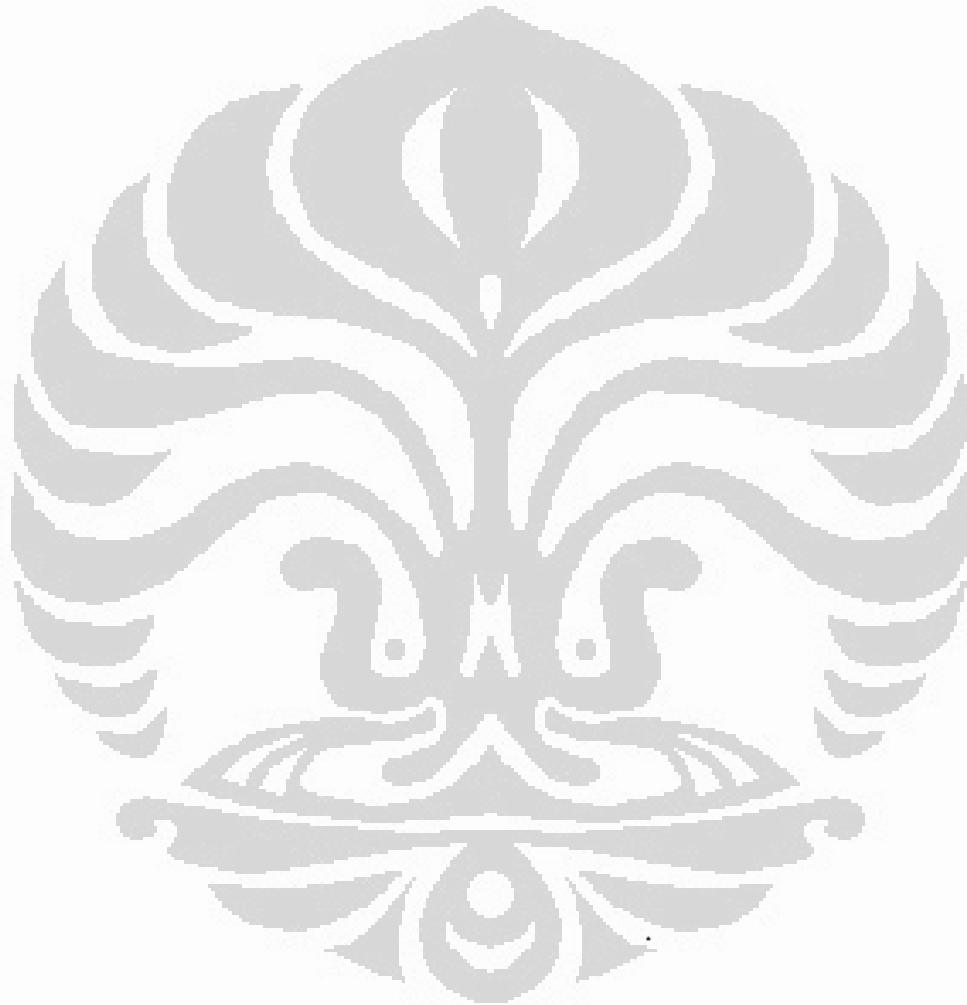
V.2. Saran.....	107
-----------------	-----

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

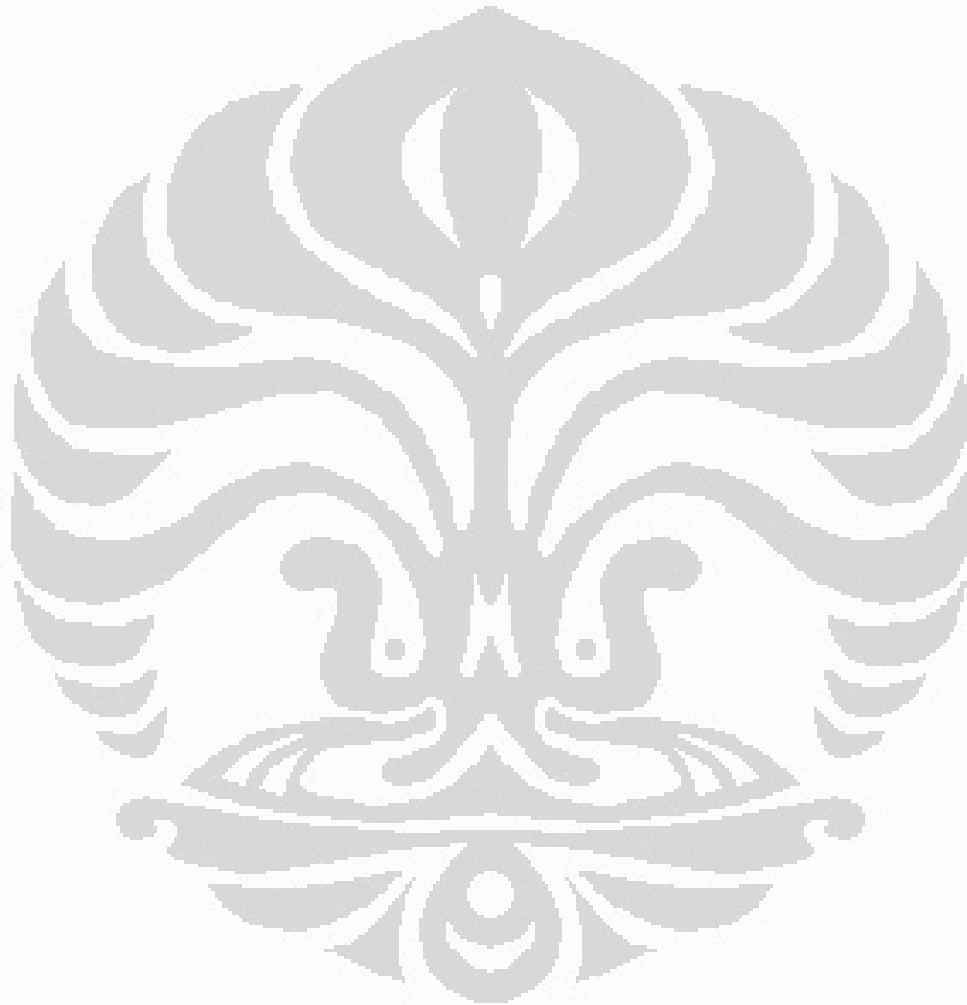
- Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model).....37**
- Gambar 3.2. Flowchart Metodologi Penelitian.....39**



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Peta Timur Tengah

LAMPIRAN II. Konstitusi Iran



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Istilah “Timur Tengah” merupakan terjemahan dari “*Middle East*”, suatu istilah yang digunakan orang-orang Inggris dan Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II untuk menggambarkan suatu kawasan yang sebagian terletak di Barat Daya dari Benua Asia dan Timur Laut Benua Afrika. Istilah “*Middle East*” menjadi populer dibandingkan dengan istilah sebelumnya yakni “*Near East*” dan “*Levant*”.

Hingga saat ini belum ada definisi pasti dari kawasan Timur Tengah ini sendiri. Kesulitan dari dari pembatasan mengenai kawasan Timur Tengah adalah menyangkut pengelompokan negara-negara yang termasuk dalam kawasan tersebut. Berbagai pendekatan yang coba digunakan terkadang tidak dapat menggambarkan kawasan ini secara utuh.

Pendekatan berdasarkan etnis akan menemui kerancuan karena etnis di Timur Tengah bukan hanya berbangsa Arab tetapi ada juga Bangsa Kurdi, Berber, Nubian, Parsi, dan Armenia. Pendekatan secara geografis juga terkadang tidak memungkinkan karena negara-negara yang terletak di kawasan Afrika Utara juga termasuk dalam kawasan ini karena persamaan etnis maupun budaya.

Apabila dilihat dari politik luar negeri negara-negara di kawasan tersebut, kebanyakan negara-negara Timur Tengah memiliki orientasi yang berbeda dalam politik luar negerinya. Hal ini dapat dilihat pada masa perang dingin, dimana sebagian negara mendukung Blok Barat seperti Arab Saudi, Uni Emirat, Iran, Yordania, Tunisia, Kuwait dan Yaman Utara, sedangkan yang cenderung kepada Uni Soviet yakni, Iraq, Suriah, Aljazair, dan Yaman Selatan.

Beberapa ahli telah mencoba mendefinisikan kawasan ini dengan tiga pendapat yang berbeda, diantaranya:

**Pendapat pertama** dikemukakan oleh David E Long dan Bernard Reich menyebutkan bahwa wilayah Timur Tengah adalah negara-negara Arab Non Afrika

ditambah Iran dan Israel. Dengan definisi ini negara-negara yang terletak di kawasan Afrika Utara seperti Mesir, Maroko, Libiya, dan Aljazair tidak dapat dimasukkan dalam kategori wilayah Timur Tengah. **Pendapat kedua** adalah Roy R Anderson, Robert F. Seidert, Jon G. Wagner, dan Robert O. Freddman, mengartikan Timur Tengah sebagai negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab ditambahkan Iran dan Israel serta Turki. **Pendapat ketiga**, adalah memasukan negara-negara seperti Afganistan, Pakistan, bahkan negara-negara Asia Tengah bekas Uni Soviet kedalam wilayah Timur Tengah. (Noor, hal.1, 2006)

Timur Tengah tidak mempunyai batasan yang jelas. Tetapi pada umumnya dianggap mencakup Afrika Utara dan Asia Barat Daya (non Uni Soviet). Kawasan yang sangat luas ini didominasi oleh negara-negara muslim Arab dan Non-Arab, mulai dari Maroko diujung barat sampai Afghanistan dan Pakistan diujung timur, termasuk Libanon, Israel, dan Siprus (Habib, hal. 26, 1991)

Dari segi strategi, Timur Tengah sejak dahulu adalah salah satu kawasan yang paling penting, sehingga barang siapa menguasainya mempunyai kedudukan strategis di dunia. Berkat letaknya pada pertemuan Eropa, Asia, dan Afrika, kawasan itu menguasai jalan masuk bagi ketiga benua tersebut. Timur Tengah berbatasan dengan Laut Tengah, Laut Merah, Laut Hitam, Laut Kaspia, Teluk Persia dan Samudra Hindia. Baik lewat daratan maupun perairan kawasan itu memandang ke banyak penjuru, dan sejak fajar sejarah keunikan geostrategisnya itu diakui oleh negara-negara besar. Dizaman modern ini muncul faktor lain yang menambah arti Timur Tengah itu, lalu lintas udara. Di kawasan itu juga terdapat jalan-jalan air yang strategis, yaitu Selat Bosphorous, Selat Dardanella, Terusan Suez, Selat Bab el Mandeb, dan Selat Hormuz. (Dipoyudo, hal.30, 1982)

Arti kawasan Timur Tengah menjadi lebih penting setelah ditemukannya cadangan minyak yang sangat besar. Dua pertiga cadangan minyak dunia terdapat dikawasan ini. Industrialisasi yang terjadi pada zaman modern ini membuat negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, dan Eropa menjadi ketergantungan dengan minyak dari kawasan ini. Produksi minyak menjadi urat nadi industri, sedangkan industri merupakan jantung dari perekonomian negara-negara tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa negara-negara industri berkepentingan menjaga produksi dan distribusi minyak di kawasan ini agar dapat berjalan lancar. Hal ini untuk menjaga perekonomian negara-negara industri tersebut.

Selain letaknya yang memang sangat strategis, kawasan ini juga memiliki cadangan minyak yang melimpah. Timur Tengah mempunyai potensi politik dan ekonomi yang sangat besar. Hal tersebut memancing ketertarikan berbagai pihak khususnya Amerika Serikat untuk menguasai kawasan Timur Tengah. Semua itu demi kepentingan hegemoni maupun untuk kepentingan ekonomi dari negaranya.

Kekayaan alam dan letak yang strategis dari kawasan Timur Tengah membuat banyak kekuatan berupaya untuk menguasainya, hal ini membuat kawasan Timur Tengah cenderung menjadi medan pertarungan (*playing fields*) dari negara-negara yang kuat. Pertarungan *great powers* terjadi di kawasan yang "kaya", bukan sekedar di kawasan yang memiliki signifikansi geostrategis. "Penguasaan" wilayah bukan lagi atas dasar pertimbangan arti militer-strategis, tetapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kawasan dianggap "kaya" bila memiliki signifikansi ekonomis bagi *great powers* (Harsawaskita, hal. 205, 2007)

Masalah lain yang kerap terjadi di Timur Tengah adalah banyaknya sengketa, baik antar negara maupun antar kelompok didalam suatu negara. Secara garis besar, ada tiga macam sifat sengketa yang mewarnai situasi politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Yaitu:

1. Sengketa dalam negeri. Sengketa ini bersumber dari faktor suku, agama, ras, dan perbedaan sosial ekonomi yang mencolok antara golongan elit dan rakyat banyak. Sebagai contoh adalah masalah Suku Kurdi di Iraq.
2. Sengketa antar negara Arab. Sengketa ini bersumber dari perbedaan sistem politik dan sosial yang tajam; perbedaan kesejahteraan materiil antara sejumlah kecil negara kaya (minyak) dan negara miskin mayoritas; pertentangan antara negara-negara radikal revolusioner dan negara-negara konservatif; perbedaan antara nasionalisme Arab atau Pan-Arabisme yang sekuler dan nasionalisme negara atau *State Nationalism* yang juga sekuler dengan Universalisme Islam atau Pan-Islamismenya; perbedaan antara sosialisme sekuler dari Iraq dan Suriah dan sosialisme Islam dari Libya; dan perbedaan antara fundamentalisme Syiah dari Iran dan Sunni dari

banyak negara Arab. Kesemuanya itu menimbulkan saling curiga antar negara-negara kawasan.

3. Sengketa Arab-Israel. Sengketa ini bersumber dari masalah Palestina dan kehadiran negara Israel di tengah Dunia Arab yang memusuhinya. (Habib, hal. 27, 1991)

Letak yang strategis dan potensi ekonomi yang besar dari kawasan Timur Tengah ini membuat negara-negara besar didunia (*great power*) berupaya menyebarkan pengaruhnya. Salah satunya bisa dilihat pada masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Masing-masing kubu baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet memiliki aliansi sendiri-sendiri di kawasan ini, yaitu negara-negara di Kawasan Timur Tengah itu sendiri. Amerika Serikat memiliki aliansi negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat, Iran, Yordania, Tunisia, Kuwait, Yaman Utara, dan Iran. Sementara Uni Soviet cenderung mendapat dukungan dari negara-negara sosialis dan radikal seperti Iraq, Syria, Aljazair, dan Yaman Selatan.

Namun, perebutan pengaruh antara Uni Soviet dan Amerika Serikat juga mengalami pasang surut. Aliansi yang dibangun oleh dua negara super power ini bersifat cair karena mengingat anggota aliansi juga merupakan negara-negara yang memiliki kedaulatan. Kondisi aliansi yang cair ini dapat dilihat dari adanya negara-negara yang menjadi anggota aliansi dapat keluar ataupun masuk aliansi lainnya dalam periode waktu tertentu. Seperti Mesir yang sebelum tahun 1976 dekat dengan Uni Soviet, namun pada pemerintahan Presiden Anwar Sadat, Mesir lebih memilih dekat dengan Amerika Serikat. Hal ini ditandai dengan pembatalan kerjasama antara Mesir dan Uni Soviet tahun 1976. Setelah itu, pada 17 September 1978 Mesir juga melakukan perundingan dengan Israel yang disponsori oleh Amerika Serikat, yang dikenal dengan perjanjian Camp David. Nama perjanjian ini diambil dari tempat peristirahatan para presiden Amerika Serikat, Camp David, Maryland. Pada bulan Maret 1979, Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian damai (*peace treaty*) di Washington DC, Amerika Serikat.

Setelah peristiwa tersebut, banyak anggota aliansi Amerika Serikat merasa kecewa dengan perjanjian Camp David ini. Misalnya, Arab Saudi mencoba memulai hubungan dengan Uni Soviet sebagai bentuk kekecewaan terhadap Amerika Serikat. Namun, hubungan ini tidak berlangsung lama. Tahun 1979 Uni Soviet melakukan invasi ke Afghanistan, tindakan tersebut menuai banyak protes dari negara-negara Islam di Kawasan Timur Tengah. Sehingga membuat posisi Uni Soviet di Timur Tengah menjadi tidak menguntungkan, bahkan hubungan dengan Arab Saudi juga kembali memburuk.

Selain itu, yang menarik adalah hubungan antara Amerika Serikat dan Iran dimana terjadi perubahan signifikan terhadap hubungan tersebut khususnya setelah tahun 1979. Pada masa Pemerintahan Shah Reza Pahlevi (1941-1979) hubungan antara Amerika Serikat dan Iran sangat baik. Namun, setelah terjadi Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang menandai runtuhnya Dinasti Pahlevi, hubungan Amerika Serikat dan Iran memburuk bahkan terjadi permusuhan diantara kedua negara.

Awal hubungan baik antara Iran dan Amerika Serikat adalah pada tahun 1946. Di tahun itu, Iran mengalami kesulitan ekonomi dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan. Selain itu, Iran juga menghadapi bahaya disintegrasi dengan semakin kuatnya gerakan kemerdekaan Azerbaijan dan Kurdi. Kedua gerakan tersebut didukung oleh Uni Soviet. Hal inilah yang membuat Shah Reza Pahlevi sangat membenci Uni Soviet. Dengan bantuan Amerika Serikat maka Shah Reza Pahlevi berhasil menghancurkan kekuatan separatis Azerbaijan dan Kurdi tersebut, setelah sebelumnya Uni Soviet mundur dari Iran dengan mendapatkan konsensi pengelolaan minyak dan gas di Utara Iran. (Tamara, hal. 46, 1980).

Selanjutnya, hubungan baik antara Iran dan Amerika Serikat mengalami kemajuan pesat, terutama setelah terjadi beberapa peristiwa. Pada tahun 1951, Dr. Mossadeq menjadi Perdana Menteri Iran. Dr. Mossadeq memiliki rasa nasionalisme yang tinggi bagi Iran. Pada pemerintahannya sebagai Perdana Menteri, Mossadeq menasionalisasi perusahaan minyak Iran. Hal ini tentunya membuat Mossadeq mendapatkan dukungan dari rakyat Iran. Sebaliknya, Inggris yang selama ini mendapatkan konsensi pengelolaan minyak di Iran merasa tidak diuntungkan oleh



kebijakan ini. Untuk itu, Inggris mengadukan hal tersebut ke pengadilan internasional di Den Haag, Belanda. Keputusan pengadilan internasional ini memenangkan tuntutan Inggris. Namun Mossadeq tetap pada sikapnya, hal ini membuat Inggris melangkah lebih jauh dengan membawa permasalahan ini ke Dewan Keamanan PBB. Mossadeq secara khusus datang ke Sidang Dewan Keamanan PBB untuk mempertahankan kebijakannya. Lalu, pengadilan internasional di Den Haag kembali bersidang dan hasilnya pada 22 Juli 1952 pengadilan internasional menganggap bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang untuk mengadili permasalahan ini. Keputusan ini tentunya menguntungkan bagi Iran. (Tamara, hal. 48, 1980)

Setelah kejadian ini Inggris tidak mau lagi memberikan bantuan tenaga ahli untuk menjalankan industri minyak Iran. Kondisi tersebut membuat Mossadeq meminta bantuan kepada Perancis untuk membantunya, namun solidaritas antar sesama negara Eropa ternyata lebih kuat, Perancis menolak permintaan Mossadeq. Lalu Iran berupaya untuk meminta bantuan keuangan kepada Amerika Serikat, namun Amerika Serikat menolak hal tersebut selama hubungan dengan Inggris belum terselesaikan. Sikap ini membuat Iran merasa dikhianati oleh Amerika Serikat. Shah Iran yang pro kepada Amerika Serikat juga dituduh sebagai pengkhianat, lalu Mossadeq meminta seluruh kekuasaan Shah termasuk kendali terhadap militer yang sebelumnya diluar kendali dari perdana menteri.

Hal tersebut membuat Shah Reza marah, ia mengangkat Ahmad Ghavam sebagai perdana menteri untuk menggantikan Mossadeq, namun karena dukungan rakyat sangat kuat kepada Mossadeq, upaya Shah menemui kegagalan. Namun Shah tidak berputus asa, ia kembali mengangkat seorang perdana menteri untuk menggantikan Mossadeq. Kali ini ia mengangkat Jenderal Zahedi sebagai perdana menteri pada 13 Agustus 1953. Setelah itu Shah berangkat ke Roma beserta istrinya. Rakyat merasa hal ini merupakan akhir dari Dinasti Pahlevi, rakyat mulai menghancurkan patung-patung Shah dan mendiang ayahnya. Pada 19 Agustus 1953 Jenderal Zahedi sebagai perdana menteri berhasil menangkap Mossadeq, berkat bantuan Amerika Serikat melalui Dinas Rahasia CIA. Mossadeq menghabiskan masa

tuanya di tahanan rumah di desa kecil Ahmadabad sekitar seratus kilometer dari Ibukota Teheran.

Mundurinya Mossadeq membuat Amerika Serikat masuk ke Iran menggantikan Inggris di segala bidang. Shah Reza juga kembali memegang kekuasaan dengan dukungan Amerika Serikat. Untuk merebut hati rakyat, Shah Reza terus melanjutkan prinsip nasionalisasi dari Mossadeq. Perundingan dengan *Anglo-Iranian Oil Company* tetap dilanjutkan. Sebuah konsorsium minyak dibuat dimana *Anglo-Iranian Oil Company* memiliki saham sebesar 40%, Amerika Serikat 40%, Shell 14%, dan Perancis 6%. (Tamara, hal. 51, 1980).

Setelah keberhasilan dalam menyingkirkan Mossadeq, terjadi hubungan simbiosis antara Shah Pahlevi dan Amerika Serikat. Satu sisi, Shah Pahlevi memelihara kepentingan ekonomi dan politik dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat menjaga kekuasaan Shah Pahlevi. Pada pertengahan 1970an, Iran menjadi konsumen terbesar dari industri militer Amerika Serikat. Dana yang digunakan untuk pembelian peralatan militer Amerika Serikat berasal dari penjualan minyak, dimana Amerika Serikat juga merupakan negara yang banyak membeli minyak dari Iran, inilah yang disebut *US military-industrial complex*. Dari segi politik, setelah kepergian kekuatan militer Inggris dari Teluk Persia tahun 1971, Shah Pahlevi menjadi penjaga tatanan kawasan di Timur Tengah dengan mendestabilisasi pemerintahan yang secara politik membahayakan aliansi dari Amerika Serikat. sebagai contoh, Shah Pahlevi menyetujui kerjasama dengan Amerika Serikat dan Israel untuk mendestabilisasi pemerintahan Iraq, dengan cara mendukung pemberontak Kurdi di Iraq. (Fayazmanesh, Hal. 12, 2008).

Iran merupakan aliansi yang cukup penting bagi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Robert Mac Namara pada tahun 1967 mengatakan "Timur Tengah penting sekali bagi strategi Amerika sebab daerah tersebut terletak di persimpangan militer, politik, dan ekonomi...kita wajib menjaga hubungan istimewa dengan Yunani, Turki, dan Iran.." Presiden Amerika Serikat Nixon pada tahun 1972 mengatakan "Kami memiliki kekuatan dissuasi nuklir yang cukup untuk menghadapi seluruh ancaman pada Amerika Serikat dan sahabat-sahabatnya." Menanggapi hal

tersebut, Shah Pahlevi memberi komentar "Keamanan Eropa hanya merupakan kata-kata kosong belaka tanpa adanya stabilitas di Teluk Persia." (Tamara, hal. 88-89, 1980)

Hubungan baik antara Amerika Serikat dan Iran berubah menjadi ketegangan setelah berhasilnya Revolusi Islam Iran pada bulan Februari tahun 1979. Dengan keberhasilan Revolusi Islam ini, menandai berakhirnya Rezim Shah Pahlevi yang merupakan sahabat dekat bagi Amerika Serikat. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, pada Bulan November 1979 para mahasiswa militan menyandera Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran. Para mahasiswa ini menyebut Kedutaan Besar Amerika Serikat ini sebagai "sarang mata-mata". Segera setelah itu, Amerika Serikat membekukan aset Iran yang berjumlah lebih dari 12 milyar Dolar Amerika. Selain itu, Amerika Serikat juga mengembargo perdagangan Iran. (Fayazmanesh, Hal.12, 2008) Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan anti klimaks dari hubungan Iran dan Amerika Serikat yang selama beberapa dekade berjalan sangat baik. Bahkan, Khomeini yang merupakan pemimpin Revolusi Islam Iran menjuluki Amerika Serikat sebagai "setan besar". Semenjak saat itu hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat terputus.

Setelah Revolusi terjadi, Iran mengalami tantangan dari negara tetangganya Iraq dibawah Rezim Saddam Hussein. Kondisi Negara Iran yang masih belum pulih harus menghadapi serangan dari Iraq. Perang Teluk I (1980-1988) antara Iran-Iraq ini berlangsung cukup lama yakni selama 8 tahun. Setelah berakhirnya Perang Teluk I antara Iran dan Iraq, Kawasan Timur Tengah kembali dilanda peperangan, yakni Perang Teluk II tahun 1991 antara Amerika Serikat dan Iraq. Perang Teluk II ini dipicu oleh serangan Iraq terhadap Kuwait pada bulan Agustus tahun 1990. Dalam hal ini, Amerika Serikat turun langsung membela Kuwait, sehingga terjadi perang antara Iraq dan Amerika Serikat. Sekalipun Amerika Serikat berhasil membuat kehancuran yang cukup besar bagi Iraq, namun Amerika Serikat belum berhasil menjatuhkan Rezim Saddam Hussein. Iraq yang juga merupakan salah satu *major power* di kawasan Timur Tengah mengalami kerugian yang cukup besar setelah

terjadinya Perang Teluk II, setelah sebelumnya Iraq juga terlibat Perang Teluk I dengan Iran selama delapan tahun.

Pasca Perang Teluk II, terjadi peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sebetulnya Amerika Serikat sudah lama masuk ke kawasan Timur Tengah, yaitu pada masa perang dingin. Namun setelah Perang Teluk II Amerika Serikat gencar menjalin hubungan militer dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Negara-negara yang menjalin hubungan dengan Amerika Serikat pasca Perang Teluk II adalah Bahrain, dimana pada tahun 1991 Bahrain menandatangani persetujuan keamanan dengan Amerika Serikat, sebagai dampak dari persetujuan tersebut maka Amerika Serikat dapat menempatkan pasukannya di Bahrain. Di Tahun yang sama terjadi juga perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Kuwait. Sejak saat itu, Kuwait membangun dan menyesuaikan fasilitas militernya untuk mendukung pasukan militer Amerika Serikat di Kuwait. Pada tahun 1992, Amerika Serikat mulai menginjakkan kakinya di Qatar setelah ditandatanganinya persetujuan antara Qatar dan Amerika Serikat. Pada tahun 1994, Amerika Serikat berhasil menempatkan pasukannya di titik yang strategis di kawasan Teluk, yakni di wilayah Uni Emirat Arab, setelah sebelumnya terjadi perjanjian keamanan diantara kedua negara.

Selain itu, Amerika Serikat juga telah menempatkan pasukannya di Arab Saudi pada penghujung tahun 1970 hingga 1980an. Sejak saat itu, Arab Saudi meningkatkan fasilitas pangkalan udara serta pelabuhannya untuk menampung kekuatan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. Lalu, Amerika Serikat juga memanfaatkan kondisi dalam negeri sebuah negara yang tidak stabil untuk menempatkan pasukannya. Inilah yang terjadi di Oman, dimana negara tersebut mengharapkan Amerika Serikat dapat membantu pemerintah negaranya untuk menumpas gerakan separatisme.

Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah sangat terlihat setelah Perang Teluk II. Pada 26 Oktober 1994. Amerika Serikat mendorong terciptanya perdamaian antara Yordania dan Israel. Pada tahun 1994 juga diselenggarakan KTT Ekonomi Timur Tengah dan Afrika Utara untuk pertama kalinya. KTT tersebut dihadiri oleh

seluruh sekutu Amerika Serikat dan Israel. Secara resmi konferensi ini merupakan konferensi ekonomi, namun pesan yang dapat ditangkap adalah penegasan kembali eksistensi Israel di Timur Tengah (Sihbudi, hal.134, 2007). Hal-hal tersebut menunjukkan betapa kuatnya peranan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah.

Hegemoni dan dominasi politik Amerika Serikat di Timur Tengah tidak hanya terlihat dari tercapainya "perdamaian" antara Yordania dan Israel, namun juga terlihat dari upaya Clinton mengucilkan Iran, Irak, Libya, maupun Sudan. Didepan kongres Yahudi sedunia Presiden Amerika Serikat saat itu Bill Clinton menyatakan akan memutuskan segala bentuk hubungan perdagangan dan investasi dengan Iran ( Sihbudi, hal. 134, 2007). Iran yang dituduh sebagai negara teroris terus disudutkan oleh Amerika Serikat dengan isu bahwa Teheran berupaya mengembangkan senjata nuklir. Amerika Serikat berupaya untuk membujuk negara-negara sekutunya untuk mengikuti jejak Amerika Serikat tersebut.

Setelah terjadinya tragedi WTC pada 11 September 2001, Amerika Serikat menyatakan diri untuk memerangi terorisme internasional. Amerika Serikat menuduh Osama bin Laden berada dibelakang tragedi tersebut. Amerika Serikat beserta sekutunya dan dengan restu dari PBB melakukan upaya penangkapan terhadap Osama Bin Laden yang diduga berada di Afganistan dan dilindungi oleh rezim yang berkuasa yakni Taliban. Atas dasar tersebut Amerika Serikat melakukan Invasi mereka ke Afganistan, dengan alasan untuk menangkap Osama dan menggulingkan Rezim Taliban yang dinilai melindungi dan mendukung terorisme.

Setelah menggulingkan pemerintahan Taliban, Amerika Serikat berupaya untuk menggulingkan Pemerintahan Sadam Husein di Iraq. Amerika Serikat menuduh bahwa Iraq masih memiliki senjata pemusnah massal. PBB telah mengirimkan sebuah tim inspeksi senjata ke Iraq untuk memeriksa keberadaan senjata tersebut. Namun hasil pemeriksaan tim inspeksi PBB tidak bisa membuktikan keberadaan senjata tersebut, dan pihak Amerika Serikat menolak hasil pemeriksaan tim inspeksi PBB. Selain itu, proses pelucutan senjata tersebut juga dinilai tidak berjalan mulus karena Iraq dianggap terlalu mengulur-ulur waktu. Kondisi ini

dimanfaatkan Amerika Serikat sebagai alasan untuk menyerang Iraq pada tanggal 20 maret 2003.

Serangan militer Amerika Serikat ke Iraq menimbulkan kekhawatiran bagi Iran, karena bukan tidak mungkin Amerika Serikat akan melakukan serangan atas Iran kelak. "Dampak dari serangan Amerika Serikat ke Iraq adalah terciptanya sebuah sistem keamanan regional baru di Timur Tengah." (Rahman, hal.184, 2003). Kehadiran Amerika Serikat di Iraq ini dikhawatirkan akan meningkatkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Sejak tahun 1979, setelah revolusi Islam di Iran, negara ini memiliki daya pikat yang cukup kuat bagi gerakan-gerakan Islam di dunia, khususnya di Timur Tengah. Iran memiliki pengaruh di beberapa negara di Timur Tengah, khususnya di negara-negara yang sedang tidak stabil. Iran memang selalu memberikan bantuan moril maupun materiil terhadap gerakan-gerakan Islam khususnya Syiah. (Rahman, Kompas Sabtu 18 April 2009). Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara Iran dan Hizbullah di Lebanon, dimana Iran mengirimkan Garda Revolusi untuk membantu ataupun melatih gerakan Hizbullah, khususnya pada dekade 1980an. Selain itu, Iran juga membangun hubungan dengan kelompok HAMAS di Pelestina dengan memberikan berbagai bantuan ekonomi kepada kelompok HAMAS. Iran juga memiliki peranan di Iraq khususnya kepada kaum Syiah, Iran mensponsori lahirnya Dewan Tertinggi Revolusi Islam Iraq / *Supreme Council of the Islamic Revolution in Iraq* (SCIRI) dibawah pimpinan Sayyid Muhammad Baqir Al-Hakim.

Tampak adanya upaya dari Iran untuk juga melakukan perluasan pengaruh, khususnya di Timur Tengah. Hal ini telah menjadi kekhawatiran dari berbagai negara-negara di Timur Tengah pasca Revolusi Islam Iran tahun 1979. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena Khomeini pada saat itu kerap mendengungkan isu ekspor revolusi. Selain itu, Iran memang kerap menjalin hubungan dengan kelompok ataupun gerakan Islam. Selain itu, Iran juga merupakan *major power* di Kawasan Timur Tengah. Iran juga berupaya untuk mengembangkan kekuatan militernya.

Upaya Iran dalam mengembangkan kekuatan militernya menjadi sorotan banyak pihak, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Sejauh ini, Iran berhasil

mengembangkan rudal balistik *Shihab 3* dan juga mengembangkan program nuklirnya dimana kedua hal tersebut memiliki arti strategis. Rudal *Shihab 3* sendiri adalah rudal dari darat ke darat yang mampu untuk menjangkau jarak hingga 1.300 Km dan mampu membawa bahan peledak seberat 750 hingga 1.000 Kg.

Teknologi Rudal *Shihab 3* dapat juga digunakan untuk keperluan militer lain, seperti untuk meluncurkan satelit. Hal tersebut dibuktikan Iran pada september 2004 dimana Teheran meluncurkan satelit percobaan seberat 20 Kg dengan menggunakan teknologi rudal balistiknya. Proyek tersebut dinamakan proyek *Safir-313* yang dalam bahasa Persia berarti 'Duta' atau 'utusan'. Proyek tersebut dapat menjadi tahap awal bagi Iran dalam membangun kemampuan teknologi luar angkasanya. Iran memang berambisi untuk menjadi negara Islam pertama yang menguasai teknologi ruang angkasa.

Selain itu, Iran juga berambisi untuk mengembangkan program nuklirnya. Perhatian Amerika Serikat dan Israel tertuju ke Iran, setelah Iran melakukan perjanjian dengan Rusia untuk menyelesaikan salah satu dari dua reaktor yang belum terselesaikan di Bushehr. (Roshandel, hal. 151, 2000). Pada tahun 2002, Russia mengumumkan kesediaannya untuk membangun sebuah reaktor nuklir baru bagi Iran. Hal ini merupakan kelanjutan dari hubungan Iran-Rusia yang semenjak tahun 1992 hanya terbatas pada pengembangan reaktor nuklir di Bushehr. Proyek tersebut telah diselesaikan Rusia pada Oktober 2004.

Pada Agustus 2003 Pemerintah Iran memberikan izin untuk memulai pembangunan tahap kedua pusat listrik tenaga nuklir di Bushehr. Selain itu, Iran juga mulai berupaya untuk melakukan kontrak-kontrak terkait dengan proyek tersebut. Lalu terkait dengan proses pengayaan uranium, Iran pada bulan Oktober 2004 mengumumkan bahwa fasilitas konversi uranium di kota Isfahan telah hampir selesai dibangun dan sudah 70% beroperasi.

Fenomena-fenomena tersebut menggambarkan adanya berbagai upaya dari Amerika Serikat dan Iran untuk saling berebut pengaruh di kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah memang terbukti sangat strategis sehingga mengundang berbagai kepentingan baik eksternal maupun internal negara di kawasan itu sendiri

untuk menanamkan pengaruh. Benturan-benturan antara Iran dan Amerika Serikat yang terjadi di Kawasan Timur Tengah ini tentunya akan menimbulkan implikasi dan juga dampak tersendiri bagi tatanan hubungan internasional kawasan tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masuknya kekuatan hegemoni dari Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah telah menimbulkan reaksi negatif dari Iran. Sementara itu, Iran yang berorientasi kepada Islam juga tampak berupaya untuk mempertahankan sekaligus memperluas pengaruhnya sebagai *major power* di kawasan Timur Tengah, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Iran untuk menciptakan pengaruh dan hegemoni ditengah kekuatan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah?
2. Bagaimana perebutan pengaruh dan hegemoni antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah?
3. Bagaimanakah prospek kawasan Timur Tengah ditengah persaingan antara Amerika Serikat dan Iran?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh sebuah negara dalam menciptakan hegemoni.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari perebutan hegemoni di suatu kawasan.

## 1.4 Kerangka Teori

Fungsi dari teori adalah untuk menjelaskan semua gejala, termasuk gejala-gejala sosial. Teori juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan gejala-gejala empiris secara sistematis. Adapun dalam mengamati sebuah masalah atau fenomena yang terjadi berkaitan dengan Iran *versus* Amerika Serikat dalam perebutan hegemoni di Timur Tengah, penulis menggunakan teori hegemoni.

Kata hegemoni berarti keunggulan atau supremasi dari negara, kelompok sosial, ataupun individu yang berupaya untuk menguasai lainnya. Ada empat karakter dari hegemoni dalam kisah-kisah Yunani kuno. Pertama, adanya dua struktur: negara yang memimpin atau hegemon dan negara-negara aliansinya yang juga berdaulat.



Kedua, ketiadaan aliansi secara luas. Ketiga, terkait dengan cairnya aliansi, polis-polis dapat keluar atau masuk dalam aliansi pada waktu tertentu dan tergantung pada kepentingannya. Keempat, adalah sejarah, kecenderungan sebuah aliansi untuk bertransformasi menjadi imperium. (Fontana, hal. 81-82, 2008)

Robert Keohane mendefinisikan hegemoni sebagai “kepemilikan lebih pada sumberdaya”. (hal. 28, 1984). Dalam pandangan Keohane, sumberdaya terdiri dari bahan mentah (*raw material*), sumber modal (*source of capital*), dan pasar (*market*). kekuatan hegemon harus menguasai tiga hal tersebut. Selain itu, hegemoni juga harus memegang keuntungan komparatif dari produksi barang-barang yang memiliki nilai tinggi. Definisi hegemoni dari Robert Keohane lebih berorientasi kepada penguasaan ekonomi.

Robert Cox pandangannya sedikit berbeda dengan Keohane. Pendekatannya berbeda dengan arti dari hegemoni secara konvensional yang merujuk pada berkuasanya suatu negara dalam hubungannya pada negara lain yang lebih lemah. “Ia menggunakan hegemoni sebagai struktur dari nilai dan pengertian tentang tatanan alami yang ditanamkan ke seluruh sistem baik negara maupun non negara” (Cox, hal. 140, 1992)

### **1.5. Metode Penelitian**

Kerangka metodologi sangat diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah karena metodologi berguna untuk mengarahkan peneliti dalam mencapai tujuan dari penelitian. Peranan metodologi juga sangat penting bagi peneliti untuk memenuhi standar keilmiahan dari hasil penelitian yang dilakukan. Terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai perebutan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. (Bogdan dan Taylor, hal. 21-22, 1992). Sementara menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau

dengan cara kuantifikasi lainnya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. (Basrowi dan Suwandi, hal. 1-2, 2008)

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka untuk memudahkan alur-pikir pembahasan tesis ini, maka tesis ini akan dibagi kedalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan berisi, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Kerangka Teori. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Hegemoni. Lebih spesifik, bab ini juga menjelaskan konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian yakni hegemoni menurut Neo-Gramscian dan juga Hegemonic War.

BAB III: Metodologi Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tentang Konsep Dasar, Ruang Lingkup Penelitian, Metode Penelitian, Karakteristik Data, Metode Pengumpulan Data, dan Analisis Data

BAB IV: Perebutan Pengaruh dan Hegemoni Di Kawasan Timur Tengah. Dalam bab ini dijelaskan juga mengenai upaya Iran dalam menciptakan pengaruh dan hegemoni di Timur Tengah. Lalu, dijelaskan juga upaya Amerika Serikat dalam menciptakan hegemoni di Timur Tengah. Selanjutnya, dijelaskan juga perebutan pengaruh dan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam bab ini juga dijelaskan prospek kawasan Timur Tengah dalam kondisi perebutan pengaruh dan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah

BAB V: Bab ini merupakan kesimpulan hasil penelitian yang penulis peroleh dalam tesis ini.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori hegemoni. Teori ini akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa (*tools of analysis*) dalam melihat setiap fenomena yang terjadi yang terkait dengan Iran maupun Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Selain itu, teori ini juga menjadi alat analisa untuk menganalisa kondisi kawasan ditengah persaingan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat.

#### II.1. Teori Hegemoni

##### II.1.1. Konsep Dasar

Kata hegemoni telah digunakan sejak lama, kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno dan disitu dipakai untuk menunjuk pada kekuatan yang lebih kuat (Suseno, hal. 188, 2003). Kata ini digunakan dalam karya Thucydides yakni "*The Peloponesian War*". Selain itu, Thucydides juga menggunakan konsep hegemoni dalam konsep yang ia sebut sebagai *hegemonic war*. Thucydides menggunakan konsep tentang *hegemonic war* untuk menggambarkan kondisi Perang Peloponesus antara Sparta dan Athena, dimana konflik yang terjadi melibatkan dua kota (*polis*) yang sama-sama berdaulat.

Salah satu penggunaan kata hegemoni pada Masa Yunani Kuno mengarah kepada kepemimpinan aliansi militer dari berbagai negara kota yang sama-sama berdaulat. Kemudian, kata ini juga merujuk pada negara kota yang memimpin aliansi sebagai reaksi dari adanya ancaman militer. Lalu, hegemoni juga merujuk kepada hubungan antar negara dalam sebuah sistem dimana ada salah satu negara yang berupaya menjalankan kekuatan dan kepemimpinannya kepada negara lain. Kata hegemoni berarti keunggulan atau supremasi dari negara, kelompok sosial, ataupun individu yang berupaya untuk menguasai lainnya. (Fontana, hal. 81, 2008)

Ada empat karakter dari hegemoni dalam kisah-kisah Yunani Kuno. Pertama, adanya dua struktur, yaitu negara yang memimpin atau hegemon dan negara-negara aliansinya yang juga berdaulat. Kedua, ketiadaan aliansi secara luas. Ketiga, terkait

dengan cairnya aliansi, polis-polis dapat keluar atau masuk dalam aliansi pada waktu tertentu dan tergantung pada kepentingannya. Keempat, adalah sejarah, kecenderungan sebuah aliansi untuk bertransformasi menjadi imperium. (Fontana, hal. 82, 2008)

Belakangan konsep hegemoni banyak digunakan oleh pemikir-pemikir Marxis. Kata hegemoni pernah digunakan oleh sejumlah pemikir yakni Plechanov, Lenin, Axelrod, Lukacs, dan Gramsci. Konsep ataupun praktik dari hegemoni telah digunakan oleh tokoh-tokoh tersebut walaupun tidak dalam kata hegemoni. Kata *gegemoniya* muncul pertama kali pada sebuah pamflet dari kaum marxis pada tahun 1902 yang berjudul *what is to be done?* namun penerjemahan kedalam bahasa Inggris tidak berisi tentang hegemoni secara mendalam tetapi hanya dipermukaan saja. (Boothman, hal. 35, 2008)

Pada awalnya, hegemoni ini digunakan untuk menjelaskan tatanan internasional oleh Thucydides, namun dalam pandangan Marxis lebih cenderung digunakan dalam tataran yang lebih sempit yakni terkait dengan konflik antar kelas dan juga hubungan antara kekuasaan dan rakyat. Tetapi salah satu pemikir Marxis berhasil memberikan sumbangan yang cukup besar kepada teori ini, tokoh tersebut adalah Antonio Gramsci.

Antonio Gramsci melihat hegemoni bukan hanya sebagai kekuatan untuk mamaksa tetapi juga ada suatu konsensus dalam membangun hegemoni. Gramsci sebagai seorang pemikir marxis mendasarkan teorinya pada perjuangan kelas dan perubahan sosial. Konteks dari pemikiran Gramsci adalah terkait perjuangan kelas *proletariat* dalam merebut hegemoni dari kaum *borjuis*. Namun, dasar dari pemikiran Gramsci ini kelak menjadi landasan dari terbentuknya teori hegemoni dalam tataran hubungan antar negara. Selain itu, teori hegemoni dari Gramsci ini juga bukan hanya bertujuan menggambarkan kekuatan yang sudah dominan (*borjuis*) tetapi juga bagi kekuatan baru yang berupaya meruntuhkan *status quo* (*proletar*).

Hegemoni dalam ilmu hubungan internasional identik dengan mazhab realis dan neo-realis. Penggunaan kata hegemoni ini awalnya digunakan oleh sebagian kalangan tersebut untuk menggambarkan kondisi kerjasama internasional non-militer

yang muncul pada tahun 1970an. Kalangan ini melihat hegemoni sebagai sebuah tatanan internasional (*international order*), seperti halnya *balance of power*, bipolar, multipolar, dan unipolar. Pandangan seperti ini memang menjadi ciri dari mazhab realis dimana *power* menjadi konsep inti (*core concept*) dari landasan pemikirannya.

Teori hegemoni dari kalangan neo-realis memberi kesan bahwa sebuah tatanan merupakan hasil dari konsentrasi dan kapabilitas kekuatan oleh sebuah negara yang membuat negara tersebut menjadi berwibawa dalam sebuah tatanan. Selanjutnya, kemunduran dari kekuatan hegemoni akan membawa kerusakan pada tatanan itu sendiri (Ozcelic, hal. 92, 2005). Perubahan pada satu komponen dalam sistem dapat mengganggu kelanggengan sistem itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hegemoni digunakan untuk menggambarkan sifat dari sebuah tatanan.

Robert Keohane mendefinisikan hegemoni sebagai “kepemilikan lebih pada sumberdaya” (hal. 28, 1984). Dalam pandangan Keohane, sumberdaya terdiri dari bahan mentah (*raw material*), sumber modal (*source of capital*), dan pasar (*market*). kekuatan hegemon harus menguasai tiga hal tersebut. Selain itu, hegemon juga harus memegang keuntungan komparatif dari produksi barang-barang yang memiliki nilai tinggi. Definisi hegemoni dari Robert Keohane lebih berorientasi kepada penguasaan ekonomi.

Robert Gilpin mendefinisikan kekuatan hegemon sebagai “kontrol atau dominasi terhadap negara yang lebih rendah/lemah didalam suatu sistem” (hal. 28, 1981). Dalam definisinya, Gilpin tampak memberikan perhatian kepada unsur *power* dari sebuah negara. Selain itu, Gilpin juga menggambarkan adanya *hierarki power* dari negara-negara yang menjadi bagian dari suatu sistem. Dan yang terpenting adalah bahwa Gilpin melihat hegemoni sebagai suatu pola dalam sebuah tatanan.

Dari konsep tentang hegemoni tersebut maka akhirnya muncul sebuah teori yakni *Hegemonic Stability Theory* (HST). Teori ini merupakan usaha untuk mengkombinasikan pemikiran realis/neo-realis dan pemikiran liberalis/neo-liberal. Sesuai dengan karakter masing-masing mazhab pemikiran maka teori ini memberikan dua versi, yakni ekonomi dan kemandirian. Namun, keduanya berangkat dengan dasar yang sama bahwa dengan adanya kekuatan hegemon maka akan tercipta suatu

kestabilan dalam tatanan internasional. Asumsi tersebut berdasarkan pengalaman pada *pax Romana* dan *pax Britanica*, dimana pada masa itu sistem internasional relatif damai dan aman (Ozcelic, hal. 93, 2005).

Asumsi lainnya adalah berdasarkan pengalaman pada tahun 1930an dimana terjadi "*great depression*" dalam ekonomi internasional. Sebelumnya, Inggris menjadi pemimpin dalam sistem moneter internasional pada abad ke 19 dan awal abad ke 20, dimana emas yang menjadi standar nilai dari mata uang diatur dari London lewat *Bank of England*. Namun setelah perang dunia terjadi peranan ini mulai bergeser ke Amerika Serikat. Akibat pergeseran tersebut maka terjadi depresiasi nilai mata uang dunia, berdirinya batasan-batasan dalam perdagangan, dan reduksi volume perdagangan yang drastis. Ketiadaan dari hegemoni, atau kepemimpinan, akan menghasilkan instabilitas. (Viotti, et al, hal. 57, 1993).

Terkait dengan masalah keamanan, HST memberikan gambaran bahwa tatanan dunia diciptakan dan dijaga oleh negara hegemon, dimana kapabilitas *power* dari negara hegemon digunakan untuk mengatur hubungan antar negara. Kepemilikan lebih atas *power* oleh satu negara, memungkinkan negara tersebut mampu untuk memberikan dorongan, baik positif maupun negatif, kepada negara lain. (Ozcelic, hal. 93, 2005). Pandangan ini menunjukkan sebuah realitas bahwa *power* masih memegang peranan yang signifikan dalam tatanan internasional. Menurut Gilpin, tatanan internasional merupakan refleksi dari ketidakseimbangan distribusi kekuatan antar negara. (hal. 40, 1981).

Secara umum, pandangan neo-realis terhadap hegemoni lebih kepada dominasi dari satu negara terhadap negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari konsep *power* yang menjadi dasar dalam teori hegemoni dari neo-realis. Dengan menekankan teori ini pada konsep *power* menyebabkan hegemoni hanya bersifat memaksa saja. Pembentukan tatanan dunia didasarkan atas suatu paksaan dari negara kuat, dan tidak didasarkan pada kedaulatan dari setiap negara.

Konsep *power* yang dominan dalam pemikiran realis ataupun neo-realis dalam hegemoni, kemudian mendapat kritikan dari kelompok Neo-Gramscian. Kelompok Neo-Gramscian ini mendasarkan teorinya kepada pengertian hegemoni

menurut Antonio Gramsci. Unsur-unsur dalam pembentukan hegemoni yang diajukan oleh Gramsci digunakan dalam teori ini. Hegemoni menurut Neo-Gramscian selain *power* terdapat unsur lainnya yakni apa yang disebut Gramsci sebagai unsur politik atau nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh kelompok lain. Neo-Gramscian berpendapat bahwa hegemoni yang hanya mengandalkan kepada paksaan dengan kekuatan, maka hegemoni tersebut tidak stabil.

### II.1.2. Hegemoni Neo-Gramscian

Untuk melihat upaya hegemoni dari Iran dan Amerika Serikat dalam menciptakan hegemoni di kawasan Timur Tengah maka digunakan teori dari neo-Gramscian. Landasan dari teori ini adalah gagasan dari Antonio Gramsci yang merupakan seorang pemikir Marxis. Sebagai seorang Marxis tentu pemikirannya terkait dengan pertarungan kelas. Namun teori ini dikembangkan oleh kelompok neo-Gramscian yang diterapkan dalam tataran internasional.

Gramsci memulai pemikirannya dari kondisi yang terjadi pada saat itu, yang menurutnya dinilai sebagai kondisi hegemoni dari *borjuis*. Gramsci berangkat dari pertanyaan dimana letak kekuatan *borjuis*? Borjuasi merebut kekuasaan nyata dalam masyarakat Barat yang majemuk karena semua dimensi kehidupan dan kecenderungan *historis* masyarakat seakan-akan ditanggapi dan dipenuhi olehnya. Gramsci menyebutnya sebagai Blok Historis. Blok Historis adalah kesatuan dialektis antara semua dimensi kehidupan kelas-kelas sosial sebuah masyarakat sedemikian rupa, sehingga saling mendukung dibawah hegemoni sebuah kelas, yakni kelas *borjuis*. (Suseno, hal. 185, 2003).

Ada tiga unsur yang menjadi tanda dari sebuah Blok Historis yakni unsur ekonomi, politik, dan militer. Gramsci menyadari bahwa hegemoni dari kaum borjuis bukan semata-mata berdasarkan daya alam dan ekonomi saja, tetapi juga didukung oleh keberhasilan *borjuis* untuk menciptakan alam pikiran dan sistem nilai yang diyakini oleh seluruh masyarakat. Inilah yang menjadi perbedaan dengan pemikiran-pemikiran lain tentang hegemoni.

Gramsci melihat bahwa faktor ekonomi saja tidak cukup untuk menjelaskan terjadinya perubahan sosial. Krisis-krisis ekonomi hanya menjadi alasan bagi

masyarakat untuk berubah, tetapi bukan satu-satunya faktor. Gramsci melihat kekuasaan *borjuis* bukan hanya terletak pada kepemilikan modal saja tetapi juga karena penguasaan alat-alat represif untuk menundukan perlawanan. Tetapi kedua hal tersebut belum cukup untuk menciptakan hegemoni. Selanjutnya Gramsci masuk kepada unsur politik. Unsur politik erat kaitannya dengan kesadaran, jadi ada nilai-nilai yang diusung oleh pihak hegemon. Gramsci menyadari bahwa borjuasi memegang hegemoni dalam Blok Historisnya tidak hanya karena ia berkuasa dalam bidang ekonomi dengan didukung oleh daya ancam negara, melainkan karena seluruh masyarakat menganggap situasi kekuasaan itu sebagai sesuatu yang wajar. Hegemoni *borjuis* didukung oleh nilai-nilai yang dapat diterima oleh kelas lain. Dimana pada saat itu, hegemoni borjuasi bagi akal sehat masyarakat yang hidup saat itu kelihatan masuk akal, biasa, dan mudah dimengerti. (Suseno, hal.188, 2003)

Unsur politik yang diusung oleh Gramsci inilah yang membuatnya berbeda dengan pemikir-pemikir lain. Suatu kelas sosial harus mengembangkan nilai-nilai yang universal sehingga dapat diterima oleh kelas lainnya. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki benar-benar tertanam dalam sebuah keyakinan, cita-cita, dan pandangan normatif dari seluruh komunitas. Dengan begitu, maka kekuasaan dicapai dengan cara tersebut dapat lebih stabil dibandingkan kekuasaan yang dibangun atas dasar paksaan ataupun keterkaitan ekonomi semata.

Pandangan Gramsci ini menginspirasi pemikir-pemikir lain, yang kemudian dikenal dengan neo-Gramscian, salah satunya adalah Robert Cox. Teori hegemoni dari Gramsci ini diadaptasikan untuk menganalisa konflik internasional dan juga tatanan dunia oleh Robert Cox. Robert Cox pandangannya berbeda dengan kelompok realis ataupun neo-realis sebelumnya. Pendekatannya berbeda dengan arti dari hegemoni secara konvensional yang merujuk pada berkuasanya suatu negara dalam hubungannya pada negara lain yang lebih lemah. "Ia menggunakan hegemoni sebagai struktur dari nilai dan pengertian tentang tatanan alami yang ditanamkan ke seluruh sistem baik negara maupun non negara" (Cox, hal. 140, 1992).

Cox menganalisa peranan dari kekuatan sosial, bentuk negara, dan tatanan dunia. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi dari perubahan struktural



dan juga upaya untuk menghancurkan struktur tersebut. Kerangka ini bertujuan untuk melepaskan diri dari pandangan yang cenderung kepada konflik antara negara dan masyarakat seperti pemikiran realis. Dengan kerangka ini, kita dapat melihat konsep *power* secara terstruktur dimana tatanan yang kuat dan stabil dihasilkan dari adanya kecocokan antara ide yang dominan, institusi, dan kemampuan material.

Teori dari Robert Cox melihat struktur sebagai sebuah hasil interaksi dari ketiga variabel tersebut. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan sirkular antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel *Social Force* merupakan ide ataupun ideologi. Variabel *Form of State* adalah kemampuan material, dan variabel *World Order* merupakan institusi. Yang terpenting adalah bahwa ada tiga variabel yang menjadi dasar analisa dalam teori hegemoni yang diusung oleh Cox.

Robert Cox melihat hegemoni sebagai bentuk luar dari ekspansi hegemoni nasional yang dilakukan oleh kelas dominan dalam negara tersebut. Hegemoni dunia bukan hanya sekedar tatanan tetapi juga dominasi dari cara produksi, kebudayaan, dan sistem dari institusi sosial yang dipenetrasikan kepada seluruh negara didalam sistem internasional. Hegemoni dunia digambarkan sebagai struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur politik; bukan hanya satu diantaranya melainkan semuanya (Cox, hal. 137, 1996).

Tatanan dunia merupakan hasil dari hegemoni dan juga formasi dari Blok Historis. Dalam hal ini, Cox mengambil istilah Blok Historis dari konsep Gramsci sebagai aliansi dari negara-negara yang dibentuk atas dasar konsensus dari nilai-nilai yang diajukan oleh negara pemimpin aliansi. Blok hegemoni ini diatur oleh nilai-nilai hegemoni yang menjadi basis dari terbentuknya aliansi. Jadi keberhasilan dari Blok Historis ditentukan dari upaya penciptaan kepemimpinan nilai-nilai intelektual dan moral atau ideologi. Proses dari penyebaran ideologi ini bisa dilakukan lewat institusi agama, media massa, dan institusi-institusi sosial lainnya. Proses penyebaran ini sering disebut revolusi pasif. Kemunculan Blok Historis dihasilkan dari keberhasilan upaya-upaya penyebaran ideologi tersebut. Penyebaran nilai-nilai tersebut merupakan upaya persuasif kepada seluruh anggota masyarakat agar mau menerima nilai-nilai yang diusung agar nantinya menjadi sebuah kesepakatan umum diantara mereka. Jadi

upaya-upaya penyebaran nilai juga merupakan bagian dari sebuah upaya untuk menciptakan hegemoni. Neo-Gramscian memang lebih kepada penjelasan mengenai nilai-nilai atau ideologi, tetapi bukan berarti mengabaikan unsur lainnya.

Konsep hegemoni dari neo-Gramscian ini merupakan sebuah pelengkap dari konsep yang diajukan oleh kelompok realis ataupun neo-realis. Walaupun Gramsci menitikberatkan pada unsur ideologis, namun bukan berarti unsur militer ataupun ekonomi menjadi tidak penting. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya hegemoni yang stabil. Baik kekuatan hegemon ataupun negara yang berupaya merebut hegemoni harus memperhatikan ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut sama pentingnya dalam menciptakan hegemoni.

### II.1.3. Hegemonic War

Untuk menganalisa prospek kawasan Timur Tengah ditengah hegemoni yang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat, maka digunakan teori *hegemonic war*. Teori ini digunakan untuk melihat dampak dari adanya persaingan antara kekuatan-kekuatan hegemon terhadap suatu tatanan. Jadi, teori ini dapat melengkapi teori dari neo-Gramscian untuk melihat implikasi bagi kawasan Timur Tengah.

Konsep tentang *hegemonic war* ini digunakan oleh Thucydides dalam karya klasiknya *The Peloponesian War*. Thucydides menggunakan konsep ini untuk menggambarkan persaingan dan konflik antara dua kekuatan besar saat itu, yakni Athena dan Sparta. Pemikiran-pemikiran dari Thucydides juga kerap menjadi rujukan dari mazhab realis dalam ilmu hubungan internasional.

Kemudian, konsep dari Thucydides mengenai *hegemonic war* ini dikaji lebih lanjut oleh Robert Gilpin untuk melihat tatanan internasional. Robert Gilpin mengkaji hal ini didalam sebuah jurnalnya yang bertema *preventing major war*. Dalam analisisnya Gilpin menggunakan kasus *peloponesian war* yang digambarkan oleh Thucydides dalam analisisnya.

Esensi dari teori Thucydides mengenai *hegemonic war* adalah adanya perubahan secara fundamental dalam sistem internasional. Hal ini adalah faktor utama dari terjadinya perang hegemoni. Struktur dari sistem atau distribusi kekuatan diantara negara-negara dalam sistem dapat menjadi stabil ataupun tidak stabil.

(Gilpin, hal. 592, 1988). *Hegemonic war* ini berbeda dengan perang lainnya karena *hegemonic war* ini diakibatkan ataupun mengakibatkan perubahan sistem internasional secara fundamental dan bukan hanya berdampak parsial.

Thucydides menilai sistem yang stabil adalah bila perubahan yang terjadi didalam sistem tidak menjadi ancaman bagi kepentingan vital dari negara yang dominan. Dan apabila perubahan yang terjadi menyinggung kepentingan vital dari negara yang dominan maka akan mengakibatkan *hegemonic war*. Selain itu, sistem yang tidak stabil adalah apabila perubahan yang terjadi dapat mengikis atau mengurangi posisi dari negara hegemon. Hal ini akan memicu buruknya hubungan diplomatik yang akan mempercepat terjadinya *hegemonic war*. Menurut Thucydides sistem yang stabil adalah sistem yang memiliki hierarki yang jelas (Gilpin, hal. 592, 1988).

Secara sederhana pendekatan Thucydides dalam menggambarkan *hegemonic war* ini didasarkan pada dialektika:

1. thesis, negara hegemon, dalam kasus ini Sparta, yang lebih dominan dalam politik, ekonomi, dan kepentingan strategis.
2. antithesis, negara penantang, dalam hal ini Athena yang berupaya untuk merubah tatanan yang ada, hal ini membuat terjadinya perang.
3. Sinthesis, terbentuknya tatanan baru sebagai akibat dari perang yang tidak terelakan antara negara dominan dan penantang. (Gilpin, hal. 595, 1988).

*Hegemonic war* ini melibatkan aspek-aspek fundamental didalam konflik yang terjadi antara kekuatan dominan dalam sebuah sistem. Aspek-aspek fundamental tersebut adalah politik, ekonomi, dan ideologi. Peperangan antara Athena dan Sparta mengandung aspek-aspek tersebut. Athena lebih demokratis dan Sparta yang aristokratis. Karena pentingnya aspek tersebut membuat dampak yang ditimbulkan dari peperangan ini adalah pergeseran ataupun perubahan dalam sistem internasional.

Gilpin melihat konsep tentang *hegemonic war* sendiri masih relevan dalam beberapa peperangan yang terjadi di dunia modern. Perang Tiga Puluh Tahun (1619-1648) memperlihatkan masih relevannya *hegemonic war*. Walaupun perang ini terjadi

di beberapa tempat yang terpisah dan waktu yang berlaianan yang melibatkan Perancis, Spanyol, Swedia, Polandia, dan kekuatan lain. Bagaimanapun, perang ini melibatkan kekuatan utama di Eropa. Dasar masalah dalam peperangan ini terkait pertanyaan-pertanyaan, apakah Eropa harus diatur oleh kekuatan imperialisme Habsburg atau memiliki otonomi? Apakah feodalisme dan perdagangan kapitalisme? Apakah protestan atau khatolik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut melibatkan tiga unsur penting dalam hegemoni yakni ekonomi, politik, dan ideologi. (Gilpin, hal. 606-607, 1988).

Intensitas dan lamanya peperangan dengan sendirinya merubah kekuatan antara negara-negara yang berkonflik, hal ini menimbulkan adanya pergeseran dari distribusi kekuatan dimasa selanjutnya. Lalu, hal tersebut menimbulkan dampak penting bagi politik domestik dan internasional. Upaya Habsburg untuk menciptakan kekuatan imperial di Eropa berhasil dikalahkan, dan muncul negara-negara bangsa sebagai bentuk dari organisasi politik internasional. Kemunculan negara bangsa ini sebagai akibat dari penegasan otonomi bagi negara-negara bangsa pada Perjanjian Westphalia tahun 1648. Abad-abad berikutnya, politik Internasional mulai didasarkan atas kepentingan nasional dan perimbangan kekuatan dari negara-negara.

Akhir abad ke-18 kembali terjadi *hegemonic war*. Kali ini melibatkan Inggris dan Perancis yang pada saat itu kerangka *balance of power* sangat terlihat pada keduanya. Sebagaimana prinsip dari *hegemonic war* yang melibatkan tiga aspek ekonomi, politik, dan ideologi. Masalah-masalah dalam konflik ini juga masih seputar tiga hal tersebut. Apakah hegemoni dari Inggris atau Perancis yang mengatur sistem politik Eropa? Apakah merkantilisme atau perdagangan yang didasarkan atas basis dari ekonomi dunia? dan apakah republik yang revolusioner ataukah bentuk politik konservatif yang lebih tepat bagi bentuk negara?

Perang ini menunjukkan kemampuan dan keunggulan dari kedua kekuatan tersebut. Inggris menunjukkan keunggulannya di laut dengan kemajuan dari teknologi dan taktik kekuatan laut. Sementara didarat, Perancis lebih unggul dengan mengintegrasikan bubuk mesiu, taktik dan doktrin oleh Napoleon Bonaparte. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Inggris berhasil mengalahkan Perancis, dan tatanan

internasional baru muncul lewat perjanjian Vienna tahun 1815. Kemenangan Inggris ini membuatnya menjadi kekuatan tunggal, atau sering disebut *Pax Britanica*. *Pax Britanica* berakhir setelah terjadinya Perang Dunia I. Perlombaan kekuatan laut antara Jerman dan Inggris, konflik antara Jerman dan Perancis, serta perebutan pengaruh antara Jerman/Austria dengan Russia di Balkan menandai rangkaian dari *phase* Perang Dunia I. Ini juga menunjukkan adanya upaya dari Jerman untuk mendominasi kekuatan di Eropa.

Kehancuran dan kerugian yang timbul dari perang ini menimbulkan sikap baru dalam hubungan internasional di kemudian hari. Demokratisasi dan industrialisasi mulai mengikis legitimasi dari kekuatan militer. Perjanjian Versailles tahun 1919 menimbulkan sikap baru dan mengakhiri Perang Dunia I. Dari perjanjian tersebut, melahirkan sikap baru yakni semangat untuk menghindari perang kecuali atas dasar membela diri dan juga bersama-sama menghukum negara-negara agresor. Dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa menunjukkan hal tersebut.

Kegagalan Liga Bangsa-bangsa dalam realitas perimbangan kekuatan saat itu, menjadi sebab munculnya Perang Dunia II yang menunjukkan adanya upaya untuk menentang sistem yang ada dibawah kontrol Inggris dan Perancis. Perang Dunia II ini juga menimbulkan dampak yang signifikan dari tatanan internasional dalam berbagai sendi kehidupan modern. Munculnya dua kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet mewarnai tatanan dunia. Tatanan Bipolar ini menimbulkan konsep tentang *deterrence* untuk menjaga agar tidak terjadi konflik langsung antara dua *super power* dunia.

Rangkaian-rangkaian peperangan diatas menunjukkan bahwa tatanan internasional kerap berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem internasional akan mengakibatkan munculnya suatu tatanan baru. Dari gambaran tersebut, menunjukkan bahwa akan selalu ada pihak yang akan berupaya untuk mengurangi kekuatan ataupun pengaruh dari kekuatan hegemon, dan apabila upaya dari negara penantang tersebut mengancam kepentingan vital dari negara hegemon maka perang menjadi hal yang tidak terelakan.

Ada tiga variabel yang harus diperhatikan dalam *hegemonic war*, yakni, ekonomi, politik, dan ideologi. Ketiga aspek tersebut kerap menimbulkan terjadinya peperangan yang besar. Dan ketiga variabel tersebut sesuai dengan teori hegemoni dari realis/neo-realis dan Neo-Gramscian yang juga akan digunakan dalam penelitian ini dalam mengkaji masalah Iran berhadapan dengan Amerika Serikat di Timur Tengah.

## II.2. Hegemoni di Timur Tengah

Kawasan Timur Tengah memiliki berbagai arti strategis sehingga banyak kekuatan yang berupaya untuk menancapkan pengaruhnya di kawasan ini. Sejarah kawasan Timur Tengah selalu diwarnai oleh pergolakan yang terjadi dari waktu ke waktu. Timur Tengah kerap disebut sebagai pintu masuk dari tiga benua penting didunia, dengan letaknya yang strategis tersebut maka kawasan ini juga dianggap dapat menjadi *triger factor* dari konflik dunia. Potensi yang besar dari kawasan Timur Tengah ini menimbulkan daya tarik dari kekuatan-kekuatan baik dari luar kawasan ataupun didalam kawasan untuk menguasainya.

Perubahan peta kekuatan kerap terjadi di Timur Tengah. Amerika Serikat yang merupakan satu-satunya *super power* dunia menjadi kekuatan hegemon di kawasan ini. Amerika Serikat berhasil membangun kekuatan militer di Timur Tengah dengan membangun pangkalan-pangkalan militernya. Selain membangun pangkalan militer Amerika Serikat juga menempatkan Armada V di Teluk Persia. Upaya-upaya tersebut menunjukkan kuatnya unsur *coercive* yang dimiliki Amerika Serikat di Timur Tengah.

Timur Tengah memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi Amerika Serikat. Dimana kawasan ini kaya akan minyak bumi dan gas alam yang merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi negara industri seperti Amerika Serikat. Selain dua unsur (Militer dan Ekonomi) dari hegemoni tersebut, Amerika Serikat yang menjadi pengusung demokrasi juga mengampanyekan demokrasi di Timur Tengah. Ini merupakan bukti bahwa Amerika Serikat juga berupaya untuk menciptakan nilai-nilai yang dapat disepakati oleh negara-negara Timur Tengah (unsur ideologi).

Amerika Serikat sebagai negara hegemon di Timur Tengah tampak mulai mendapat tantangan dari salah satu *major power* di Timur Tengah yakni Iran. Iran berupaya untuk membangun kekuatan militernya dengan membangun teknologi rudal balistik. Selain itu, Iran juga membangun program nuklirnya yang berpotensi membuat Iran menjadi kekuatan nuklir di Timur Tengah. Selain itu, Iran merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak bumi dan gas terbanyak didunia. Hal ini membuat Iran memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Minyak dan gas masih menjadi sumber energi yang utama didunia, hal ini memperlihatkan sedikit banyak adanya faktor ketergantungan ekonomi dari negara lainnya. Selain itu, Iran juga berupaya untuk mengembangkan kekuatan ekonominya selain dari minyak dan gas.

Selain membangun unsur *power* dan ekonomi, Iran juga tampak berupaya untuk menyebarkan ideologinya di kawasan Timur Tengah. Pada dekade awal berdirinya Republik Islam Iran, Ayatullah Khomeini yang merupakan pemimpin tertinggi Iran kerap mendengungkan slogan-slogan “ekspor revolusi”. Setelah meninggalnya Khomeini tahun 1989, slogan ekspor revolusi memang sudah tidak terdengar tetapi Iran masih saja membangun hubungan ataupun membantu gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah. Hal-hal tersebut adalah indikasi bahwa Iran yang mengusung ideologi Islam berupaya menyebarkan nilai-nilai ini agar dapat diterima oleh masyarakat negara lain.

Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon di Timur Tengah secara jelas menunjukkan keunggulannya ketika menginvasi Iraq tahun 2003 yang mengakibatkan jatuhnya Rezim Saddam Hussein. Kasus tersebut menunjukkan kedigdayaan Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun, Amerika Serikat mulai mendapatkan tantangan dari *rising power* yakni Iran. Ini tentunya berbenturan dengan kepentingan kekuatan hegemon yakni Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan persaingan antara dua kekuatan ini. Persaingan ini tentunya menimbulkan terjadinya gesekan-gesekan kepentingan di kawasan Timur Tengah. Dan persaingan tersebut akan menimbulkan dampak bagi kawasan Timur Tengah. Untuk menganalisa hal tersebut maka teori *hegemonic war* digunakan sebagai alat analisa dalam menjawab pertanyaan tersebut.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan bagian dari sebuah penelitian. Metodologi juga membantu peneliti terkait urutan ataupun langkah-langkah apa yang harus ditempuh agar pengetahuan yang diperoleh dapat memenuhi standar ciri-ciri ilmiah. Metodologi juga kerap dipandang sebagai bagian dari logika dalam mengkaji kaidah-kaidah penalaran dengan tepat. Dalam kaitannya dengan metodologi ini, maka hal yang tak kalah pentingnya adalah asumsi-asumsi yang melatarbelakangi berbagai metode yang dipergunakan dalam aktivitas kegiatan ilmiah yang dilakukan. Asumsi-asumsi disini adalah terkait pendirian atau sikap yang akan dikembangkan para ilmuwan maupun peneliti di dalam kegiatan ilmiah mereka agar dapat memenuhi ciri-ciri keilmiah.

Hal diatas menunjukkan betapa pentingnya penggunaan metodologi dalam suatu aktivitas ilmiah. Ada berbagai macam metode dalam penelitian yang telah dikembangkan oleh para pemikir ataupun ilmuwan. Metodologi juga mengalami perkembangan dan juga dinamika seiring dengan perjalanan dan perkembangan dari ilmu pengetahuan. Untuk itu, dalam bab ini akan diuraikan metodologi yang digunakan dalam meneliti tema yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu tentang perebutan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur

#### **III.1. Konsep Dasar**

Kerangka metodologi sangat diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah karena metodologi berguna untuk mengarahkan peneliti dalam mencapai tujuan dari penelitian. Peranan metodologi juga sangat penting bagi peneliti untuk memenuhi standar keilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan. Terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai perebutan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.



Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. (Bogdan, et.al, hal. 21-22, 1992). Sementara menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. (Basrowi, et.al, hal. 1-2, 2008)

Riset kualitatif menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan. Dengan kata lain, riset kuantitatif cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang "mendalam" dan bukan "luas".(Blaxter, et al, hal.60, 1996). Terkait dengan perebutan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah, masalah ini melibatkan sikap ataupun kebijakan sebuah negara dan konsep tentang hegemoni yang tidak bisa diungkap melalui data-data statistik. Masalah ini juga terkait dengan masalah politik yang memang tidak menggunakan data-data statistik.

Ada beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif. Basrowi dan Suwandi (hal.25-30, 2008) menjelaskan karakteristik dari penelitian kualitatif yang merupakan hasil kajian dan sintesis dari versi menurut Lincoln dan Guba, serta Bogdan dan Biklen. Karakteristik tersebut adalah:

1. Latar Alamiah

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.

2. Manusia Sebagai Alat Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Asumsinya adalah karena hanya manusia saja yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya. Dan hanya manusia saja yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

3. Analisis Data Secara Induktif

Penelitian kualitatif mengutamakan analisis data secara induktif dari lapangan tertentu yang bersifat khusus, untuk ditarik suatu proposisi atau teori yang dapat digeneralisasikan secara luas.

4. Teori Dari Dasar (*Grounded Theory*)

Penelitian kualitatif lebih menghendaki penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Hal ini disebabkan karena; pertama, tidak ada teori *a priori* yang dapat mencukupi kenyataan-kenyataan ganda yang mungkin akan dihadapi; kedua, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha untuk sejauh mungkin netral; dan ketiga, teori dari pemahaman yang mendasar dapat merespon nilai-nilai kontekstual.

5. Deskriptif

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

6. Lebih Mementingkan Proses Daripada Hasil

Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi "proses" daripada "hasil". Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

7. Adanya "Batas" Yang Ditentukan Oleh "Fokus"

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu; pertama, batas menentukan kenyataan

ganda yang kemudian mempertajam fokus; kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

#### 8. Desain Yang Bersifat Sementara

Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Jadi, tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. (Basrowi, et.al, hal.25-30, 2008)

Dari pembahasan tentang penelitian kualitatif diatas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan yang lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks tertentu yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Mengingat fokus utama yang akan diulas dalam penelitian ini adalah perebutan pengaruh dan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, maka berbagai data dan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian akan ditelaah secara mendasar dengan lebih menyeluruh.

### **III.2. Ruang Lingkup Penelitian**

#### **III.2.1. Batasan Objek Masalah**

Penetapan fokus dalam penelitian merupakan suatu bagian yang penting dalam sebuah penelitian, karena dengan pembatasan masalah dapat memberikan acuan bagi peneliti. Selain itu, dengan pembatasan masalah yang tajam, dapat membantu peneliti untuk dapat menemukan dan menentukan segala sesuatunya dengan tepat. Upaya ini bertujuan untuk memberikan arah paradigma pembahasan dalam penelitian yang lebih tajam dan mengena, agar hasil penelitian ini lebih bernilai objektif dan tajam. Untuk itu, ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya hegemoni yang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah.

Proses untuk memahami obyek penelitian akan dimulai dengan perkembangan dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upaya hegemoni baik Iran maupun Amerika Serikat di Kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah akan ditempatkan sebagai latar dari proses perebutan pengaruh dan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat. Upaya pembatasan obyek masalah ini dilakukan agar penelitian ini menjadi fokus dan tidak tercampur-baur dengan kompleksitas berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

### III.2.2. Karakteristik Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, hal. 157, 2006), sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Robert K. Yin (hal. 103, 2004) bahwa ada enam sumber bukti atau sumber data yang dapat diperoleh dari penelitian studi kasus. Keenam sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data dalam studi kasus adalah dokumen, rekaman, arsip, wawancara, observasi langsung atau observasi pemeran serta, dan perangkat fisik.

Dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan tema yang menjadi penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Dokumen administratif, Penelitian atau evaluasi resmi pada sebuah situs internet, dan Artikel-artikel yang muncul di media massa.

### III.3. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian kualitatif dikenal ada beberapa jenis model penelitian. Model-model tersebut diantaranya adalah studi kasus, etnografi, interaksionis simbolik, *grounded theory*, dll. Dalam konteks topik penelitian ini, maka model pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Furchan (hal. 448-465, 2004) Studi kasus adalah suatu penyelidikan yang intensif tentang individu ataupun unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Dalam model penelitian ini memungkinkan ditemukannya hal-hal

tak terduga kemudian dapat digunakan untuk membuat hipotesis. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu disuatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.

Adapun batasan-batasan dalam sebuah studi kasus meliputi; sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Sasaran-sasaran tersebut dikaji secara mendalam sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menahami berbagai kaitan yang ada di antara faktor-faktornya. Dengan studi kasus maka diharapkan peneliti dapat memahami secara mendalam tentang permasalahan yang ditelitinya.

Pemilihan studi kasus dalam penelitian ini karena model studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bermakna sebagai sebuah pendekatan mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar. (Yin, hal. 92, 2004). Jadi, model penelitian studi kasus ini memiliki manfaat untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dalam hubungan nyata, menggambarkan sebuah konteks kehidupan, evaluasi, dan eksploratif. Pemahaman yang demikian dari studi kasus membuat penggunaan model ini untuk cenderung menyoroti suatu kebijakan atau seperangkat kebijakan, bagaimana suatu kebijakan diterapkan, mengapa hal tersebut diambil, dan apa yang menjadi hasil dari kebijakan tersebut.

Pemahaman diatas berguna dalam penelitian ini untuk menyoroti kebijakan dari Iran dan Amerika Serikat di Timur Tengah, mengapa kebijakan tersebut diambil, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, lalu bagaimana hasil dan implikasi yang ditimbulkan dari kebijakan kedua negara dalam kasus perebutan hegemoni di Timur Tengah. Karakteristik dari studi kasus yang melihat suatu kejadian ataupun fenomena secara mendalam, ini tentunya sangat membantu dalam menganalisa permasalahan didalam penelitian ini. Dengan karakteristik tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat mengkaji secara mendalam masalah perebutan hegemoni di Kawasan Timur Tengah yang melibatkan banyak aspek sehingga ditemukan faktor-faktor penting yang menyebabkan terjadinya hal tersebut.

Adapun syarat seorang peneliti melakukan studi kasus adalah; peneliti memiliki informasi yang tidak sedikit tentang hal yang akan diteliti, fokus penelitiannya adalah fenomena yang sedang berlangsung, ada banyak sumber data. (Yin, hal. 15, 2004). Model studi kasus dalam penelitian ini memiliki peranan operasional sebagai suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan suatu kasus (*case*) yang terjadi di kawasan tertentu secara menyeluruh dan utuh dalam konteks secara natural.

#### III.4. Metode Pengumpulan Data

Data dapat dibedakan menjadi dua; pertama, data primer adalah data yang dikumpulkan dan dianalisis sendiri oleh peneliti; kedua, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh orang lain ataupun organisasi lain. (Fielding, et.al, hal.4-5, 2000). Menurut Finnegan (dalam Harison, hal. 146, 2007), sumber primer menyediakan materi dasar dan orisinil untuk bukti mentah bagi periset. Sumber sekunder, sebaliknya, adalah materi yang mendiskusikan periode yang dikaji tetapi ditulis setelah periode itu berlalu atau berjarak dari kejadian aktual. Sumber sekunder menyalin, menginterpretasikan, dan menilai materi yang terdapat dalam sumber primer. Jadi, perbedaan antara sumber primer dan sekunder tidak terletak pada "apa datanya" tetapi dalam hal "apa yang kita lakukan terhadap data itu".

Penelitian ini banyak menggunakan data yang bersifat sekunder. Peneliti tidak membuat dan menganalisis data primer dalam jumlah besar, karena terbatasnya waktu dan biaya untuk melakukan hal tersebut. Peneliti lebih banyak menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah memungkinkan peneliti untuk mempelajari tentang seseorang atau kejadian melalui pengalaman orang lain. Tegasnya, analisis kejadian politik masih bisa dilakukan walaupun peneliti tidak bertemu saksi hidup dari mereka yang mengalami peristiwa tersebut. Sebaliknya, sumber sekunder sering bersifat tidak langsung, walau ini tidak melemahkan kemampuan sumber itu untuk memberi informasi dan mencerahkan. (Harison, hal. 146, 2007).

Seperti telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa dokumen. Sifat dari dokumen yang digunakan dalam penelitian juga lebih kepada dokumen eksternal yakni dokumen-dokumen yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, buletin, jurnal, dan berita-berita di media massa. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk menelaah konteks dari masalah dan juga perkembangan dinamika politik kawasan Timur Tengah

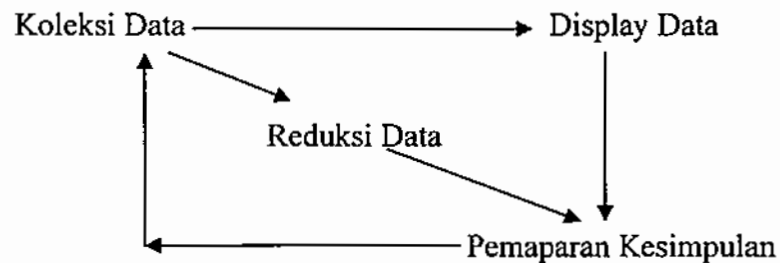
Dokumen dalam penelitian ini memainkan peran yang sangat penting dalam pengumpulan data. Penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang relevan akan dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini. Untuk mempertahankan objektivitas bahasan dari data yang didapat dalam penulisan ini, kehati-hatian dalam pengambilan dokumen, terutama terkait dengan tidak terlepasnya pengaruh intervensi orang atau organisasi atau aktor lain yang dengan sengaja merubah dokumen demi kepentingannya sehingga validitas dokumen tidak lagi dapat dipertahankan. Jadi, dalam pengambilan data juga diperlukan kehati-hatian untuk menghindari kemungkinan rusaknya orisinalitas data.

### **III.5. Analisis Data**

Dari data-data yang sudah terkumpul tersebut, selanjutnya dilakukan klasifikasi analisis berdasarkan kerangka pemikiran yang dipakai didalam penelitian ini. Klasifikasi analisis sesuai kerangka pemikiran penelitian ini akan diinterpretasikan dalam bentuk narasi dan deskripsi (*narrative descriptive*).

Secara prinsipnya analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi. Dengan demikian, proses analisis tidak kaku oleh batasan-batasan kronologis yang telah terjadi. Komponen-komponen analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang secara interaktif akan saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Karakter yang demikian menjadikan analisis data kualitatif disebut pula sebagai model interaktif, seperti tabel berikut ini: (Miles, et.al, hal. 20, 1992)

**Gambar. 1. Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model)**



Proses analisa data diatas mencakup tiga kegiatan yang bersamaan sehingga disebut interaktif. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup tiga kegiatan yang bersamaan yakni; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Secara lebih detail ketiga kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada tahap awal misalnya; melalui kerangka konseptual dan permasalahan. Selama proses pengumpulan data dilakukan membuat ringkasan, kodifikasi, dan menulis memo. Fungsi dari reduksi data ini adalah menajamkan, menggolongkan, dan mengorganisasikan data sehingga data dapat diinterpretasikan.

#### 2. Penyajian Data

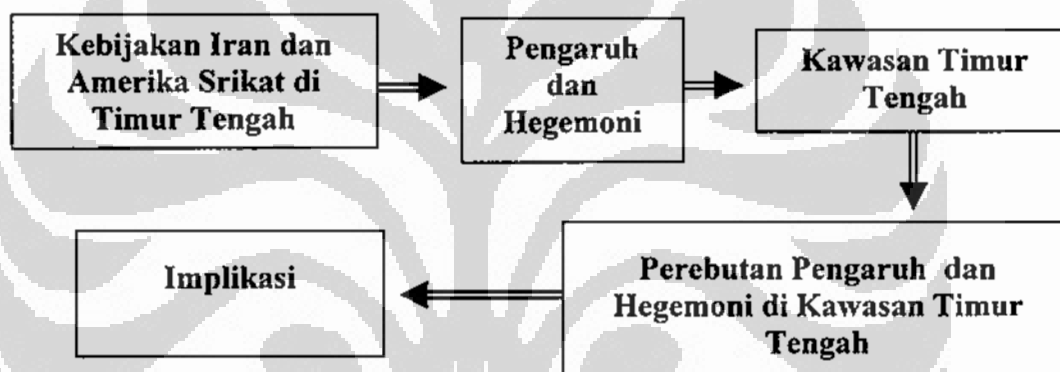
Sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data ini dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan dalam membaca dan juga menarik kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan penyajian data secara sistematis, hal ini berguna untuk memudahkan peneliti memahami antar bagian-bagiannya secara utuh dan tidak bersifat segmental maupun fragmental.

#### 3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi



Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data yang diperoleh diuji keabsahannya dan kesesuaiannya agar terjamin validitasnya. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan logika yang digunakan kemudian mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Setelah itu, peneliti melaporkan hasil penelitiannya. (Basrowi, et.al, hal. 209-210, 2008)

Terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, dan berdasarkan data-data yang peneliti miliki, maka tujuan dari analisis data kasus mampu menjawab bahasan yang terkonsep dalam pola sebagai berikut:



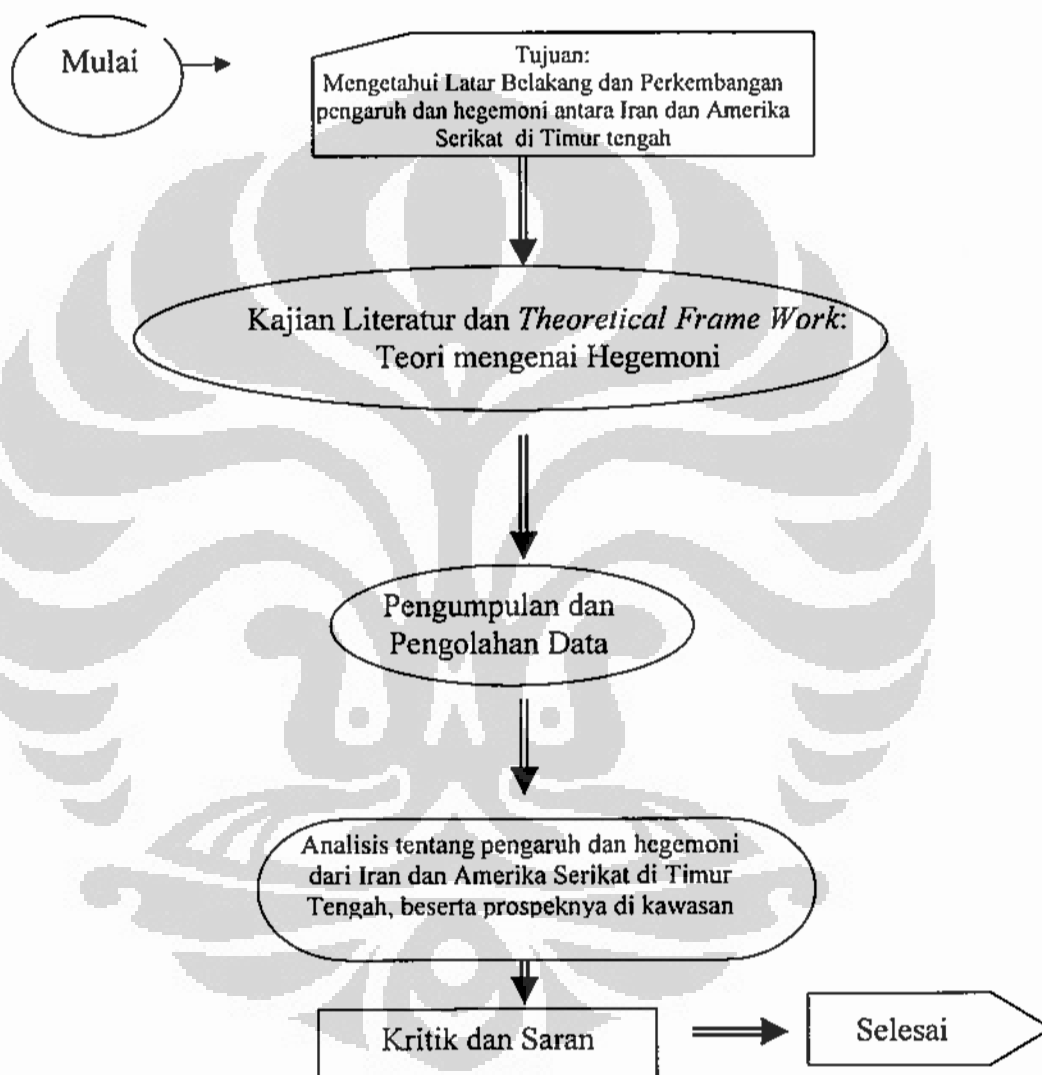
Pola tersebut dibangun atas dasar paradigma induktif. Alur induktif dalam pola diatas dapat menjadi bingkai analisis dalam menganalisa permasalahan perebutan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Tahapan-tahapan dalam alur penelitian ini dapat digambarkan dengan beberapa langkah berikut:

- a. Pengumpulan data: membeli dan mem-fotocopi buku-buku dan media, mengkliping berita-berita dan laporan jurnalistik, serta memprint-out data-data yang didapat dari situs internet.
- b. Penyeleksian dan pengorganisasian data dari hasil pengumpulan data, penulis melakukan penyeleksian dan pengelompokan berdasarkan pokok masalah tiap bab, lalu diolah secara sistematis, kemudian dirumuskan dengan

menggunakan pola pemantapan isi setiap data dan informasi yang telah diolah.

- c. Analisa dan penyajian data: analisa dan penyajian data dalam penulisan penelitian ini ditulis secara sistematis.

**Gambar 3.2. Flowchart Metodologi Penelitian**



## BAB IV

### PEREBUTAN PENGARUH DAN HEGEMONI DI KAWASAN TIMUR TENGAH

#### IV.1. Upaya Iran Dalam Menciptakan Pengaruh dan Hegemoni di Kawasan Timur Tengah

Iran merupakan negara yang menjadi salah satu *major power* di kawasan Timur Tengah. Nasir Tamara dalam bukunya yang berjudul “Revolusi Iran” pernah menyebut bahwa Iran memiliki tentara terkuat no.5 di dunia, khususnya pada dekade 1970-1780an. Lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa kekuatan udara Iran lebih hebat dari anggota NATO di Eropa (Tamara, hal. 84, 1980). Hal ini membuktikan bahwa Iran bukanlah “pemain baru” dalam peta kekuatan di kawasan Timur Tengah.

Menurut Gramsci ada tiga unsur yang perlu menjadi perhatian dalam menciptakan hegemoni yakni unsur ekonomi, politik, dan militer (Suseno, hal.185 2003). Ketiga unsur inilah yang harus diperhatikan dalam mengkategorikan tindakan sebuah negara yang mengarah pada penciptaan hegemoni. Berikut ini adalah kajian terkait dengan ketiga unsur tersebut dalam kebijakan Iran di kawasan Timur Tengah.

##### IV.1.1. Unsur Politik

Revolusi Islam di Iran mengubah arah politik luar negeri negara ini. Politik luar negeri yang sebelumnya cenderung kepada Amerika Serikat maka setelah revolusi berbalik menentang Amerika Serikat. Terdapat kebencian dalam diri rakyat Iran kepada Amerika Serikat, dimana pihak Amerika Serikat merupakan pendukung utama Rezim Shah yang telah digulingkan. Selain itu, rakyat Iran juga mendukung pergerakan perlawanan di Palestina sedangkan Amerika Serikat menjadi sponsor utama Negara Zionis Israel. Hal tersebut membuat hubungan diplomatik antara kedua negara terputus, menyusul terjadinya peristiwa penyanderaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran. Selain itu, Iran juga banyak melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat seperti Perancis, Inggris, dan

Kanada. Bahkan pemerintah Iran menganggap Kedutaan Besar Kanada membantu diplomat Amerika yang terkena dakwaan pada tahun 1980.

Dibawah Ayatullah Khomeini, politik luar negeri Iran secara yuridis-formal berlandaskan pada 7 prinsip, yaitu (1) menolak segala bentuk dominasi; (2) mempertahankan dan menjaga keutuhan wilayah; (3) mempertahankan hak-hak umat Islam; (4) nonblok atau sebagaimana semboyannya yang terkenal: *Laa Syarqiyyah Laa Gharbiyyah* (tidak timur tidak barat); (5) berdamai dengan Negara-negara yang tidak agresif; (6) menganggap kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan sebagai hak-hak universal; dan (7) menyokong setiap perjuangan kaum *Mustaz'afin* tapi menahan diri dari segala bentuk intervensi. (Sihbudi, hal.144, 1989)

Politik luar negeri Iran pada masa Imam Khomeini terkesan sangat Revolusioner. Revolusi Iran yang menghasilkan sikap “anti Barat” membuat para pengamat maupun media massa yang “pro Barat” membuat opini negatif terhadap Iran dengan mengaitkan Iran kepada terorisme, ekstrimisme, dan subversi. Hal tersebut didasari oleh sikap Iran yang terang-terangan mendukung apa yang oleh Teheran disebut sebagai para pejuang Islam di Libanon, Palestina, dan negara-negara Teluk Parsi, serta aliansi Iran dengan Libya dan Suriah. Dua negara yang sering disebut-sebut “mendalangi terorisme internasional”. (Sihbudi, hal.145, 1989)

Semboyan politik luar negeri Iran, *Laa Syarqiyyah Laa Gharbiyyah* yang berarti Tidak Timur dan Tidak Barat bukan menunjukkan kenetralan Iran dalam menghadapi tatanan dunia yang bipolar. Dalam kerangka konseptual Khomeini, semboyan atau katakanlah doktrin tersebut tidak sama dengan konsep netralitas gerakan Non-Blok yang tidak memihak baik ke Barat maupun ke Timur. Menurut sang Ayatullah, tidak ada di dunia ini negara Non-Blok. Disamping itu, kedua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, dianggap sebagai pemain tidak sah yang telah mendominasi (*tahmil*) sistem internasional. Karena itu, sistem internasional yang ada harus diubah menjadi tempat yang nyaman bagi negara-negara tertindas (Rais, hal. 32, 1990). Jadi semboyan atau doktrin tersebut tidak seperti halnya gerakan Non-Blok yang seakan menutup mata atas kondisi politik internasional saat itu. Tetapi semboyan tersebut

mewajibkan Iran untuk memerangi kedua Blok yang berkuasa untuk mendirikan sebuah sistem internasional yang adil.

Selama satu dekade dibawah Khomeini, politik luar negeri Iran seakan-akan menampilkan wajah “garang”. Tapi, kegarangan itu sebenarnya lebih merupakan reaksi daripada aksi. Perang dengan Iraq yang berlangsung 8 tahun (22 September 1980-20 Agustus 1988) misalnya tidak akan terjadi seandainya Baghdad tidak membatalkan secara sepihak perjanjian Algier 1975, atau jika pihak internasional berusaha bersikap adil terhadap konflik Iran-Iraq. Begitu pula penyanderaan 50 diplomat Amerika Serikat di Teheran (November 1979- Januari 1981), tidak akan terjadi jika Amerika Serikat tidak menerima mendiang bekas Shah Iran secara demonstratif. Dan, ketegangan Iran dan Eropa Barat pun tidak perlu terjadi seandainya Eropa Barat tidak melancarkan pembelaan berlebih-lebihan pada Salman Rushdie (Sihbudi, hal. 156,1989). Politik luar negeri Iran tersebut hanya merupakan reaksi dari apa yang dihadapi Iran.

Khomeini sendiri merupakan seorang yang sangat memegang teguh pendiriannya dan berupaya untuk membuat Bangsa Iran menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Hal tersebut dapat terlihat dari perkataannya “ Apakah Bangsa Iran akan tetap membiarkan dirinya terus diinjak-injak oleh Amerika Serikat, hanya karena kami ini bangsa yang lemah dan tidak punya dollar?” kemudian ketika meledak kasus ayat-ayat setan, Khomeini menegaskan “Apakah demi menjaga hubungan baik dengan Eropa Barat, kita harus membiarkan orang seenaknya menghina Islam? Sama sekali tidak” .(Sihbudi, hal.142, 1989). Dari pernyataan tersebut terlihat kuatnya komitmen Khomeini terhadap Islam yang merupakan landasan ideologi dari negaranya. Dan ia menyerukan kepada Bangsa Iran untuk tidak mengorbankan keyakinan bangsanya (Islam) tersebut hanya karena demi menjaga hubungan baik dengan negara-negara barat agar mendapatkan bantuan ekonomi.

Setelah meninggalnya Imam Khomeini tahun 1989, pimpinan tertinggi Iran pun diwariskan kepada Ayatullah Ali Khameni. Sedangkan kursi presiden saat itu dipegang oleh Rafsanjani. Kedua orang ini memiliki visi politik yang lebih moderat, namun keduanya memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga revolusi Islam. Pada

masa ini terjadi “pelunakan” terhadap politik luar negeri Iran. Politik luar negerinya lebih mengarah kepada perbaikan ekonomi, yang menyebabkan para pengambil keputusan pada waktu itu akhirnya melunak. Tidak ada lagi seruan untuk “ekspor revolusi”, dan lagi masalah Libanon juga sudah cenderung mereda.

Rafsanjani sendiri merupakan tokoh dari kalangan reformis yang terlihat lebih moderat. Munculnya kaum reformis ini dipicu oleh keadaan ekonomi Iran pasca Perang Teluk I. Ditambah lagi dengan adanya embargo ekonomi dan tingkat inflasi yang tinggi membuat para pengambil keputusan harus berpikir ekstra keras untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya.

Setelah habisnya masa Pemerintahan Rafsanjani, maka terpilihlah Muhammad Khatami sebagai Presiden Iran tahun 1997. Khatami sendiri juga berasal dari tokoh Reformis yang dikenal lebih moderat. Kebijakan luar negeri Iran pada masa pemerintahannya hampir sama dengan apa yang terjadi pada masa Rafsanjani. Kebijakan politik luar negeri Iran pada masa pemerintahannya lebih pragmatis. Khatami adalah presiden Iran pertama pasca Revolusi Islam yang melakukan kunjungan ke negara-negara Barat seperti Italia dan Perancis pada bulan Maret 1999. Khatami berusaha memperbaiki hubungan Iran dengan negara-negara Eropa. Dampak dari upaya Khatami tersebut adalah kesediaan negara Uni Eropa untuk menjalin hubungan langsung dengan Iran sebagai mitra dalam pergaulan internasional.

Namun untuk hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel, Khatami belum bisa memperbaikinya karena terkait masalah Palestina. Iran mempunyai komitmen yang kuat dalam mendukung perjuangan Palestina. Selain itu, antara Iran dan Amerika Serikat juga masih terganjal masalah penanggulangan terorisme. Iran menginginkan agar perang melawan terorisme berada dibawah komando PBB, sedangkan Amerika Serikat lebih mengambil sikap sepihak dalam memerangi terorisme, hal tersebut dapat dilihat pada invasi Amerika Serikat ke Iraq tahun 2003 yang tanpa restu dari PBB.

Pada tahun 2005, Mahmoud Ahmadinejad terpilih sebagai presiden Republik Islam Iran menggantikan Khatami. Ahmadinejad dikenal sebagai tokoh ultra-konservatif. Pandangan Ahmadinejad sangat keras terhadap Israel dan Amerika

Serikat. Ahmadinejad juga kerap memberi pernyataan yang membuat Israel dan Amerika Serikat menjadi "gerah".

Ahmadinejad berkeras bahwa Iran berhak untuk mengembangkan teknologi nuklir layaknya Eropa menernakan reaktor. "Jika nuklir ini dinilai jelek dan kami tidak boleh memilikinya, mengapa kalian sebagai adikuasa memilikinya?" Sebaliknya, "Jika teknonuklir ini baik bagi kalian, mengapa kami tidak boleh juga memakainya?" Dia juga menyebut Amerika sebagai "preman" yang tak lama lagi bakal tumbang, layaknya air mancur. Dia juga meminta orang sedunia bersatu padu menggulingkan rezim zionis di Tel Aviv, Israel. (Labib, et al, hal.5, 2006).

Presiden Ahmadinejad kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras kepada Israel dan Amerika, hal tersebut juga kerap memancing reaksi keras dari kedua negara tersebut. Terkadang bukan hanya Amerika Serikat dan Israel saja yang "gerah" oleh pernyataan Ahmadinejad, tetapi Eropa juga ikut mengecam Ahmadinejad. Seperti terkait pernyataan Ahmadinejad seputar kebohongan cerita *Holocaust*.

Sikap Ahmadinejad ini tidak selamanya dianggap negatif, negara-negara lain kerap menganggap Ahmadinejad sebagai simbol perlawanan terhadap Amerika Serikat. Ahmadinejad juga memiliki hubungan baik dengan negara seperti Venezuela dibawah pimpinan Hugo Chavez yang juga anti Amerika. Sekalipun Ahmadinejad memiliki pandangan keras seperti mendiang Ayatullah Khomeini, namun negara-negara tetangganya juga tidak semuanya menaruh curiga terhadap Iran seperti pada masa Khomeini.

#### **IV.1.1.1. Aliansi Iran-Syria**

Hubungan antara Iran dan Syria merupakan suatu hal yang cukup unik ditengah dinamika perkembangan aliansi yang terjadi di Kawasan Timur Tengah. Hubungan antara Iran dan Syria berawal pada tahun 1980 pasca revolusi Islam yang terjadi di Iran. Yang menarik adalah perbedaan ideologi diantara kedua negara. Iran adalah suatu negara yang pada saat itu memiliki pandangan revolusioner Pan-Islamisme yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam ternyata dapat memiliki hubungan dengan negara sekuler yang berorientasi pada Pan-Arabisme yang sosialis.

Ternyata, kedua negara yang memiliki pandangan berbeda tersebut mampu menumbuhkan rasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Selain ideologi, kedua negara juga tidak terpengaruh dengan aliansi-aliansi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh adalah hubungan kedua negara dengan Uni Soviet. Iran memiliki hubungan yang buruk dengan Uni Soviet selama beberapa dekade, dan hubungan yang buruk ini kemudian berlanjut setelah revolusi Islam yang dipimpin oleh Khomeini. Iran menjuluki Uni Soviet dengan sebutan "Setan Merah". Sementara itu, Syria merupakan sebuah negara yang menerima bantuan militer dari Uni Soviet. Selain itu, perbedaan ras juga menjadi suatu pembeda dari kedua negara tersebut. Iran merupakan bangsa non Arab, yakni Persia, sementara Syria merupakan bangsa Arab. Ditengah berbagai perbedaan tersebut, kedua negara ini terbukti dapat memiliki hubungan yang langgeng selama lebih dari dua dekade belakangan ini.

Hubungan antara kedua negara juga tidak terlepas dari berbagai peristiwa dan kondisi politik kawasan. Kekalahan pada perang enam hari tahun 1967 telah membuat berkurangnya kesadaran akan pentingnya ideologi dan struktur kekuasaan dalam format aliansi, hal ini membentuk sikap lebih pragmatis dalam menghadapi musuh bersama (Goodarzi, hal.2, 2006). Hal inilah yang akhirnya mendorong Syria untuk bersikap pragmatis dalam menerima Iran yang mengusung Pan-Islamisme sebagai ideologinya. Sementara itu, Mesir yang melakukan perjanjian damai dengan Israel tahun 1979 di Washington, menimbulkan kekecewaan bagi dunia Arab dan Syria khususnya. Pengakuan Mesir kepada Israel, membuat Syria semakin merasa terkucil. Perjanjian ini menandakan berkurangnya satu negara aliansi Syria dalam upayanya menghadapi Israel.

Hubungan antara Syria dan Iraq ternyata juga tidak berlangsung baik, kedua negara gagal menyepakati perjanjian terkait ekspor minyak Iraq melalui pipa yang melewati Syria. Kegagalan dari kesepakatan ini membuat Iraq menghentikan penggunaan pipa *via* Syria. Hal ini membuat Syria kehilangan keuntungan finansial serta pengaruh di kawasan. Selain itu, pada tahun 1979 Iraq menuduh Syria terlibat dalam upaya kudeta terhadap Rezim Ba'ath di Baghdad. Hal ini membuat Presiden



Asad memiliki pengalaman yang cukup pahit terhadap negara-negara yang selama ini menjadi aliansinya. Kondisi demikian tentunya membuat Syria harus merevisi beberapa kebijakan ataupun pandangan politik luar negerinya dengan menerima Iran sebagai negara sahabat. Aliansi Syria-Iraq menjadi sulit tercipta karena adanya rasa saling curiga antara satu dengan lainnya.

Kondisi kawasan yang seperti ini membuat posisi Syria semakin sulit. Satu sisi, Syria berupaya untuk terus mengimbangi Israel, dan disisi lain ia juga harus waspada dengan Rezim Saddam. Disaat seperti inilah muncul pergantian kekuasaan di Iran. Sebuah pemerintahan anti zionis berhasil memenangkan pertarungan dan berkuasa di Teheran. Dengan munculnya Republik Islam Iran maka muncul pula harapan baru bagi Syria dalam pertarungan politik kawasan, dimana Iran dapat dijadikan aliansi dalam menghadapi Israel dan Iraq.

Melihat sikap politik Iran yang baru dan terbuangnya Mesir dari Dunia Arab, membuat Pemerintah Syria berfikir bahwa kehilangan Mesir ke pihak Israel dapat tergantikan dengan membangun aliansi dengan Iran. Sebagaimana yang mereka lihat, memelihara persahabatan antara Arab dan Iran dapat memperkuat posisi Arab. Walaupun tanpa Mesir, kehadiran aliansi non Arab yang kuat seperti Iran dapat meningkatkan kemampuan Negara Arab dalam mengikis kekuatan Israel di kawasan. Selain itu, kehilangan Iran merupakan kemunduran yang buruk bagi Barat dan Israel (Goodarzi, hal.21, 2006).

Keputusan Iran untuk menggalang kerjasama dengan Syria ternyata memberikan manfaat bagi Iran. Dampak positif dari hubungan Iran dan Syria pada masa-masa awal aliansi ini dibentuk adalah pada saat terjadi Perang Teluk I antara Iran-Iraq. Dalam perang ini, Syria sedikit banyak telah membantu Iran dalam menghadapi Iraq beserta sekutu Arab dan Barat saat itu.

Bantuan Syria pada awal terjadinya perang Teluk I adalah berupa senjata, bantuan medis, dan ahli ordonansi serta ahli fisika. Persenjataan yang diberikan oleh Syria terdiri dari missile dari darat ke udara type SAM -7, missile anti Tank type Sagger, dan roket RPG-7 anti Tank (Goodarzi, hal.33, 2006). Selain itu, Syria juga

memberikan izin bagi pesawat-pesawat tempur Iran untuk melintasi wilayah udaranya.

Poros Iran-Syria tampak menuai keberhasilan di Lebanon. Kedua negara sama-sama berhasil menancapkan pengaruhnya di negara ini dalam upaya menghalau pengaruh Israel. Pada awalnya kedua negara sama-sama mendukung gerakan Amal Syiah, namun kemudian gerakan ini terpecah menjadi dua kelompok. Syria mendukung gerakan Amal yang didukung oleh Nabih Berri. Berri lebih berorientasi kepada pluralitas dan loyalitas pada Negara Lebanon. Sementara Iran mendukung gerakan Amal Islam yang dipimpin oleh Hussein Musawi yang tidak setuju dengan struktur politik di Lebanon, dan menghendaki sistem *Wilayat Al Fakih* seperti di Iran. Perbedaan ini, menimbulkan kesulitan bagi kedua negara dalam menyatukan visi dalam menciptakan kestabilan di Lebanon.

Aliansi Iran dan Syria tentunya tidak bisa dianggap remeh. Bagaimanapun aliansi ini telah berhasil menghalau pengaruh Israel di Lebanon. Selain itu, bertahannya Iran dari perang selama 8 tahun dengan Iraq, sedikit banyak juga merupakan hasil positif dari aliansi ini. Namun, tidak semua agenda dari aliansi ini membuahkan hasil. Aliansi ini belum mampu untuk memberikan perubahan di Iraq yang pada saat itu masih dibawah Rezim Saddam Hussein. Saddam Hussein di Iraq dianggap sebagai ancaman bagi Iran dan Syria, masalah Iraq merupakan salah satu isu yang dibahas pada saat aliansi antara Iran dan Syria mulai dibentuk pada tahun 1980. (Goodarzi, hal. 18, 2006)

Berakhirnya masa perang dingin dan meredanya situasi politik di Timur Tengah pada tahun 1990an, banyak kalangan yang menilai akan berakhirnya aliansi Iran dan Syria. Pada dekade tersebut memang kedua negara tidak melakukan konsultasi secara rutin seperti sebelumnya. Tidak juga terdapat agenda bersama terkait dengan keamanan kawasan. Masalah agresifitas Saddam Hussein masih menjadi kekhawatiran bersama antara kedua negara, mengingat masih berkuasanya Saddam di Iraq.

Kondisi Kawasan Timur Tengah kembali memanas pasca berbagai peristiwa pada awal milenium ini. Pasca tragedi 9/11, Amerika Serikat memasukan Iran dan

Syria dalam *list Axis of Evil*. Amerika Serikat juga semakin memperkeruh suasana dengan menginvasi Afghanistan dan Iraq. Hadirnya pasukan Amerika Serikat di Afghanistan dan Iraq menjadi kekhawatiran bagi aliansi Iran dan Syria. Akhirnya, aliansi ini tampak kembali memiliki pijakan untuk kembali berkolaborasi dalam menghadapi tantangan yang ada.

Iran tentunya merasa khawatir dengan hadirnya pasukan Amerika Serikat di Iraq dan Afghanistan, karena kedua negara merupakan tetangga dari Iran. Selain itu, keberadaan pasukan pendudukan di kedua negara ini tentunya menambah kekuatan Amerika Serikat khususnya di kawasan Teluk Persia, dimana di kawasan teluk tersebut Amerika menempatkan Armada V yang terdiri dari 1 kapal induk, 14 kapal perang, dan 2 kapal selam bertenaga nuklir. Sementara itu, Syria juga merasa khawatir dengan semakin kuatnya Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel. Hal ini tentunya semakin menyulitkan Syria untuk mendapatkan wilayah Golan yang diduduki Israel. Bayang-bayang agresi dari Amerika Serikat membuat aliansi Iran-Syria kembali menemukan konteksnya, kedua negara juga kembali membangun hubungan.

Upaya hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah membuat aliansi Iran dan Syria kembali terjalin. Pada bulan Juli tahun 2004, presiden Syria Bashar Assad melakukan kunjungan ke Teheran setelah diangkat menjadi presiden Syria pada tahun 2000. Lalu, Muhammad Khatami membalas kunjungan Assad tiga bulan kemudian. Kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dan kondisi Iraq menjadi agenda utama dalam pembicaraan bilateral kedua negara. Kemudian, pada saat mengunjungi Iran pada Februari 2005, pejabat tinggi Syria Mohammed Naji Al-Utri menyatakan bahwa kedua negara (Iran dan Syria) akan bersatu melawan semua tantangan yang dihadapi oleh kawasan (Goodarzi, hal.293, 2006).

Keprihatinan kedua negara akan hegemoni AS di Timur Tengah mulai tampak nyata. Pada tahun 2003 Syria terkena sanksi ekonomi dan tahun 2005 Syria dipaksa mundur dari Lebanon karena dituduh berada dibelakang pembunuhan Rafiq Hariri yang merupakan tokoh yang menentang keberadaan Syria di Lebanon. Sementara itu,

Amerika Serikat juga semakin menekan Iran karena dituding mengembangkan senjata nuklir. Hal-hal inilah yang menjadi tantangan bagi aliansi ini kedepan.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa aliansi antara Iran dan Syria secara umum terbentuk berdasarkan dua hal. Yakni, kondisi politik kawasan dan upaya hegemoni baik dari Amerika Serikat dan Israel. Aliansi ini berpijak akan dua hal tersebut. Kesamaan persepsi antara Iran dan Syria dalam melihat realitas politik kawasan membuat aliansi ini dapat terus bertahan. Perbedaan ideologi ternyata juga tidak menjadi permasalahan karena adanya persamaan persepsi ini. Kemudian, sikap saling menghormati dan komitmen dan kerjasama antar kedua negara membuat aliansi ini tetap berlanjut.

Revolusi Islam Iran yang selama ini banyak digambarkan dengan pencitraan negatif ternyata tidak berlaku demikian pada kenyataannya. Iran terbukti tidak ingin menggulingkan Rezim Assad yang sekuler dan otoriter tersebut. Ini membuktikan bahwa Iran bukanlah negara agresor seperti AS dan sekutunya. Dengan Islam sebagai dasar negara yang membawa kebijakan luar negeri anti imperialisme, Iran juga terbukti mampu bertahan dari berbagai tantangan, dan juga mampu meraih simpati dari berbagai negara seperti Syria, Sudan, Libya, dll. Dan juga berbagai kelompok di negara-negara lain seperti Hizbullah, Polisario, Hamas, dll. Iran menjadi simbol dari perlawanan melawan segala bentuk imperialisme. Hal ini bukan hanya berlaku di kawasan Timur Tengah, namun dibelahan dunia lainnya seperti Amerika Latin juga melihat Iran sebagai simbol perlawanan, hal ini telah ditunjukkan oleh Venezuela yang memiliki hubungan dekat dengan Iran.

#### **IV.1.1.2. Peranan Iran di Lebanon**

Masuknya Iran di Lebanon berawal pada tahun 1982 pada saat Israel berupaya untuk menduduki Lebanon Selatan. Masalah ini menjadi kebijakan utama politik luar negeri dari Iran pada saat itu disamping masalah perang dengan Iraq. Pada saat itu, Iran mengirimkan senjata dan amunisi kepada kelompok Syiah yang berada di Lebanon. Selain itu, Iran juga mengirimkan 300 orang Garda Revolusi untuk melatih kaum Syiah Lebanon dikawasan Baalbek. Pemerintah Iran juga mengirimkan dana sebesar 500 juta dollar AS kepada kaum Syiah di Lebanon untuk mempersenjatai

kelompok Syiah serta membangun rumah sakit dan sekolah (Rahman, hal. 147-148, 2003). Ini adalah awal kedekatan Iran dengan kelompok Syiah di Lebanon.

Iran mendukung gerakan Hizbullah yang merupakan pecahan dari Amal Syiah sebelumnya. Perpecahan ini karena adanya perbedaan pandangan antar dua kelompok. Satu sisi, Hizbullah yang dipimpin oleh Hussein Musawi berpandangan bahwa struktur politik Lebanon pada saat itu cacat, konsep *Wilayat Al Fakihi* seperti di Iran harus juga diterapkan oleh Lebanon. Di sisi lain, kelompok Amal yang dipimpin oleh Nabih Berri menganggap bahwa nilai-nilai pluralitas harus dijunjung tinggi.

Persamaan pandangan antara Iran dan Hizbullah ini membuat hubungan keduanya semakin harmonis. Salah satu butir piagam dalam pembentukan Hizbullah berbunyi "Kami adalah kader-kader umat Hizbullah, dimana Allah SWT telah memberi anugrah kemenangan pertama di Iran. Kami komitmen menaati perintah pimpinan adil yang telah diwakili oleh Wali *Al Fakihi*." (Rahman, Kompas, Sabtu, 18 April 2009). Ini merupakan bukti dimana Iran ternyata mampu menjadi inspirasi bagi umat Islam Syiah di luar Iran. Bukan hanya itu, hal ini juga memiliki makna bahwa Iran berhasil menancapkan pengaruhnya di Lebanon.

Selain itu, Iran juga semakin memperkuat pengaruhnya dengan mengirimkan Garda Revolusi ke Lembah Bekaa. Selain melatih para milisi, Iran juga memberikan doktrinasi kepada warga Syiah disana. Iran menempatkan 1500 orang garda Revolusi di Lembah Bekaa. Pasukan Iran ini bekerjasama dengan kelompok setempat seperti Hizbullah. Untuk melakukan doktrinasi, Iran juga mengirimkan ulama ke Lembah Bekaa (Goodarzi, hal. 77, 2006).

Pada tahun 1984 hingga 1985, kelompok-kelompok Islam Lebanon atas dorongan Iran meningkatkan perlawanan atas Israel. Akibatnya, Israel mengambil keputusan untuk menarik mundur pasukannya dari Lebanon Selatan pada April 1985. Setelah penarikan pasukan Israel itu, Ketua Lembaga Syuhada Hujjatul Islam Mahdi Karubi dan Direktur Lembaga Dakwah Islam Ayatullah Ahmad Jannati mengunjungi wilayah Lebanon Selatan. Pemerintah Iran pun segera mengirimkan bantuan dana

untuk pembangunan kembali desa-desa Syiah di Lebanon Selatan. (Rahman, hal. 149, 2003).

Beberapa kali Iran dituduh menjadi dalang dalam berbagai pemboman di Lebanon. Pada 18 April 1983, sebuah truk berisi bahan peledak berhasil menghancurkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut yang menewaskan 63 orang. Korban tewas diantaranya adalah Robert Clayton Ames yang merupakan pejabat CIA. Kelompok Jihad Islam mengaku bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Komunitas diplomatik di Beirut dan negara-negara Barat menilai peristiwa tersebut dilakukan oleh kelompok radikal Syiah pro-Iran yang didukung oleh pemerintah Syria dan Iran. Teheran sesegera mungkin menyangkal keterlibatannya atas peristiwa tersebut. (Goodarzi, hal.89, 2006). Pada 23 Oktober 1983, kembali terjadi aksi bom bunuh diri, kali ini targetnya adalah pangkalan militer Amerika Serikat. Truk berisikan bahan peledak menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Beirut dan menewaskan 241 personel militer Amerika Serikat. Selang beberapa menit setelah ledakan tersebut, markas pasukan Perancis juga diserang dengan cara yang sama. 57 orang penerjun Perancis tewas dalam aksi ini. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Caspar Weinberger melihat beberapa bukti yang mengindikasikan Iran berada dibelakang aksi tersebut. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mengatakan "Menurut saya, dari bukti yang saya dapat sudah cukup membuktikan bahwa kegemparan terakhir ini melibatkan teroris dukungan Iran dan mereka difasilitasi serta dibekali amunisi oleh Syria" (Goodarzi, hal.93-94, 2006). Iran dan Syria segera menyangkal tudingan Reagan tersebut. Dengan mengatakan bahwa penyerangan tersebut merupakan sebuah tindakan kebencian rakyat Lebanon terhadap Amerika Serikat dan Perancis.

Semakin kuatnya pengaruh Iran di Lebanon ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi berbagai pihak. Hubungan antara Iran dan Lebanon juga sempat terputus karena Iran dinilai bertindak berlebihan dengan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah Lebanon. Pemerintah Lebanon menilai Iran berupaya untuk membentuk "negara" dalam negara. Duta Besar Iran untuk Lebanon, Hujjatul Islam Ruhanee, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan semakin kuatnya

pengaruh Iran di Lebanon karena lemahnya pemerintah pusat negara tersebut (Rahman, hal. 149, 2003).

Walaupun hubungan Diplomatik Iran dan Lebanon terputus, Iran tetap berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya di Lebanon. Namun, Iran membatasi gerakan Garda Revolusi ini agar tidak tercium oleh Pemerintah Lebanon. Iran juga meminta semua gerakan yang berafiliasi kepada Teheran menyesuaikan aksinya dengan kepentingan Teheran. Dalam hal ini Iran terlihat mulai berupaya untuk menunjukkan sikap yang kooperatif dengan tujuan mendapatkan simpati dan juga meredakan ketegangan yang terjadi Lebanon.

Munculnya Rafsanjani sebagai presiden Iran menimbulkan pergeseran dalam politik luar negeri Iran. Rafsanjani yang merupakan kelompok moderat, mulai meninggalkan slogan Imam Khomeini yakni "ekspor revolusi". Rafsanjani mengganti tokoh-tokoh radikal Iran yang sebelumnya punya pengaruh kuat di Lebanon seperti Ali Akbar Muhtashemi yang dicopot dari jabatan Menteri Dalam Negeri. Pada masa kepemimpinan Rafsanjani, bantuan militer dan keuangan kepada Hizbullah dan kelompok Syiah lainnya menurun. Tahun 1991 Menteri Luar Negeri Lebanon Farez Boues untuk pertama kalinya mengunjungi Teheran yang merupakan isyarat pengakuan Iran atas pemerintahan Lebanon. Kemoderatan Rafsanjani bukan berarti terhentinya dukungan Iran terhadap gerakan Islam di seluruh dunia. Teheran saat itu menjadi basis sekitar 25 organisasi Islam. Pemerintah Iran juga masih melatih aktivis Hizbullah, menyebarkan propaganda revolusi dan menyuplai dana untuk faksi Islam, khususnya di Lebanon dan Iraq, walaupun tidak sebesar sebelumnya (Rahman, hal. 151, 2003).

Walaupun Iran mulai membatasi dana untuk Hizbullah, tetapi tampaknya Hizbullah telah mampu untuk berdikari. Kondisi ini tidaklah mempengaruhi perjuangan Hizbullah melawan Israel, terbukti Hizbullah masih sangat intens dalam melakukan serangan-serangan kepada Israel. Pada tahun 1992 terjadi 63 serangan Hizbullah kepada target-target Israel, dan meningkat menjadi 344 serangan pada tahun 1995. (Alexander, et al, hal. 65-66, 2008). Hal ini menunjukkan kemampuan

Hizbullah untuk tetap konsisten melakukan perlawanan terhadap Israel walaupun bantuan yang diterima menurun jumlahnya.

Hizbullah bukan hanya sekedar organisasi politik dan militer saja. Hizbullah banyak melakukan pembangunan-pembangunan berbagai infrastruktur khususnya di daerah yang berpopulasi Islam Syiah. Hizbullah juga banyak membangun institusi-institusi sosial seperti rumah sakit dan sekolah. Selain itu, Hizbullah juga memiliki jaringan radio dan televisi sendiri. Jaringan radio mereka adalah Radio Nur dan jaringan televisinya adalah Al Manar. Jaringan media komunikasi ini digunakan sebagai alat propaganda dan televisi ini juga kerap menayangkan pidato-pidato pemimpin Hizbullah Syekh Hassan Nasrallah.

Iran yang banyak membantu organisasi-organisasi Islam tampaknya memberikan perhatian khusus pada Hizbullah di Lebanon. Hal ini mengingat adanya persamaan persepsi mengenai konsep *Wilayat Al Faqih* dan juga posisi Lebanon yang cukup strategis. Iran memiliki sebuah lembaga khusus bernama Divisi Al-Quds yang merupakan sayap urusan luar negeri dari Garda Revolusi. Divisi ini adalah perancang dan penanggungjawab dari pengembangan pengaruh Iran di luar negeri. Hizbullah merupakan cabang istimewa dari Divisi Al-Quds. Hizbullah sering melakukan tugas-tugas khusus dari Divisi Al-Quds. Divisi ini dipimpin oleh Jenderal Qasim Sulaimani yang bertanggung jawab langsung kepada Ayatullah Ali Khamenei. Divisi ini mendapat anggaran 2 miliar dollar AS per tahun dari Ali Khamenei. (Musthafa Abd. Rahman, Kompas, Sabtu, 18 April 2009)

Pada tahun 2006, konflik kembali terjadi di Selatan Lebanon. Hal ini dipicu oleh aksi dari Hizbullah yang menculik dua tentara Israel yang sedang berpatroli. Tindakan Hizbullah ini sebetulnya adalah sebuah reaksi dari berbagai penangkapan aktivis-aktivis Islam oleh Israel. Hal inilah yang membuat Israel melancarkan serangannya ke Selatan Lebanon dengan dalih untuk membebaskan dua orang tentaranya yang disandera oleh Hizbullah. Di lain tempat, Israel juga harus berhadapan dengan HAMAS (*Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyya*) di Palestina. Konflik antara Israel dan HAMAS juga karena penculikan seorang tentara Israel



Ghillad Shalid oleh HAMAS. Pada saat itu Israel berperang dalam dua front sekaligus, front Utara dengan Hizbullah dan front Selatan dengan HAMAS.

Terkait dengan konflik ini, disinyalir Iran memberikan bantuan persenjataan kepada Hizbullah. Menurut tentara Israel, C802 milik Iran yakni rudal yang dinavigasikan melalui radar menghantam kapal perang Israel pada minggu pertama berjalannya perang, dan rudal tersebut diluncurkan oleh anggota Garda Revolusi di Lebanon. Iran juga melatih lebih dari 3000 orang pejuang Hizbullah sejak tahun 2004. Sementara Garda Revolusi yang berada di Lebanon berjumlah lebih dari 250 orang yang bertugas untuk melatih dan membantu Hizbullah (Yaloon, 2007, hal.17).

Pada perang tahun 2006, Hizbullah tampak cukup mampu untuk menghadapi pasukan Israel. Intelijen Israel memperkirakan jumlah pejuang Hizbullah yang terlibat dalam perang tersebut mencapai 2000 hingga 4000 orang. Senjata Hizbullah terbukti cukup efektif melawan peralatan militer Israel yang dibangun dengan teknologi canggih seperti Tank Merkava Mark IV yang merupakan Tank utama Israel. Rudal anti-Tank yang digunakan Hizbullah disinyalir mirip seperti roket Russia dan Iran, yang navigasinya dipandu dengan laser dan memiliki jangkauan lebih dari dua kilometer. Menurut komandan kompi Tank Israel, Hizbullah merusak dan menghancurkan 20 persen unit Tank Merkava dengan rudal anti-Tank. Diduga sejumlah anggota angkatan udara Iran berulang kali mengunjungi Lebanon untuk melatih Hizbullah dalam menggunakan rudal buatan Iran seperti Fajr-3 dan Fajr-5. Namun, Intelijen Amerika Serikat meyakini bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan aktifitas anggota angkatan udara Iran di Lebanon terkait dengan aktifitas Hizbullah (Alexander, et al, hal. 81, 2008).

Dalam perang kali ini, Israel tampak cukup kewalahan dalam menghadapi perlawanan dari pejuang Hizbullah. Dalam upayanya mempertahankan Lebanon Selatan, Hizbullah kerap meluncurkan ratusan rudal Katyusha ke Wilayah Utara Israel. Rudal-rudal Hizbullah ini membuat Israel menderita kerugian yang cukup besar dan juga menimbulkan dampak psikologis bagi Israel. Akhirnya setelah satu bulan lebih perang berkecamuk, maka muncul resolusi dewan keamanan PBB 1701 yang mengakhiri perang tersebut. Pada tanggal 3 Desember 2006, seluruh pasukan

Israel ditarik mundur dari Lebanon Selatan. Penarikan mundur Israel ini menandakan kemenangan bagi Hizbullah yang mampu menahan dan bahkan memaksa Israel mengurungkan niatnya untuk kembali menduduki Selatan Lebanon. Kemenangan ini juga merupakan suatu keuntungan bagi Iran yang juga memiliki kesamaan kepentingan dengan Hizbullah. Peristiwa ini membuat posisi Hizbullah semakin kuat bukan hanya di Lebanon tetapi juga di kawasan. Semangat juang Hizbullah menunjukkan pada dunia bahwa semangat Islam yang dimiliki Hizbullah terbukti tidak terkalahkan dengan berbagai peralatan militer yang canggih sekalipun.

#### **IV.1.1.3. Peranan Iran di Palestina**

Sejak kemenangan Revolusi Islam di Iran, negara ini secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam menuntut hak-haknya yang direbut Israel. Suatu bentuk dukungan Republik Islam Iran terhadap Palestina adalah dengan mengganti Kedutaan Besar Israel menjadi kedutaan besar Palestina. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap negara Palestina. Hal tersebut disambut positif oleh organisasi perjuangan Palestina yang waktu itu masih dibawah payung PLO dibawah kepemimpinan Yasseer Arafat.

Hubungan baik antara Teheran dan PLO tidak berlangsung lama. Terjadinya perang Iran-Iraq menjadi sebuah persoalan dalam pembangunan hubungan keduanya kedepan. PLO yang lebih mengedepankan ideologi Pan-Arab, bersikap mendukung Iraq yang merupakan Bangsa Arab. Tindakan PLO sendiri ditempuh karena secara ekonomi PLO memiliki ketergantungan dengan negara-negara Arab. Walaupun kecewa dengan sikap PLO tersebut namun Teheran selalu berupaya untuk menengahi konflik yang terjadi antara Palestina dengan milisi Syiah di Lebanon. Teheran juga selalu berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan PLO (Sihbudi, hal. 375, 2007).

Pada tahun 1991, Iran menggelar konferensi di Teheran untuk mendukung Palestina. Namun, Yasser Arafat yang pada saat itu diundang oleh Iran lebih memilih untuk menghadiri konferensi tandingan di Madrid yang disponsori oleh Israel dan Amerika Serikat. Iran memiliki keyakinan bahwa cita-cita bangsa Palestina tidak

dapat dicapai dengan negosiasi dengan Negara Zionis, hanya dengan cara-cara Islam bangsa Palestina dapat terbebas dari Israel.

Sikap Iran yang tidak menaruh harapan pada jalan negosiasi dapat dicermati lewat pernyataan presiden Iran pada saat itu Hashemi Rafsanjani. Rafsanjani mengatakan "Bagaimana mungkin kita menaruh harapan pada hasil perundingan dengan negara Israel yang Zionis, yang mengambil sikap begitu keras, yang tidak akan bersedia membicarakan masalah Dataran Tinggi Golan, Yerusalem, Tepi Barat Sungai Yordan, yang tidak henti-hentinya menjalankan politik migrasi bangsa Yahudi? Pengalaman Sejarah telah menunjukkan sikap yang lembut terhadap Israel, justru Tel Aviv memperbanyak tuntutan tidak sah dan persyaratan tidak legal." (Rafsanjani, hal. 249-250, 1992).

Pernyataan tersebut berkesan adanya sikap pesimisme Iran dari berbagai upaya negosiasi antara Arab dan Israel. Sementara PLO menempuh jalan diplomasi dalam perjuangannya, ini adalah perbedaan pandangan antara Iran dan PLO. Sikap keras Hujjatulislam Hashemi Rafsanjani terhadap Israel juga diungkapkannya dengan menegaskan kesediaan Iran untuk mengerahkan pasukan guna membantu para pejuang Islam Palestina melawan Israel. (Sihbudi, hal. 376, 2007).

Setelah wafatnya Imam Khomeini, Iran lebih memilih politik luar negeri yang bersifat *detente* (peredaan ketegangan). *Detente* yang ditempuh Teheran ini terlihat hanya ditujukan kepada negara-negara diluar Israel dan Amerika Serikat. Namun Iran mengambil sikap konfrontatif apabila terkait masalaha Palestina, sikap konfrontatif ini diberlakukan Iran kepada Israel dan Amerika Serikat. Sikap keras Iran terhadap Israel ini tampak menjadi ciri khas dari Iran. Baik kelompok konservatif maupun reformis, keduanya sama-sama memiliki sikap yang sama terhadap Israel.

Seruan Iran kepada bangsa Arab untuk meninggalkan semangat Pan-Arab dan menggunakan "cara-cara Islam" tampaknya sangat tepat. Berbagai upaya Arab yang mengedepankan Pan-Arabnya tampak tidak efektif melawan Israel, terbukti dengan seluruh kekalahan Arab dari Israel dalam setiap konflik yang terjadi. Israel sendiri juga mengakui ketakutannya kepada kekuatan Islam, seperti yang pernah diungkapkan oleh salah seorang pimpinan partai Israel. Ia mengatakan " Selama

Islam menyerukan jihad dan perjuangan, kita tidak akan pernah merasa aman. Kita hanya akan bisa memperoleh ketentraman jika Islam telah meninggalkan Jihad untuk selama-lamanya.” Selain itu dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Ben Gurion dari sebuah kelompok Yahudi, kelompok tersebut menyatakan ” Kita tidaklah takut kepada sistem-sistem monarki, sosialis, ataupun radikal yang ada di negeri-negeri Arab. Yang kita takutkan sesungguhnya adalah bangkitnya Islam di kawasan Arab.” Moshe Dayan, mantan menteri pertahanan Israel juga menyuarakan hal yang sama, ia mengatakan ” Satu-satunya senjata yang menakutkan dan menggentarkan orang-orang Yahudi dan para pendukung mereka adalah Islam”. (Khallaj, hal. 217, 1992)

Perbedaan pandangan antara Iran dan PLO membuat Iran akhirnya memberikan dukungan kepada kelompok HAMAS (*Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyya*), yang merupakan suatu kelompok yang berdiri tahun 1977. (Alexander, et al, hal. 86, 2008) Latar belakang berdirinya HAMAS adalah adanya diskriminasi ekonomi dan politik yang dilakukan Israel kepada warga di Jalur Gaza. Hal ini membuat adanya gairah keagamaan yang kuat bagi warga di Jalur Gaza, khususnya di kalangan muda. Sementara semangat keagamaan juga timbul di wilayah Tepi Barat khususnya di universitas-universitas. Munculnya semangat Islam juga merupakan suatu jawaban dari ”keputusasaan” upaya diplomasi oleh PLO yang berideologi sekuler.

Dalam pembukaan piagam pembentukan HAMAS, dikutip sebuah ucapan dari Hassan Al Banna yakni ” Israel akan ada dan terus akan ada sampai Islam yang akan menghapusnya”. Motto dari HAMAS adalah ” Allah adalah tujuan, Rasul adalah model, Al-Qur’an adalah konstitusi: Jihad adalah jalan dan Syahid adalah cita-cita tertinggi.” (Alexander, et al, hal. 90-91, 2008) Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Islam menjadi dasar dari perjuangan HAMAS. Islam diyakini menjadi jalan untuk mencapai kemenangan. Hal ini sangat sejalan dengan apa yang diyakini oleh Iran.

HAMAS yang dipimpin oleh Syaikh Ahmad Yassin menentang ideologi sekuler PLO. Syaikh Ahmad Yassin berpendapat bahwa aspirasi warga Palestina dapat terwujud hanya dengan pembentukan negara Islam Palestina. HAMAS yang

berideologi Islam ini dinilai sangat cocok dengan pandangan Iran yang juga berorientasi pada Islam. Iran dalam hal ini tidak membedakan perbedaan Sunni-Syiah. HAMAS pada dasarnya menganut Islam Sunni. Tetapi, HAMAS telah menunjukkan bahwa militansinya juga tidak kalah dari Hizbullah di Lebanon.

Kesamaan visi ini menciptakan adanya harapan bagi Iran untuk terus mengupayakan tujuannya yakni menghapus Israel dari peta dunia. Iran secara intens membangun hubungan dengan HAMAS. Terlebih HAMAS ternyata mendapat dukungan dari mayoritas rakyat Palestina Hal ini terbukti dengan kemenangan HAMAS pada pemilu parlemen pada 25 Januari 2006. Pada pemilu itu, HAMAS meraih kursi mayoritas di Parlemen dengan memperoleh 76 kursi dari 132 kursi yang diperebutkan, sementara Fatah hanya mendapat 43 kursi. Dengan Mayoritas kursi tersebut, HAMAS berhasil mengusung Ismail Haniya sebagai perdana menteri Palestina.

Pemilu yang digelar secara demokratis tersebut tidak diakui oleh berbagai negara Barat khususnya Israel. Bahkan Israel tidak mau mengakui pemerintahan Haniya karena Israel menilai HAMAS sebagai gerakan teroris. Sikap negara-negara Barat dan Israel membuktikan bahwa mereka telah mengabaikan aspirasi rakyat Palestina yang telah mempercayakan masa depannya kepada HAMAS. Israel dan Amerika Serikat semakin menunjukkan ketidakberpihakan pada aspirasi rakyat Palestina dengan memboikot berbagai bantuan kepada Palestina, selain itu Israel juga membekukan dana pajak yang dipungut dari warga Palestina. Upaya Israel untuk melumpuhkan ekonomi Palestina tersebut bertujuan agar rakyat menggulingkan pemerintahan yang baru terpilih secara demokratis tersebut.

Kondisi ini dimanfaatkan betul oleh Fatah untuk mendesak pemerintahan HAMAS untuk mundur. Karena melihat penderitaan rakyat yang berat sebagai akibat dari boikot internasional tersebut, akhirnya HAMAS bersedia untuk membentuk pemerintahan bersama dengan Fatah. Namun, pembentukan pemerintahan bersama juga tampaknya sulit karena Amerika Serikat dan Israel tidak setuju apabila perdana menteri masih dipegang oleh Ismail Haniya. Gejolak politik ini berimbas juga pada sayap militer masing-masing kelompok yang menyebabkan bentrok senjata antara

keduanya. Akhirnya presiden Mahmoud Abbas mengeluarkan dekrit untuk membubarkan parlemen dan mengangkat Salam Fayyad sebagai perdana menteri dan membentuk kabinet darurat. Namun HAMAS tidak menerima hal tersebut, dan akhirnya Palestina terbelah Hamas berkuasa di Gaza dan Fatah di Tepi Barat.

Sekalipun negara-negara Barat dan Israel tidak mengakui pemerintahan HAMAS, tetapi Iran secara intens berhubungan dengan HAMAS dan memberikan berbagai bantuan kepada bangsa Palestina. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad bertemu dengan kepala biro politik HAMAS Khaleed Meshal di Teheran pada 20 February 2006 tidak lama setelah HAMAS memenangkan pemilu. Ini dapat diartikan bahwa Iran mengakui eksistensi dari pemerintahan HAMAS. Pada tanggal 11 Desember 2006, Perdana Menteri Palestina bertemu dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad di Teheran. Hasil dari pertemuan tersebut adalah komitmen Iran untuk membayar gaji pegawai negeri Palestina yang tidak dibayarkan selama 6 bulan sebagai akibat dari boikot internasional. Garda Revolusi Iran juga disinyalir berperan dalam melatih HAMAS dan Jihad Islam (Yaloon, hal.18, 2007).

Bentuk komitmen terhadap rakyat Palestina dapat dilihat dari paparan mantan Duta Besar Iran untuk Indonesia Asghar Ghoraisi. Dalam sebuah wawancara ia mengungkapkan "Parlemen Iran memberlakukan hukum yang mewajibkan parlemen itu untuk mendukung Palestina dengan segala sarana dan kekuatan termasuk menyediakan dana bantuan kemanusiaan untuk mendukung rakyat Palestina. Iran juga mewajibkan yayasan *Syuhada* dan yayasan *Mustadh'afin* serta Bulan Sabit Merah Iran untuk memberikan segenap dukungan material dan spiritual yang mungkin kepada keluarga Syuhada, cacat, dan orang-orang yang hilang.." (Sihbudi, et al, hal. 228, 1992).

#### **IV.1.1.4. Peranan Iran di Iraq**

Iran adalah sebuah negara yang memiliki agenda tersendiri terhadap Iraq. Lebih dari hanya sekedar kepentingan politik, keamanan ataupun ideologi. Adanya kedekatan sejarah diantara kedua negara juga harus menjadi pertimbangan tersendiri dalam menilai agenda Iran di Iraq. Hal ini mengingat jumlah populasi Syiah yang mayoritas di Iraq, selain itu adanya hubungan dalam sejarah kedua negara dimana

banyak ulama-ulama Iran yang menuntut ilmu di Iraq. Kota Najaf di Iraq dapat dikatakan pernah menjadi pusat pengembangan intelektual bagi kaum Syiah. Karbala yang merupakan tempat suci kaum Syiah juga berada di Iraq.

Syiah merupakan kelompok mayoritas di Iraq, jumlah mereka mencapai 57% juta dari 25 juta warga Iraq. Pada umumnya kaum Syiah menempati daerah di kawasan Iraq bagian Selatan dan Timur seperti di kota Basrah, Karbala, Diwaniyah, Hillah, 'Amarah, Muntafiq, Kut, Najaf, Kazimain, dan Al-Thaurah. Sebagaimana kaum Syiah di negara lainnya, umat Syiah di Iraq juga berada dalam posisi tertinggal baik dari ekonomi dan politik. (Sihbudi, hal. 87, 2007).

Perjuangan kaum Syiah di Iraq berawal pada tahun 1935, dimana ulama Syiah menuntut diajarkannya Hukum Syiah pada sekolah-sekolah (fakultas) Hukum di seluruh Iraq. Namun gerakan Syiah Iraq baru terorganisasi pada akhir tahun 1950an, dimana sejumlah ulama dan aktivis Syiah, seperti Muhammad Mahdi Al-Safi, Sayyid Kazim Al-Ha'iri, Mahdi Ali Akbar Shariati, Ali Muhammad Al-Kurani, Mahdi Al-Khalisi, dan Hamid Muhajir mendirikan Partai Dakwah Islam (*Hizb ad-Da'wah Al-Islamiyyah*) di Najaf. Tiga diantara pendiri Partai Dakwah: Al-Safi, Al-Ha'iri, dan Shariati, adalah keturunan Iran. Pada tahun 1979 di Baghdad lahir organisasi kaum Syiah lainnya yakni Al-Mujahidin yang didirikan oleh Sayyid Abdul Aziz Al-Hakim yang merupakan anak dari ulama terkemuka di Iraq Ayatullah Muhsin Al-Hakim. Berbeda dari partai Dakwah yang menghendaki berdirinya rezim Islam Iraq yang independen, Al-Mujahidin secara tegas mengakui kepemimpinan Ayatullah Khomeini dan dengan sendirinya, mengizinkan Rezim Islam Iraq yang berorientasi ke Teheran. Tapi kedua kelompok tersebut sama-sama mengakui kepemimpinan Imam Syiah Iraq, Ayatullah Muhammad Baqir Al-Sadr (Sihbudi, hal. 89, 2007)

Keberhasilan Revolusi Islam Iran dan munculnya ketakutan akan menyebarnya pengaruh dari revolusi tersebut, membuat Saddam Hussein merasa khawatir dengan aktifitas kelompok oposisi Syiah tersebut. Terlebih setelah Iran dan Syria pada tahun 1979 melakukan pertemuan bilateral yang membahas berbagai opsi untuk memberikan bantuan kepada oposisi di Iraq, khususnya kaum Syiah di Selatan. Untuk itu, Saddam membalas upaya tersebut dengan memberi bantuan kepada

gerakan Kurdi dan Arab yang meminta otonomi dari Iran. Gerakan tersebut mulai melakukan aksinya dengan menyerang instalasi minyak diK Khuzestan. (Goodarzi, hal.18-19, 2006).

Iran juga terus melakukan propaganda terhadap oposisi Iraq. Salah satu Radio Iran yang berbahasa Arab menyerukan kepada rakyat Iraq untuk bersatu untuk menurunkan rezim tiran Saddam. (Goodarzi, hal.20, 2006). Hubungan Iran dengan kelompok Syiah di Iraq juga sangat dekat hal ini terbukti dari ketika Revolusi Islam Iran berhasil menggulingkan Shah Pahlevi pada Juni 1979. Al-Sadr yang merupakan ulama terkemuka di Iraq merencanakan memimpin *long march* dari Najaf ke Teheran untuk memberikan ucapan selamat pada Imam Khomeini. Namun Rezim Ba'ath tidak membiarkan hal itu terjadi dan menangkap Al-Sadr. Tindakan penguasa ini justru membangkitkan kerusuhan anti-Saddam yang lebih luas dikalangan kaum Syiah Iraq. Selama hampir setahun berada dalam tahanan rumah pada 8 April 1980, Al-Sadr dijatuhi hukuman mati. Keesokan harinya puluhan aktivis Partai Dakwah juga dijatuhi hukuman mati. Penumpasan yang dilakukan rezim Saddam terhadap gerakan kaum Syiah menyebabkan terjadinya eksodus (antara 200.000 samapai 300.000) warga Syiah Iraq ke Iran.(Sihbudi, hal. 90-91, 2007)

Ketegangan antara Iran dan Iraq terus berlanjut. Saddam berupaya untuk menggalang dukungan dari negara-negara Arab untuk melawan Iran. Pada 8 Februari 1980, Saddam menyatakan pentingnya dukungan antar sesama negara Arab untuk melawan non-Arab. Saddam juga menyamakan konflik ini seperti peperangan antara Qadisiyah di Iraq dan Sasaniah di Persia pada tahun 1400an. (Goodarzi, hal.29, 2006). Pernyataan-pernyataan Saddam ini terlihat berupaya untuk memprovokasi bangsa Arab untuk membantu memerangi Iran. Pernyataan Saddam sangat kental dengan pertarungan antara Arab dan non-Arab.

Krisis antara Iran-Iraq ini memuncak pada tahun yang sama terkait dengan penguasaan Shat el-Arab. Dan keduanya melakukan pertempuran selama 8 tahun yang dikenal dengan Perang Teluk I. Pertempuran ini menimbulkan banyak korban jiwa dikedua belah pihak. Namun, perang tersebut tidak membawa perubahan pada kepemimpinan kedua negara. Saddam tetap berkuasa di Iraq, sementara Republik



Islam Iran juga tetap berdiri. Ini adalah masa-masa sulit bagi Iran, dimana mereka harus bertempur di dua front sekaligus yakni Iraq dan Lebanon.

Sejak pecah perang Iran-Iraq banyak pemuka Syiah Iraq yang mengungsi ke Iran. Teheran pun mensponsori pembentukan *Supreme Council of the Islamic Revolution* (SCIRI) dibawah pimpinan Ayatullah Baqir Al-Hakim dengan tujuan menumbangkan Rezim Saddam dan mendirikan *Wilayat Al-Faqih* di Iraq. Setelah kekalahan Iraq dalam Perang Teluk II tahun 1991, kekuasaan Saddam mulai melemah. Kesempatan ini dipakai oleh kaum Syiah Iraq untuk melakukan konsolidasi. Namun, mereka tetap sulit untuk menyatu dibawah kepemimpinan tunggal. Alhasil, kaum ulama Syiah Iraq terpecah menjadi dua kubu, yaitu mereka yang pro dan anti *Wilayat Al-Faqih*. Kelompok yang anti *Wilayat Al-Faqih* dipimpin oleh Ayatullah Al-Uzma Ali Al-Sistani yang oleh media Barat sering digambarkan sebagai seorang ulama yang moderat. Sementara itu, kelompok yang pro *Wilayat Al-Faqih* dipimpin oleh Sadiq Al-Sadr yang merupakan saudara dari Baqir Al-Sadr. (Sihbudi, hal.92, 2007)

Sejak tahun 2000 terlihat adanya peredaan ketegangan antara Baqhdad dan Teheran. Perbaikan hubungan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh konstalasi politik kawasan, dimana Amerika Serikat berada pada posisi yang cukup kuat. Kecurigaan kepada Iran mulai berkurang dan ini membuktikan bahwa pergeseran politik luar negeri Iran berdampak positif bagi posisi Iran di Kawasan Timur Tengah. Iraq yang pada saat itu "terkucil" dari Dunia Arab, melihat Iran dapat menjadi sahabat yang dapat melindungi negara tersebut, melihat adanya ancaman dari Amerika Serikat yang merupakan musuh Iran juga.

Peredaan ketegangan antara Iran dan Iraq dimulai dengan undangan Iraq kepada para pejabat tinggi Iran untuk mengunjungi Iraq dan berziarah ke tempat-tempat suci Syiah di Iraq. Lalu, hal tersebut berlanjut pada pertemuan presiden Khatami dengan wakil presiden Iraq Taha Yasin Ramadhan disela pertemuan KTT OPEC di Venezuela. Sejak itu, Iran menunjukkan niat baiknya dengan membebaskan para tawanan dalam Perang Teluk I. Lalu, Iran juga mengawasi gerak oposisi Iraq

yang berada di Teheran dengan menutup televisi oposisi Iraq dan oposisi Iran (Rahman, hal. 188-189, 2003).

Dengan hadirnya pasukan Amerika Serikat dan Sekutu di Iraq pasca invasi tahun 2003, menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat diantara kaum Syiah Iraq. Satu sisi, ada kelompok yang dipimpin oleh Ayatullah Ali Al-Sistani yang mau berkompromi dengan Amerika Serikat. Disisi lain ada kelompok yang diketuai oleh Moqtada Al-Sadr yang merupakan putra dari Sadiq Sadr yang merupakan ulama terkemuka Iraq yang dibunuh oleh Garda Republik Iraq pada tahun 1999. Dengan mundurnya Saddam tentunya menciptakan peluang bagi Syiah Iraq untuk berkuasa di Iraq. Hal ini tampak dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok yang diketuai oleh Majelis Tertinggi Revolusi yang dipimpin oleh Abdul Aziz Al-Hakim, dimana kelompok ini didukung oleh Ayatullah Ali Al-Sistani. Baik Al-Hakim maupun Al-Sistani, keduanya lebih memilih sikap kooperatif dengan tentara pendudukan Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan sikap kooperatifnya ini, Al-Hakim berhasil menjadi anggota Dewan Pemerintahan Iraq yang merupakan hasil bentukan Amerika Serikat.

Sementara itu, kelompok Moqtada Al-Sadr memilih jalan konfrontasi dalam menyikapi kehadiran Amerika Serikat di Iraq. Pada tanggal 7 April 2003, dua hari sebelum Baghdad jatuh ketangan Amerika Serikat, pendukung Moqtada Al-Sadr merebut kawasan Kota Saddam (di Baghdad) dan mengganti namanya menjadi kota Sadr (Sadr City). Pada Agustus 2003, Moqtada mendeklarasikan pembentukan Tentara Al-Mahdi. Sempat terjadi pertempuran merebutkan tempat suci Syiah, yakni makam dan masjid Imam Ali bin Abi Thalib di Najaf, antara pendukung Moqtada dengan pendukung Al-Sistani. Pasukan Al-Mahdi yang anggotanya diperkirakan mencapai 10.000 orang pasukan "berani syahid", mulai melancarkan perlawanan sengit terhadap pasukan penjajah Amerika Serikat di sejumlah kota penting di Iraq seperti Kufa, Karbala, Najaf, Al-Kut, dan Kota Sadr (Sihbudi, hal.94-95, 2007).

Moqtada sendiri kerap dituduh melakukan pembunuhan terhadap ulama yang pro Amerika Serikat. Moqtada pernah dituduh oleh Amerika Serikat membunuh Ayatullah Al-Uzma Abdul Majid Al-Khoei pada 10 April 2003. Lalu, Amerika

Serikat kembali menuduh Moqtada yang menjadi dalang pembunuhan dari Baqir Al-Hakim yang tewas akibat bom berkekuatan besar di Najaf pada Agustus 2003. Namun dengan tegas Moqtada menolak tuduhan tersebut. Sebagian pejuang Iraq justru mencurigai dinas intelijen Amerika Serikat dan Israel berada dibelakang pembunuhan Baqir Al-Hakim, yang menewaskan ratusan warga Syiah lainnya sesuai menunaikan shalat Jum'at. Amerika Serikat memang berkepentingan terhadap berlanjutnya perpecahan di kalangan para pejuang Syiah Iraq (Sihbudi, hal. 93-95, 2007)

Sikap Iran dalam melihat konstalasi politik dalam negeri Iraq yang masih belum stabil ini, Iran justru mengambil langkah yang sedikit aneh. Iran mendukung Ali Al-Sistani yang lebih memilih jalur kooperatif dengan Amerika Serikat, selain itu, Sistani juga menolak sistem *Wilayat Al-Faqih*. Iran justru pada awalnya tidak sepaham dengan Moqtada Al-Sadr yang memiliki sikap keras terhadap Amerika Serikat.

Tampaknya Iran berupaya untuk konsisten dalam mendukung SCIRI yang didirikan di Iran dan selama ini diakui oleh Teheran. Dengan keberhasilan kelompok ini untuk masuk dalam pemerintahan Iraq tentunya memberikan Iran suatu keuntungan karena kedekatan yang mereka bangun selama ini. Lalu, di kalangan Syiah kini terpecah tentang siapa pemimpin tertinggi kaum Syiah. Sebagian besar kaum Syiah mengakui kepemimpinan Ali Al-Sistani yang berdomisili di Najaf, Iraq. Sistani Saat itu merupakan pemimpin tertinggi Syiah, bukan pemimpin spiritual Iran Ali Khamenei. Namun, Iran dan Hizbullah berupaya untuk memindahkan tempat kepemimpinan Syiah tertinggi dari Iraq ke Iran pasca wafatnya Ali Al-Sistani dan menyatukan sikap kaum Syiah untuk menerima *Wilayat Al-Faqih*. (Mustafa Abd. Rahman, Kompas, 18 April 2009).

Pada awalnya Iran tidak sepaham dengan Moqtada Al-Sadr, namun belakangan Iran tampak juga mulai membangun hubungan dengan Moqtada Al-Sadr. Hal ini dapat terlihat dimana Moqtada diterima dengan baik ketika berkunjung ke Iran. (Sihbudi, hal.95, 2007). Selain itu, Iran juga disinyalir telah membantu gerakan Moqtada Al-Sadr lewat Hizbullah di Lebanon. menurut agen senior CIA, Hizbullah

yang dinilai sebagai *proxi* dari Iran telah menggunakan markasnya di Lebanon untuk melatih lebih dari 2000 orang Tentara Al-Mahdi. Dan menurut laporan tersebut, Iran yang memfasilitasi hubungan antara Hizbullah dan milisi Syiah di Iraq.(Yaloon, hal.20, 2007).

Dengan menerima Moqtada ini, Iran tampak memainkan peranan yang cukup taktis dalam peta politik di Iraq. Iran terlihat mampu dalam menjaga perimbangan diantara kaum Syiah di Iraq. Dukungan kepada pemerintah resmi Iraq dan juga hubungan dengan Moqtada Al-Sadr membuat posisi Iran semakin diperhitungkan dalam politik di Iraq.

#### IV.1.2. Unsur Militer

Revolusi Islam Iran (1978-1979), yang digerakan kaum Syiah, telah menimbulkan pengaruh yang cukup besar di Dunia Islam, khususnya di negara-negara kawasan Timur Tengah (Sihbudi, hal.191, 1991). Gerakan-gerakan fundamentalisme Islam yang militan banyak bermunculan setelah terjadinya Revolusi Islam Iran. Pengaruh tersebut dirasakan sangat kuat khususnya di negara-negara yang populasi Islam Syiah yang cukup besar, seperti di Iraq, Libanon, dan Bahrain. Namun, pengaruh Iran ini juga dirasakan di Palestina dengan munculnya gerakan *intifadah*, yang dalam beberapa aspek hampir sama dengan gerakan Revolusi Islam di Iran, dimana gerakan tersebut bukan bermula dari suatu kelompok ataupun faksi tertentu.

Pengaruh Iran yang cukup besar tersebut membuat kekhawatiran negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Iran sebagai sebuah negara yang masih dalam pembenahan pasca terjadinya Revolusi mendapatkan tantangan yang besar yang datang dari negara tetangganya yakni Iraq. Hal ini bermula dari pihak Iraq yang membatalkan secara sepihak perjanjian Aljir mengenai penguasaan daerah *Shat El-Arab*. Iraq menolak keberadaan Iran di wilayah tersebut dan mengklaim bahwa daerah tersebut milik Iraq. Pada September 1980, pasukan Iraq menyerbu dan mencoba menguasai daerah tersebut sehingga terjadi Perang Teluk I. Dalam perang tersebut Iran bukan hanya berhadapan dengan Iraq. Namun, juga berhadapan dengan negara-negara di Kawasan Teluk yang tergabung dalam GCC (*Gulf Cooperation*

*Council*) yang beranggotakan Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab, yang selama Perang Teluk I berlangsung Negara-negara tersebut dengan gigih mendukung Iraq.

Revolusi Islam di Iran juga memberikan perubahan dalam bidang militer negara ini. Pasca Revolusi, secara umum Iran memiliki dua tentara, yakni angkatan bersenjata Iran dan Garda Revolusi. Terbentuknya Garda Revolusi merupakan sebuah upaya untuk menjaga kelangsungan Revolusi. Sedangkan angkatan bersenjata Iran sendiri adalah sebuah alat yang digunakan Shah untuk menjaga rezimnya pada saat itu, sebelum akhirnya mendukung Revolusi. Adanya kecurigaan pada angkatan bersenjata membuat para revolusioner membentuk sebuah angkatan bersenjata untuk menjaga Revolusi dengan membentuk Garda Revolusi. Selain itu banyak pula terbentuk kesatuan-kesatuan paramiliter seperti *Basij*, *Anshar e-Hezbollah*, dll.

Garda Revolusi (Pasdaran) dibentuk pada masa pasca terjadinya revolusi. Keberadaan Garda Revolusi ini terpisah dari kesatuan tentara Iran. Garda Revolusi ini dibentuk dengan tujuan untuk menjaga revolusi dari pihak-pihak yang dianggap dapat mengancam revolusi itu sendiri. Perkembangan Garda Revolusi sangat pesat pada saat terjadinya perang teluk, hal ini dapat terlihat dari jumlah anggotanya dari tahun-tahun pada saat terjadinya Perang Teluk I.

Salah satu dampak dari perang tersebut adalah meningkatnya jumlah anggota Garda Revolusi dari 10.000 pasukan pada 1980 hingga sekitar 50.000 pada awal 1982. pasukan ini mengalami peningkatan yang dramatis pada saat tahun-tahun berlangsungnya perang, dari 150.000 pada 1983, hingga 250.000 pada 1985, dan mencapai 450.000 pada 1987. Garda Revolusi ini baru menjadi sebuah institusi yang profesional pada saat era Presiden Hashemi Rafsanjani pada tahun 1989. Pada bulan Agustus dan September 1988, Garda Revolusi terdiri dari 21 devisi infantry, 15 brigade infantry, 21 brigade angkatan udara, 3 devisi konstruksi, dan 42 brigade artillery. (Byman, hal.34, 2001).

Sementara itu, kekuatan angkatan bersenjata Iran pada tahun 1982-1983 berjumlah hampir 200.000 orang yang terdiri dari 150.000 Angkatan Darat, 10.000 Angkatan Laut, dan 35.000 Angkatan Udara. Untuk Angkatan Darat dilengkapi

dengan 420 *Chieftank*, 100 Tank *Scorpion*, dan rudal anti Tank TOW . Angkatan Darat ini juga memiliki tentara cadangan mencapai 400.000 orang. Sedangkan Angkatan Laut Iran yang berjumlah 10.000 orang dilengkapi 4 kapal *Frigates* dengan rudal *Seakiller*, 103 kapal jenis *Corvettes*. Angkatan Laut ini berpangkalan Bandar Lengel, Bushehr, Kharg Island, Bandar-e-Enzli. Dan Angkatan Udara Iran yang berjumlah 35.000 orang dilengkapi dengan 77 buah F 14, 160 buah F 16, 90 buah F 4, 50 buah F 5, 2 squadron tanker dengan 12 *Boeing 707* dan 7 buah *Boeing 747*. Beberapa pesawat tersebut dilengkapi dengan rudal *Phoenix*, *Sidewinders*, dan *Sparrow*. (Byman, hal.36, 2001)

Pasca Perang Teluk I Iran menghadapi masalah dalam peralatan militernya, dimana Amerika Serikat tidak bersedia menyediakan suku cadang bagi peralatan militer Iran, seperti telah disinggung diatas bahwa sebagian peralatan militer Iran berasal dari Amerika Serikat. Hal tersebut membuat Iran membangun sendiri komponen-komponen peralatan militernya.

Setelah berakhirnya Perang Teluk I, Iran harus membangun kembali negaranya yang tentunya menelan biaya yang sangat besar. Ditengah situasi seperti ini Iran juga harus menghadapi embargo ekonomi yang menyebabkan terbatasnya pendapatan Iran dan inflasi yang sangat besar mencapai 50 %, ditambah lagi dengan sikap Kuwait dan Uni Emirat Arab yang memproduksi minyak diluar batas quota yang menyebabkan turunnya harga minyak pada saat itu yang tentunya memberikan kerugian bagi Iran.

Kesulitan ekonomi ini juga tentunya berdampak pada belanja militer Iran pada masa pasca Perang Teluk. Anggaran pertahanan Iran terus menurun dari tahun-tahun antara 1989 hingga 1992. Pada tahun 1989-1990 anggaran militer Iran mencapai 5.77 milyar dollar AS dan pada tahun 1992 anggaran militer tersebut menurun hingga hanya 2.3 milyar Dollar AS. Selain itu penurunan juga terjadi pada jumlah tentara Iran, pada tahun 1989 jumlah tentara Iran mencapai 604.500 orang dan pada tahun 1992 turun menjadi hanya 513.000 orang. (Sumber: *The Military Balance 1989-1990*, 1990)

Peningkatan kekuatan militer Iran mulai terlihat dari tahun 1992 hingga 1997. diantara tahun-tahun tersebut jumlah tentara Iran meningkat 32.600 orang yakni mencapai 545.000 orang pada tahun 1997. Selain itu anggaran militer Iran juga meningkat dari 2.3 milyar dollar AS pada 1992 hingga mencapai 4.7 milyar Dollar pada tahun 1997, jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat. Dan anggaran militer Iran meningkat lagi pada tahun 1998 hingga mencapai 5.8 milyar dollar. (Sumber: *The Military Balance 1998-1999*, 1999)

Pernyataan Presiden Amerika Serikat George W. Bush yang memasukan Iran dalam list Poros Kejahatan (*Axis of Evil*) bersama Iraq dan Korea Utara pada tahun 2002, semakin memperkeruh hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Indikasi keterlibatan Iran dalam konflik Israel-Palestina membuat situasi semakin mengkhawatirkan, ditambah lagi dengan upaya Iran untuk melanjutkan program nuklirnya. Selain itu, uji coba rudal balistik Shihab 3 juga menjadi kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Rudal tersebut mampu menjangkau jarak 1.300 km yang berarti dapat menjangkau Israel dan berbagai kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Iran juga terus meningkatkan kegelisahan Amerika Serikat dengan memperkuat angkatan lautnya dengan memesan 10 kapal patroli cepat dari China yang dilengkapi dengan *Surface-to-Surface Missile*.

Untuk anggaran militer dari tahun 2000 hingga 2001, Iran mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2000 Iran hanya mengalokasikan 2.3 milyar dollar AS, pada tahun 2001 meningkat menjadi 2.8 milyar dollar AS. Anggaran belanja militer Iran justru meningkat ditengah penurunan pendapatan perkapitanya, pada tahun 2000 pendapatan perkapita Iran adalah 1500 dollar dan menurun menjadi 1.300 dollar AS pada tahun 2001. (Sumber: *The Military Balance 2002-2003*, 2003)

Kawasan Timur Tengah kembali mendapatkan perhatian lebih setelah terjadinya invasi Amerika Serikat ke Iraq. Namun perhatian tersebut tidak semata-mata tertuju ke Iraq, Iran yang merupakan negara tetangga Iraq juga mendapatkan perhatian masyarakat internasional terkait masuknya Iran dalam Poros Kejahatan

versi Amerika Serikat. Krisis yang terjadi di Iraq bukan tidak mungkin akan terjadi di Iran, menyusul isu nuklir Iran yang mulai memuncak.

Ditengah kekhawatiran masyarakat dunia tentang isu nuklir Iran, Rusia justru bersedia menjalankan proyek sebesar 800 juta dollar AS untuk membangun fasilitas nuklir di Bushehr. Iran juga mulai membuka fasilitas untuk konstruksi gas sentrifugal (*gas-centrifuge*) untuk memperkaya uranium di kota Natanz. Pada bulan Maret 2003 sebanyak 160 mesin sentrifugal telah dipasang. Selain itu Iran juga memiliki fasilitas untuk memproduksi Air Berat (*heavy Water*) di Arak. Dari kombinasi tersebut memungkinkan Iran untuk membuat senjata nuklir. Hal tersebut menimbulkan kecaman dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pada bulan September 2003, *International Atomic Energy Agency* (IAEA) meminta Iran untuk menjelaskan secara jelas program nuklirnya kepada PBB. Atas tekanan dunia Internasional kepada Iran maka pada 21 Oktober 2003 Iran mencapai persetujuan dengan tiga negara Uni Eropa (Jerman, Perancis, dan Inggris) untuk bekerjasama penuh dengan IAEA terkait program nuklirnya. Selain itu Iran juga bersedia untuk menanggukkan program pengayaan uraniumnya. Namun berbagai *statement* dari Amerika Serikat yang dinilai Iran selalu mengancam untuk mengajukan program nuklirnya ke Dewan Keamanan PBB membuat Iran kecewa, dan Iran kembali melanjutkan pengayaan uraniumnya pada bulan Agustus 2005, tetapi masih dibawah pengawasan IAEA. Hal ini ditempuh ditengah ancaman Amerika Serikat untuk mengajukan Iran ke Dewan Keamanan PBB. Apabila upaya tersebut berhasil maka Iran akan mendapatkan sanksi dari PBB. Selain itu, IAEA juga memfokuskan investigasinya kepada beberapa perusahaan dari berbagai negara yang menjual peralatan dan komponen yang sensitif pada Iran. Perusahaan tersebut diantaranya berasal dari Jerman, Swiss, Austria dan beberapa Negara Eropa Barat.

Sementara itu, pada bulan Oktober 2004 fasilitas konversi uranium di kota Isfahan sudah hampir selesai, fasilitas tersebut sudah 70% beroperasi. 21 dari 24 ruang kerja yang dibangun di fasilitas itu sudah beroperasi untuk mengkonversi (mengubah) bubuk uranium yang disebut *Yellow Cake* menjadi gas *Hexaflorida*. Proses ini merupakan tahap akhir yang harus dilalui sebelum dilakukan proses



pengayaan.(Kompas, 26 Oktober 2004). Selain itu Russia juga telah menyelasikan reaktor nuklir dikota Busheher. Reaktor ini berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir.

Iran berencana untuk memproduksi 7000 Megawatt energi nuklir pada 2020. kapasitas 7000 Megawatt tersebut akan diperoleh melalui paling tidak tujuh reaktor nuklir, termasuk didalamnya reaktor nuklir di Busheher. Menurut IAEA, kemampuan nuklir Iran sudah hampir lengkap. Termasuk penambangan dan pengelolaan uranium, konversi, pengayaan, produksi bahan bakar, produksi air berat, reaktor air berat. (Bowen and Kidd, hal.258, 2004)

Indikasi lain yang menunjukkan adanya upaya pengembangan kekuatan militer Iran adalah program pengembangan rudal balistiknya. Pada bulan Juli 2003 Iran telah berhasil melakukan uji coba final rudal balistiknya yang diberi nama Shihab 3 dengan daya jelajah 1300 Km. Uji coba final ini dilakukan sebelum akhirnya Shihab 3 diberikan pada militer Iran. Uji coba ini menunjukkan bahwa Shihab 3 kini resmi menjadi salah satu bagian dari kekuatan militer Iran yang dapat digunakan untuk kepentingan militer Iran.

Upaya pengembangan rudal balistik tersebut terus dilakukan Iran terkait dengan jangkauan dan ketepatan dari rudal Shihab 3. Hal tersebut dibuktikan Iran dengan berhasilnya uji coba pada Oktober 2004 terhadap Rudal Shihab 3 yang telah diperbaharui. Rudal Shihab 3 yang telah diperbaharui tersebut memiliki jarak jelajah 2000 Km. Sedangkan untuk sistem navigasi ketepatan rudal tersebut didapat dari China. Selain itu Iran juga terus berupaya untuk mengembangkan Shihab 3 menjadi Shihab 4 dan 5. Shihab 4 dan 5 sejauh ini masih dalam tahap pengembangan. Shihab 4 diperkirakan akan mempunyai jarak jelajah antara 1700 hingga 2900 Km. Sedangkan untuk Shihab 5 diperkirakan akan mampu menempuh jarak sejauh 4300 Km, yang dengan jangkauan tersebut dapat menjangkau Eropa, sebagian Afrika, hingga sebagian Asia Tenggara.

Rudal Shihab 3 sendiri merupakan hasil pengembangan dari dua rudal sebelumnya yang diproduksi Iran, yakni rudal Shihab 1 dan Shihab 2. Rudal Shihab 1 memiliki jangkauan sejauh 330 Km, sedangkan Shihab 2 berdaya jelajah sejauh 700

Km. Rudal Shihab 1 secara fisik memiliki tinggi 11,2 meter, sedangkan Shihab 2 tingginya 12,3 meter.

Selain ketiga rudal Shihab, Iran juga memiliki beberapa jenis rudal balistik lainnya. Iran memiliki rudal Scud jenis B dan C disertai dengan peluncurnya. Selain itu Iran juga memiliki rudal Shahin 1 dan 2 dan juga rudal Nizeat. Dan dalam periode waktu ini diperkirakan Iran telah memiliki paling tidak 6 buah rudal Shihab 3 yang siap dioperasikan. Untuk peluncuran rudal-rudal balistiknya, Iran juga telah membangun terowongan-terowongan untuk penyimpanan dan peluncuran rudal-rudal balistiknya.

Teknologi rudal balistik yang dimiliki Iran ternyata dapat digunakan pula untuk teknologi ruang angkasanya. Pada bulan September 2004, Pemerintah Iran menyatakan akan menggunakan sebuah versi dari peluru kendali Shihab 3 untuk meluncurkan satelit percobaan. (Kompas, 22 September 2004). Rudal tersebut akan membawa satelit percobaan yang berbobot 20 Kg. Iran juga menyatakan akan menjadi negara Islam pertama yang memiliki teknologi ruang angkasa. Proyek tersebut bernama Safir-313 yang berarti "duta" atau "utusan". Percobaan ini dapat menjadi sebuah awal bagi Iran untuk mengembangkan teknologi luar angkasanya yang juga dapat berguna untuk keperluan militer dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2004-2005 Iran memiliki total tentara 540.000 orang yang aktif. 540.000 orang tersebut terdiri dari 350.000 angkatan darat yang dilengkapi dengan 540 buah Tank jenis T-54, 75 buah Tank jenis T-62, 480 buah T-72, 100 buah Chieftank, 168 buah M-47, 150 buah M-60 A1, 100 buah Tank jenis Zulfiqar, dan 80 Scorpion. Angkatan laut Iran pada periode ini berjumlah 18.000 orang. Angkatan laut Iran ini memiliki 3 buah kapal selam, 3 buah kapal Frigates, 56 kapal patroli dan kapal perang, dan 10 buah Amphibi. Sedangkan untuk angkatan udara Iran sendiri berjumlah 52.000 personel. Angkatan udara sendiri dilengkapi dengan 9 Squadron pesawat *Fighter* yang terdiri dari 65 buah F-4D dan E, 60 buah F-5E, 30 buah Su-24 MK, 7 buah Su-25 K, dan 24 buah Mirage F-1E. Pesawat *Fighter* ini berguna untuk pertempuran udara (*Aerial Combat*). Selain Angkatan Bersenjata tersebut Iran juga memiliki Garda Revolusi (*Pasdaran Inqilab*) yang berjumlah 120.000 orang. Dari

120.000 tersebut terdiri dari 100.000 pasukan darat dan 20.000 pasukan angkatan laut. (Sumber: *The Military Balance 2004-2005*, 2005).

Dalam hal anggaran militer, terjadi peningkatan dalam anggaran pertahanan Iran. Pada tahun 2002 sebesar 3.4 milyar dollar AS dan terjadi peningkatan menjadi 3.61 milyar Dollar AS pada tahun 2003, terjadi peningkatan sebesar 200 juta dollar AS. Persentase anggaran militer Iran juga mengalami peningkatan pada tahun 2003 menjadi 4,8% dari GDP (*Gross Domestic Product*) Iran, yang ditahun sebelumnya hanya 3,3 %. (Sumber: *The Military Balance 2003-2004*, 2004).

#### IV.1.3. Ekonomi Iran

Minyak merupakan komoditi ekspor terpenting di Iran dan di ekspor melalui berbagai terminal penting di Teluk Persia. Namun dengan situasi dan kebijakan dari Republik Islam Iran, kini telah memungkinkan Iran untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak dan telah memberikan hasil yang cukup baik, hal tersebut disertai dengan diversifikasi potensi eksport. Selain minyak komoditi ekspor Iran meliputi batu-batu mulia, emas, tembaga, kaviar, ikan kaleng, kacang-kacangan, almond, sayuran dan buah-buahan, dan beberapa barang industri. Sedangkan impor utama Iran meliputi barang-barang logam, suku cadang dan asesori mobil, barang-barang elektronik, mesin-mesin industri dan barang-barang konsumsi lainnya.

Sumber mineral terpenting di Iran adalah minyak, gas, uranium, batu bara, bijih besi, tembaga, timah hitam, kuningan, emas, perak dan batu tulis. Mutu dari barang-barang tersebut cukup baik sehingga memiliki potensi ekspor yang cukup baik. Dan Iran adalah negara kedua yang memiliki cadangan gas terbesar di dunia. Selain itu Iran juga termasuk di dalam negara-negara penghasil tembaga terbesar di dunia.

Perusahaan besar penambangan tembaga dijalankan para ahli asing sebelum Revolusi Islam Iran. Tetapi, setelah Revolusi, proses penggalian dan produksinya dilaksanakan oleh orang-orang Iran. Hal ini dimanfaatkan sepenuhnya potensi penambangan demi meningkatkan perekonomian negara, kini sedang dilaksanakan suatu program industri untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kandungan mineral. (Republik Islam Iran: *Selayang Pandang*, hal. 37.)

Minyak dan gas alam merupakan komponen penting dalam *gross domestic produk* (GDP), namun persentase dari minyak dan gas Iran masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara Teluk. Di Iran, agrikultur, manufaktur, dan sektor non-migas lainnya memainkan peranan lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Timur Tengah. Minyak dan gas Iran menyumbang 23% dari total GDP, sementara negara lainnya seperti Saudi, Kuwait, dan Qatar berada di atas 40% dari GDP. (Crane, hal. 72-73, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa Iran sekalipun menjadi salah satu negara pengekspor minyak terbesar, namun pada kenyataannya tidak terlalu bergantung hanya dari minyak saja.

Rata-rata produksi minyak Iran pada tahun 2005 mencapai 4 juta barrel per-hari. Karena kekurangan dana dan teknologi maka Iran masih mengandalkan ladang-ladang minyak lama yang telah digali sejak dekade 1970an. Hal ini juga berpengaruh pada biaya produksi yang cukup tinggi. Biaya produksi yang dikeluarkan Arab Saudi untuk satu barrel minyak hanya 2 sampai 3 dollar saja. Sementara Iran yang menggunakan ladang minyak lama, biaya produksi untuk satu barrel minyak mencapai 15 sampai 18 dollar. (Crane, hal.98-99, 2008).

Selain dari sektor pertambangan, Iran juga terkenal dengan kerajinan tangannya berupa permadani, industri permadani di Iran telah berlangsung lama dan memiliki potensi ekspor yang cukup besar. Keunggulan dari permadani Iran adalah warnanya yang tidak luntur dan disainnya yang sangat indah, dimana setiap tahunnya Iran mengekspor permadani ini ke penjuru dunia.

Pemerintah Republik Islam Iran juga berupaya untuk mengendalikan kekayaan alamnya agar dapat dimanfaatkan secara efisien. Hal tersebut ditempuh untuk dapat mengoptimalkan kekayaan alamnya tersebut, dimana pada masa rezim Shah Iran kekayaan alam Iran khususnya minyak dieksploitasi secara besar-besaran.

Kondisi ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai hal, intern maupun ekstern. Iran memiliki cadangan minyak yang cukup besar yakni sebesar 136.27 miliar barel, yang berarti 10.3% dari total seluruh cadangan minyak dunia. Sementara untuk gas alam, Iran menyumbang 15.8% dari total cadangan gas alam dunia. (Crane, hal. 67-68, 2008). Namun pengelolaan dari sumberdaya tersebut mengalami berbagai

kendala. Iran kurang mampu mengoptimalkan eksplorasi ladang baru karena kurangnya teknologi dan modal. Hal ini membuat Iran sulit untuk menambah produksi minyaknya. Eksplorasi sumur minyak lepas pantai tentunya membutuhkan teknologi yang tinggi, hal ini membuat Iran terpaksa menerima perusahaan-perusahaan minyak asing untuk terlibat didalamnya. Sejauh ini, perusahaan-perusahaan China dan Jepang telah melakukan kesepakatan keuangan terkait pengelolaan ladang baru, sementara perusahaan Total dari Perancis, Statoil dari Norwegia, serta anak perusahaan dari Haliburton juga telah menjual jasa untuk meningkatkan produksi minyak Iran. (Crane, hal. 70, 2008)

Iran juga berupaya untuk menyeimbangkan minyak dan gasnya. Pada tahun 2002 Iran berhasil membuat pipa gas ke Turki. Namun Turki juga bekerjasama dengan negara lain terkait pemenuhan kebutuhan gasnya, hal ini membuat Iran dan Turki masih memperlmasalah volume dan harga. Selain itu, Iran juga berharap dapat menjual gasnya ke Eropa dan tentunya hal tersebut mengharuskan Iran untuk membangun pipa gas lainnya, namun hingga kini belum ada kesepakatan. Isu program nuklir Iran ikut memperkeruh suasana kerjasama ekonomi.

Buruknya hubungan antara Iran dan Amerika Serikat pasca Revolusi Islam Iran, juga berimbas pada sektor ekonomi. Amerika Serikat seringkali berupaya melemahkan perekonomian Iran. Salah satu upaya Amerika Serikat adalah dengan menggiring opini Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran terkait dengan kecurigaan program nuklirnya. Pada tahun 2007, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi PBB 1747 yang berisi sanksi terhadap Iran. Resolusi 1747 berisi sanksi terkait dengan larangan ekspor senjata, pembekuan aset Iran, juga membatasi Iran untuk memperoleh bantuan keuangan.

Iran tampak sudah siap menerima kemungkinan sanksi ataupun pembatasan ekonomi dari Amerika Serikat. Sebelum Resolusi 1747 dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, Iran telah berupaya untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap Amerika Serikat. Iran berupaya untuk melakukan diversifikasi cadangan devisanya ke mata uang kuat, khususnya euro. Bank Sentral Iran hanya menempatkan

dollar Amerika Serikat tidak lebih dari 20% dari total reserve.(Hamidi, hal. 53-54, 2007)

Sejak kenaikan harga minyak tahun 1998-1999 pertumbuhan ekonomi Iran berkembang pesat. Antara tahun 1999 hingga 2006, GDP Iran meningkat 49% dengan rata-rata peningkatan 5.8% per-tahun; GDP per capita naik 5.3%. (Crane, hal. 83, 2008). Kenaikan ini dapat dikatakan cukup luar biasa ditengah berbagai kesulitan ekonomi yang dihadapi Iran.

#### IV.2. Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah

Runtuhnya Uni Soviet membuat Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara *super power* di dunia untuk saat ini. Kedigdayaan Amerika Serikat dalam berbagai bidang membuat negara ini muncul menjadi hegemon dunia. Transformasi dunia pasca runtuhnya komunis mengarahkan dunia pada tatanan *uni polar* dibawah hegemoni Amerika Serikat.

Amerika Serikat berhasil membuat kemajuan besar dalam mengembangkan hubungannya dengan beberapa negara-negara aliansinya di kawasan Teluk dengan meningkatkan eksistensinya di kawasan, memproyeksikan kekuatannya, dan kemampuannya menjaga kekuatannya (Cordesman, hal.68,1997). Kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah dapat dilihat dari kekuatannya yang berada di negara-negara Timur Tengah.

Timur Tengah merupakan daerah yang cukup penting bagi Amerika Serikat. Untuk itu, ada lima elemen kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, kebijakan tersebut adalah:

1. Keamanan dan keberlangsungan negara Israel, kebijakan ini di rumuskan oleh Kissinger pada tahun 1970, dimana "Amerika Serikat berkomitmen untuk menjaga eksistensi negara Israel, tetapi tidak pada ekspansi dari Israel.
2. Pemberian beragam bantuan kepada negara-negara Arab.
3. Menghilangkan perbedaan diantara anggota NATO, termasuk antara Amerika Serikat dan anggota aliansinya.
4. Kemungkinan penempatan kekuatan Amerika Serikat dan NATO di Laut Mediteran, dan Teluk Persia, apabila *deterrence* telah gagal

5. Mencegah negara-negara Arab untuk menggunakan minyak sebagai senjata seperti di akhir tahun 1960an. (Fouskas, hal. 69, 2003)

#### **IV.2.1. Unsur Politik**

Secara umum ada dua hal penting yang menjadi prioritas dari kebijakan politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Dua hal tersebut adalah mengenai demokratisasi dan eksistensi dari negara Israel. Nilai-nilai inilah yang coba dimasukan oleh Amerika Serikat untuk menjalankan atau melanggengkan hegemoninya di Timur Tengah. Kedua isu tersebut diupayakan oleh Amerika Serikat agar menjadi suatu nilai ataupun ketentuan yang disetujui oleh masyarakat di Timur Tengah. Karena untuk menciptakan hegemoni yang stabil tentunya diperlukan adanya konsensus nilai-nilai yang disetujui oleh setiap bagian dari sistem hegemoni. Namun semua itu tidak berjalan lancar, karena masih ada ganjalan-ganjalan ataupun kendala yang harus dihadapi oleh Amerika Serikat.

##### **IV.2.1.1. Demokratisasi di Timur Tengah**

Kemenangan liberalisme Barat terhadap Komunisme Timur menimbulkan keyakinan akan berlangsungnya hegemoni dari nilai-nilai demokrasi yang diusung oleh Barat, khususnya Amerika Serikat. Penyebaran demokrasi ini merupakan tujuan utama dari propaganda Amerika Serikat dalam hal ideologi. Demokrasi seakan-akan menjadi nilai yang universal dan semua orang menyetujui nilai tersebut, hal inilah yang diinginkan oleh Amerika Serikat.

Pada bulan April 1990 Sekretaris Negara dalam pemerintahan Bush "senior" menyatakan bahwa "Demokrasi senantiasa berada dibalik setiap kebijakan". Kemudian ia melanjutkan "presiden Bush telah merumuskan misi baru kita untuk melakukan konsolidasi dan mempropagandakan demokrasi". Misi ini kemudian dilanjutkan oleh presiden Clinton yang pada pidato kampanyenya tahun 1992, ia berulang kali mengatakan bahwa propaganda demokrasi akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya dan, berkaitan dengan kebijakan asing, demokratisasi menjadi topik sentral dalam kampanyenya. Janjinya dikampanye direalisasikan dengan menaikkan anggaran Sumbangan Nasional untuk Demokrasi 2/3 dari anggaran semula (Huntington, hal. 353, 2004)

Kebijakan ini kembali berlanjut pada pemerintahan George W. Bush "junior". Salah satu elemen kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah proses demokratisasi di kawasan ini. Pada bulan November 2003 George W. Bush berpidato dengan keras tentang perlunya strategi kedepan untuk menciptakan kebebasan, untuk mendukung demokrasi di Timur Tengah (Quandt, hal. 406-407, 2005). Dan untuk melaksanakan agenda tersebut maka Amerika Serikat mengajak negara-negara industri lainnya untuk mendukung pemikirannya.

Presiden Bush mempromosikan demokrasi ke Palestina. Ia mendesak Palestina untuk mendapatkan pemimpin baru yang lebih demokratis. Amerika Serikat mendesak mendiang presiden Palestina Yasser Arafat untuk membagi kekuasaannya yang selama ini terakumulasi pada dirinya. Hal ini terwujud dengan pengangkatan Mahmoud Abbas sebagai Perdana Menteri. Bush berharap dengan menegakan demokrasi di Palestina tersebut maka diharapkan akan menimbulkan efek kuat yang dapat memberikan inspirasi reformasi didunia Islam secara keseluruhan. (Tanthowi, Kompas, 23 April 2003)

Namun demokrasi yang diupayakan oleh Amerika Serikat, khususnya pemerintahan George W. Bush, tidak sejalan dengan harapan yang ada. Sebagai contoh adalah kasus Iraq, dimana presiden Bush menggunakan alasan menegakan demokrasi untuk menginvasi Iraq dan menjatuhkan rezim diktator Saddam. Alasan ini digunakan Bush untuk membantah opini dunia bahwa invasi didorong oleh motivasi ekonomi (minyak) dan hegemoni politik kawasan. Operasi militer yang dijalankan Amerika Serikat dalam menginvasi Iraq sendiri berslogan *Operation Iraqi Freedom*, hal ini menyiratkan upaya Amerika Serikat untuk membebaskan rakyat Iraq dari kediktatoran Saddam Husein. (Tanthowi, Kompas, 23 April 2003)

Jatuhnya rezim diktator Saddam Hussein bukan berarti "kebebasan" bagi rakyat Iraq. Kondisi keamanan di negara tersebut semakin tidak menentu, hampir setiap hari terjadi aksi bom bunuh diri yang meresahkan rakyat Iraq. Bom-bom bunuh diri tersebut umumnya diarahkan kepada militer asing yang ada di Iraq, namun korban warga sipil juga tidak terelakan. Selain itu, terjadinya perpecahan didalam



kelompok-kelompok masyarakat di Iraq juga menimbulkan dampak buruk bagi stabilitas keamanan Iraq dikemudian hari.

Isu demokratisasi di Timur Tengah yang didengungkan oleh Amerika Serikat semakin terlihat tidak konsisten. Amerika Serikat memiliki hubungan baik dengan negara-negara monarki absolut di Timur Tengah. Amerika memiliki hubungan dengan Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, dll. Sementara itu, Amerika Serikat menolak HAMAS yang menjadi pemenang dalam pemilu parlemen tahun 2006 di Palestina, dan juga mengkritik pemilu Iran tahun 2005. Yang tampak disini adalah, isu demokratisasi ini hanya dijadikan alasan untuk menggulingkan lawan-lawan politik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

#### **IV.2.1.2. Eksistensi Israel**

Salah satu kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah eksistensi dari negara Israel. Amerika Serikat berupaya membuat Israel diakui oleh negara-negara tetangganya. Oleh karena itu Amerika Serikat terkesan memonopoli proses perdamaian antara Arab-Israel. Upaya Amerika Serikat untuk menciptakan eksistensi Israel telah lama diupayakan, namun hal tersebut tidak selamanya berjalan mulus karena masih ada negara-negara ataupun *non-state actor* yang menolak eksistensi dari Israel ini.

Kebijakan Amerika Serikat terkait dengan Israel terlihat sangat bias. Prosedur yang bias inilah yang kerap terlihat menjadi karakter kebijakan Amerika Serikat yang direfleksikan lewat praktiknya. Kebanyakan dari teori dalam konstitusi Amerika Serikat lebih fokus kepada bagaimana isu-isu yang terjadi harus diselesaikan (proses), dan bukan pada substansinya yang terkait apa yang harus dilakukan. (Quandt, hal. 1, 2005). Prosedur yang bias inilah yang membuat Amerika Serikat selalu lebih bersikap curiga daripada bersikap kompromistis.

Gencatan senjata tahun 1949 antara Arab-Israel ternyata masih menyisakan berbagai masalah. Sebelumnya, lewat gencatan senjata ini diharapkan akan tercapai kesepakatan final terkait dengan eksistensi negara Israel. Namun masalah yang ada masih teramat kompleks sehingga kesepakatan final belum dapat dicapai. Pada dekade 1950an, dunia diwarnai oleh persaingan antara Amerika Serikat dan Uni

Soviet sehingga masalah inipun menjadi tertunda. Dimasa gencatan senjata yang panjang tersebut muncul beberapa pertanyaan terkait dengan Israel, yakni, apakah negara-negara Arab dapat menerima negara Yahudi didalam lingkungannya? Akankah pengakuan Israel yang disertai dengan jaminan keamanannya dapat berjalan? Akankah negara-negara Arab akan menuntut pengembalian tanah dari ribuan orang yang mengungsi sejak konflik tahun 1948-1949? (Quandt, hal. 2, 2005) Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan sedikit gambaran dari kompleksitas permasalahan yang ada.

Pada prinsipnya, kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel telah tertuang dalam kebijakan yang dirumuskan oleh Kissinger pada tahun 1970an yakni, "Amerika Serikat berkomitmen untuk menjaga eksistensi negara Israel, tetapi tidak pada ekspansi dari Israel".(Fouskas,hal.69,2003). Kebijakan tersebut memperlihatkan eksistensi Israel merupakan prioritas kebijakan yang utama bagi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam kebijakan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat akan berupaya sekuat tenaga, sebagai bentuk komitmen, untuk menjaga eksistensi dari Israel. Namun, Amerika Serikat tidak menginginkan Israel kembali melakukan ekspansi ke negara-negara tetangganya. Inilah prinsip dari kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Untuk itu, Amerika Serikat terus berupaya untuk mendamaikan Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Amerika Serikat juga kerap menjadi mediator dan mendorong berbagai macam perundingan damai Arab-Israel, seperti perjanjian Camp David, Oslo, dll.

Sikap Amerika Serikat yang pro Israel dipengaruhi oleh kuatnya Lobi Yahudi di Amerika Serikat. Salah satu organisasi Lobi Yahudi yang cukup kuat adalah AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*), organisasi ini dibentuk pada tahun 1950an. AIPAC memiliki 100.000 anggota yang tersebar di 50 negara, mereka adalah ujung tombak dalam menghadapi berbagai isu yang dihadapi Israel, seperti mencegah Iran untuk memiliki senjata nuklir, memerangi terorisme dan menciptakan keamanan, dan yang utama adalah memastikan bahwa Israel cukup kuat untuk menghadapi setiap tantangan dari negara manapun di Timur Tengah. Karena itu, surat kabar Amerika Serikat *The New York Times* menyebut AIPAC adalah organisasi

yang paling penting dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Sementara majalah Fortune secara konsisten menyatakan bahawa AIPAC merupakan interest grup paling kuat di Amerika Serikat. (Fayazmanesh, hal. 67, 2008).

Organisasi AIPAC ini sangat berpengaruh dalam proses politik di Amerika Serikat. AIPAC menyumbang sedikitnya US\$ 3.5 juta untuk dana kampanye pemilu Bush-Chaney, melalui sejumlah perusahaan milik kaum Yahudi di Amerika Serikat seperti Kellog, Brown and Root (KBR); Betchel Group; Fluor Corp; Parsons Corp; Louis Berger Group; dan Washington Group International. AIPAC juga ikut berperan dalam menekan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk memenangkan George W. Bush pada pemilu tahun 2000, ketika hasil akhir perhitungan suara pemilu menimbulkan kontroversi. Karena sangat tipisnya perbedaan jumlah suara antara Bush dan saingannya Albert Gore. Hal ini menimbulkan kontroversi, maka pemenang pemilu ditentukan oleh Mahkamah Agung. (Sihbudi, hal. 296, 2007).

Pengaruh AIPAC sangat besar dalam pengambilan keputusan Amerika Serikat, khususnya masalah Timur Tengah. banyak sekali para pengambil keputusan Amerika Serikat yang berada dalam bayangan AIPAC ini. Pada pertemuan rutin tahunan AIPAC pada tahun 2005 yang berlangsung di Washington, organisasi ini menggelar konfrensi perumusan kebijakan terbesar selama berdirinya organisasi ini. Konfrensi ini dihadiri lebih dari 4000 orang aktivis pro-Israel dari 50 negara. Pembicara dari konfrensi ini diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, Senator Hillary Rodham Clinton, Ketua Senat Bill Frist, Pimpinan Senat dari Demokrat Harry Reid, dan juga Nancy Pelosi. Pertemuan ini membahas kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran, khususnya sangsi yang hendak diterapkan bagi negara yang menjadi musuh bagi Israel tersebut. (Fayazmanesh, hal. 68, 2008).

Dalam upayanya untuk mewujudkan eksistensi dari negara Israel, Amerika Serikat melakukan berbagai cara untuk mendamaikan Israel dan negara-negara Arab lainnya. Upaya Amerika Serikat tersebut terlihat dari perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel. Dampak dari perjanjian ini adalah Mesir mengakui eksistensi dari Israel. Karena perjanjian ini juga maka Mesir sempat dikucilkan oleh negara Arab

lainnya. Hal ini menunjukkan kemajuan bagi langkah Amerika Serikat dalam memperjuangkan negara Israel, karena Mesir merupakan negara yang paling keras menentang Israel sebab wilayahnya (Sinai) diakuisisi oleh Israel. Dengan perjanjian Camp David ini maka konflik Israel-Mesir dapat diselesaikan. Dengan perjanjian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Mesir menjadi negara yang tidak lagi mengganggu hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah.

Keberhasilan Amerika Serikat lainnya adalah dengan mendamaikan Israel dengan Yordania. Penandatanganan perjanjian perdamaian antara Yordania dan Israel berlangsung tanggal 26 Oktober 1994 dan disaksikan langsung oleh Bill Clinton. Hal ini merupakan kejadian bersejarah karena hal tersebut menandakan berakhirnya permusuhan yang telah berlangsung sekitar 50 tahun. Dengan berdamai dengan Israel, Yordania berharap akan diterima oleh kalangan negara-negara Barat yang telah mengucilkannya sebagai akibat dari dukungan Raja Hussein bin Talal pada Saddam Hussein dalam invasi Iraq ke Kuwait. Sebagai "imbalan" dari sikap manis Yordania tersebut maka Clinton menjanjikan untuk menghapuskan hutang Yordania senilai puluhan milyar dollar. Hal tersebut melengkapi keberhasilan Amerika Serikat, karena sebelumnya Presiden Arafat dan PLO juga sudah menandatangani perjanjian serupa dengan Israel. Bagi Amerika Serikat peristiwa itu semakin meneguhkan dominasi dan hegemoni politiknya di Timur Tengah. (Sihbudi, 2007, Hal. 132)

Setelah itu, Amerika Serikat kembali menegaskan eksistensi Israel pada negara-negara Timur Tengah lainnya dengan menyelenggarakan *the Middle East and North Africa Economic Summit* (MENA). Konferensi ini dihadiri oleh semua negara Arab yang merupakan sekutu dari Amerika Serikat. Pesan politis yang ingin disampaikan oleh Amerika Serikat dalam forum ini adalah penegasan bahwa Israel sejak saat itu "sudah diterima" oleh para tetangga Arabnya. (Sihbudi, 2007, Hal. 133-134)

Namun, yang masih menjadi kendala dalam upaya Amerika Serikat dalam menjalankan misinya ini adalah masih kerasnya sikap Syria terhadap Israel. Syria merasa kepentingannya belum diakomodir untuk berunding dengan Israel. Syria menginginkan Datran Timggi Golan dikembalikan terlebih dahulu oleh Israel

sebelum melaksanakan perundingan. Israel tidak bersedia melakukan hal tersebut, sehingga permusuhan diantara kedua negara masih tetap berlangsung. Sikap keras kedubelarah pihak inilah yang membuat proses perdamaian keduanya masih belum menemui titik terang.

Syria memegang peranan yang cukup penting dalam peta politik di Timur Tengah, khususnya dalam masalah Israel. Dalam kamus politik dunia Arab ada motto "tidak ada perang tanpa Mesir, tidak ada perdamaian tanpa Syria". Kendati secara militer tidak mampu mengalahkan Israel, namun Syria memiliki kemampuan sebagai "pengganggu" ataupun "perintang" perdamaian Arab-Israel. (Sihbudi, hal. 133-134, 2007). Selain itu, posisi Syria ini tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat dan Israel, karena sikap ini membuat Syria akhirnya menjalin hubungan dengan Iran yang dapat menjadi poros perlawanan terhadap hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah.

Selain belum mampu mempengaruhi Syria, Amerika Serikat juga masih menghadapi kendala yang datang dari Iran dan Libya yang masih bersikap keras atas keberadaan Israel di Timur Tengah. Kendala lain yang tidak kalah pentingnya adalah penolakan dari non-state actor yakni Hizbullah, HAMAS, Jihad Islam, dll. Penolakan ini memberi bukti bahwa Amerika Serikat belum tuntas dalam menanamkan nilai-nilai hegemoninya di Timur Tengah.

#### **IV.2.2. Unsur Militer**

Amerika Serikat menggunakan beberapa negara aliansinya untuk menempatkan kekuatannya militer. negara-negara tersebut adalah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut berguna untuk menjaga pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah serta menjamin berbagai kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kepentingan-kepentingan Amerika Serikat diantaranya adalah minyak dan eksistensi negara Israel, selain itu dari sudut pandang ekonomi, hal ini untuk menjamin kelancaran jalur perdagangannya di Laut Tengah.

Kehadiran Amerika Serikat di Bahrain bermula pada tahun 1971 setelah kedua negara menandatangani persetujuan yang memungkinkan Amerika Serikat

untuk mendukung pasukannya di Timur Tengah dengan memanfaatkan berbagai fasilitas di Bahrain seperti hangar pesawat dan fasilitas untuk memperbaiki peralatannya, termasuk memasang antena serta *transmitter*. Dan pada tahun 1991 Bahrain menandatangani persetujuan untuk memperpanjang kehadiran Amerika Serikat selama sepuluh tahun kedepan. Dan pada 1995 Bahrain menyetujui perjanjian yang memungkinkan Amerika Serikat membangun markas besarnya (*headquarters*) di Bahrain. Amerika Serikat menempatkan sebanyak 3000 pasukannya di Bahrain yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Amerika Serikat juga menempatkan pasukannya di Qatar. Hal tersebut bermula pada saat perang Teluk II dimana Qatar mengizinkan pesawat-pesawat Amerika Serikat mendarat selama terjadinya perang tersebut. Semenjak itu hubungan kedua negara meningkat sehingga pada tahun 1992 terjadi negosiasi antara kedua negara menyangkut akses bagi Amerika Serikat terhadap fasilitas udara maupun laut Qatar. Dari negosiasi pada tahun 1995, maka tercapai sebuah persetujuan dimana Qatar akhirnya bersedia menerima kedatangan kekuatan militer Amerika Serikat berupa 110 buah Tank jenis M-1A2. Selain itu Qatar juga menyediakan sebuah gudang di Doha untuk menyimpan peralatan militer Amerika Serikat. Pada tahun 2005, pasukan Amerika Serikat yang berada di Qatar sebanyak 6540 orang yang terdiri dari 800 personel Angkatan Darat, 230 personel Angkatan Laut, 5.350 personel Angkatan Udara, dan 160 personel Marinir.

Amerika Serikat juga menempatkan pasukannya di Oman. Hal tersebut bermula pada saat krisis didalam negeri Oman, dimana pemerintah Oman direpotkan oleh pemberontak. Oman dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian militer kedua negara pada bulan July 1981, dimana Oman menyediakan akses bagi Amerika Serikat untuk membangun berbagai fasilitas di Seeb, Masirah, Khasab, pangkalan udara di Thumrait, serta pelabuhan di Muscat dan Salalah. (Cordesman, hal. 73, 1997). Dinegara ini Amerika Serikat menempatkan 60 personel Angkatan Laut dan 210 personel Angkatan Udara.

Sementara itu, Amerika Serikat juga menempatkan pasukannya di Kuwait. Kedekatan kedua negara bermula pada saat invasi Iraq ke Kuwait. Amerika Serikat

memainkan peranan penting dalam membangun kekuatan militer Kuwait. Dimana pasukan khusus Amerika Serikat (*US fifth special forces*) melatih sebanyak 6300 tentara Kuwait dan sebanyak 224 orang marinir Kuwait dilatih oleh pasukan khusus angkatan laut Amerika (*US Navy special forces*). (Cordesman, hal. 71, 1997). Perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Kuwait terjadi pada tahun 1991. Sejak saat itu Kuwait menyesuaikan pembangunan fasilitas militernya untuk mendukung pasukan militer Amerika Serikat di Kuwait. Amerika Serikat menempatkan sebanyak 19.700 personel Angkatan Darat, 1.250 Angkatan Laut, 2.700 Angkatan Udara, dan sebanyak 1600 personel Marinir.

Pada tahun 1992 Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab melakukan negosiasi terkait akses bagi militer Amerika Serikat untuk memanfaatkan pangkalan udara serta pelabuhan Uni Emirat Arab. Negosiasi tersebut berakhir pada tahun 1994 dengan bersediannya Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan tersebut. Dengan keberhasilan ini maka Amerika Serikat dapat menempatkan Angkatan Lautnya di Jabal Ali dan Fujirah. Karena letak kedua pangkalan tersebut yang strategis maka dapat mendukung logistik militer Amerika Serikat untuk mencapai kawasan Teluk tanpa melewati selat Hormuz. Selain itu terdapat 1300 personel Angkatan Udara Amerika Serikat di negara ini.

Hubungan militer antara Amerika Serikat dan Arab Saudi berbeda dengan hubungan antara Amerika dengan negara-negara Teluk yang disebutkan terlebih dahulu. Tidak ada perjanjian formal diantara kedua negara ini (Amerika dan Arab Saudi). Namun hubungan militer kedua negara telah berlangsung lama, hal tersebut dimulai pada tahun 1943 dimana militer Amerika Serikat untuk pertama kalinya memakai fasilitas pelabuhan dan pangkalan udara di Dhahran. Pada penghujung tahun 1970 hingga 1980, Arab Saudi meningkatkan fasilitas pangkalan udara serta pelabuhannya untuk menampung kekuatan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. Hubungan antara kedua negara semakin dekat setelah pecahnya Perang Teluk I dimana kedua negara membangun pertahanan udara bersama untuk menghadapi Iran, yang pada saat itu Iraq sedang kewalahan menghadapi serangan Iran. Pertahanan udara tersebut berhasil menembak jatuh pesawat F-4 milik Iran pada 5 Juni 1984.

Sejak Perang Teluk II, Amerika Serikat memperpanjang perjanjian keamanan dengan Arab Saudi. Walaupun tidak bersifat formal, Amerika Serikat dan Arab Saudi memperpanjang perjanjian keamanan untuk meningkatkan akses bagi Amerika Serikat terhadap pangkalan udara maupun pelabuhan. (Cordesman, hal. 72, 1997) Terdapat 300 personel Angkatan Darat dan Angkatan Udara Amerika Serikat di negara ini.

#### IV.2.3. Unsur Ekonomi

Salah satu prioritas utama dari kebijakan pemerintahan George W. Bush adalah "energy security" (keamanan energi). Pandangan tentang keamanan energi ini berawal dari adanya kekhawatiran mengenai krisis energi, yang mulai muncul pada tahun 1990an. Untuk itu maka dibentuklah *National Energy Policy Development Group* (NEPDG). Pada bulan Mei 2001, NEPDG menganalisa mengenai kemungkinan krisis energi bagi Amerika Serikat, memberikan berbagai rekomendasi untuk menghindari krisis energi, dan juga meningkatkan keamanan energi nasional. Rekomendasi dari NEPDG menimbulkan perdebatan diantara para pengambil kebijakan, profesional, jurnalis, akademisi dan berbagai pihak yang terkait dengan masalah keamanan energi. Dari perdebatan tersebut muncul suatu konsensus, yakni:

- Sebelum tahun 2001, Amerika Serikat tidak memiliki kebijakan mengenai energi secara komprehensif, integral, dan strategis. Baik pemerintahan dari Partai Demokrat maupun Republik gagal menyajikan hal tersebut kedalam sebuah kebijakan. Yang dilakukan hanyalah yang bersifat jangka pendek untuk mengatasi krisis yang terjadi pada saat itu saja, dan hal tersebut terbukti tidak mencukupi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran untuk jangka panjang.
- Semenjak tahun 1940, setiap resesi yang diderita oleh Amerika Serikat didahului oleh meningkatnya harga energi. Tidak terkecuali perlambatan ekonomi yang terjadi pada awal tahun 2000.
- Permintaan energi yang meroket pada tahun 1990an. Ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa meningkatnya konsumsi energi biasa terjadi pada



periode dimana harga energi relatif rendah dan stabil, juga pada saat pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.

- Liberalisasi kebijakan energi dapat memfasilitasi efisiensi dan kelancaran alokasi dari sumberdaya. Tetapi, deregulasi seperti ini (liberalisasi) dari minyak, gas alam, dan sektor energi lainnya dapat mengurangi insentif bagi pelaku bisnis untuk berinvestasi dalam skala besar yang dapat membantu kelancaran pasar pada saat terjadi pergolakan permintaan. (Bahgat, hal. 2, 2003)

Terkait dengan hal diatas maka terbentuk solusi yang ditujukan untuk membentuk suatu kebijakan energi sebagai berikut:

- Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, jika hal tersebut dibiarkan terus menerus, maka secara perlahan-lahan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan keamanan nasional. Permintaan dan penawaran harus dijaga secara terus menerus.
- Menghidupkan kembali kepentingan publik dalam efisiensi energi merupakan komponen yang penting bagi kebijakan energi dimasa yang akan datang. Walaupun menjalankan efisiensi energi, Amerika Serikat tetap membutuhkan pasokan energi yang lebih banyak.
- Kebutuhan akan permintaan energi harus didasarkan pada diversifikasi yang berdasarkan dua hal, yakni: memadukan sumberdaya energi dan tempat asal sumberdaya energi.
- Permintaan terhadap energi akan terus memacu produksi dalam negeri. Dan akibatnya, Amerika Serikat akan bergantung kepada produsen dari seluruh dunia. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap peranan energi didalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. (Bahgat, hal. 2, 2003).

Kenyataannya, minyak masih merupakan sumber energi yang utama bagi kebutuhan konsumsi energi didunia. Oleh karena itu, Amerika Serikat harus meningkatkan perdagangan dengan berbagai negara pengekspor minyak dari berbagai kawasan (Amerika Utara, Afrika Barat, dan Teluk) guna menjaga keamanan energi.

Diantara berbagai kawasan tersebut, kawasan Teluk (Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab) sebagai pengeksport minyak masih akan mendominasi pasar energi dunia. Untuk jangka waktu dekat ini, keamanan pasokan minyak dari kawasan Teluk menjadi sangat penting bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. (Bahgat, hal. 3, 2003).

Kawasan Teluk Persia memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Pada tahun 2000, kawasan Teluk memiliki cadangan minyak 627 milyar barel yang merupakan 65% dari total cadangan minyak dunia. Sementara itu, cadangan gas alam di kawasan ini mencapai 1.8 trilyun kaki kubik atau sebesar 34% dari total cadangan dunia. (Bahgat, hal. 20, 2003). Kawasan Teluk yang kaya akan sumber energi ini tentunya menjadi perhatian Amerika Serikat yang utama untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya.

Terkait dengan masalah energi ini maka Amerika Serikat berupaya untuk membangun hubungan dengan negara-negara di kawasan Teluk. Salah satunya adalah dengan Arab Saudi yang merupakan negara penghasil minyak utama di dunia. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi terlihat tidak mendudukan Amerika Serikat sebagai inferior ditengah kebutuhan Amerika Serikat akan energi yang dimiliki oleh Arab Saudi. Pola hubungan kedua negara tersebut lebih kepada simbiosis mutualisme.

Amerika Serikat telah lama menjalin hubungan dengan Arab Saudi. Namun, kerjasama ekonomi dalam skala besar terjadi ketika Raja Abdul Aziz bin Abdurahman bertemu dengan presiden Amerika Serikat waktu itu Franklin D. Roosevelt di Kapal Perang USS Quincy setelah Konferensi Yalta pada bulan Februari tahun 1945. (Long, hal. 47, 1985). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk sebuah wadah kerjasama bernama *the Arabian American Oil Company* (ARAMCO). Kerjasama ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan tentunya membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat Arab Saudi. Sementara bagi Amerika Serikat, kerjasama ini diharapkan dapat menjamin pasokan minyak yang sangat dibutuhkan oleh Amerika Serikat.

Amerika Serikat juga berhasil mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur di Arab Saudi. Salah satu perusahaan konstruksi Amerika Serikat yakni Bechtel Corporation. Perusahaan Amerika ini berhasil membangun beberapa proyek pembangunan yakni: Ghazlan electric generating complex; Hawiya dan Uthmaniya GOSPS (*gas-oil separator plants*); Gedung Ibn Rushd PTA; Pabrik Penyulingan air laut Jeddah; Kota Industri Jubail; Kingdom Trade Centre, Riyadh; King Abdulaziz International Airport, Jeddah; King Fahd International Airport, Propinsi as-Syarqiyah; King Khalid International Airport, Riyadh; Kilang Minyak Ras Tanura I, II and III; Proyek Telekomunikasi TEP-6; Saluran Pipa Trans-Arabian; Gedung Laboratorium Kimia Yanbu. Arab Saudi juga menikmati keuntungan dari kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat. Arab Saudi selalu berupaya untuk mempertahankan pasar minyaknya di Amerika Serikat. Pada tahun 2000, ekspor minyak Arab Saudi ke Amerika Serikat mencapai 1.57 juta barel per-hari. Jumlah tersebut menempatkan Arab Saudi sebagai negara pemasok minyak kedua terbesar setelah Kanada.

Interdependensi ekonomi ini membuat Amerika Serikat tetap menjaga komitmennya bagi keamanan Arab Saudi. Hal ini terlihat pada hubungan militer antar kedua negara. Pakar militer Amerika Serikat berhasil membangun infrastruktur militer di wilayah teritorial Arab Saudi. Perusahaan-persusahan Amerika yang bergerak dibidang pertahanan juga telah berhasil membangun beberapa pangkalan militer di Arab Saudi serta memberikan pengajaran ataupun pelatihan bagi militer Arab Saudi. (Hawali, hal. 19, 2005).

Invasi Amerika Serikat ke Iraq pada tahun 2003 juga terkesan memiliki motif ekonomi yang cukup kuat. Iraq adalah sebuah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua didunia setelah Arab Saudi, cadangan minyak Iraq diperkirakan mencapai 112 milyar barrel, jumlah tersebut belum termasuk sumber-sumber minyak yang belum dieksploitasi di daerah Gurun Pasir Barat. Iraq memiliki 2000 ladang minyak yang semuanya mampu menghasilkan 2.5 juta barrel per-hari. Selain itu, Iraq juga memiliki 12 pabrik penyulingan minyak dengan total kapasitas 677.000 barrel per-hari. Sumber energi yang melimpah di Iraq diperkirakan dapat

memenuhi kebutuhan konsumsi energi Amerika Serikat selama hampir satu abad. (Sihbudi, hal. 154, 2007).

Setelah invasi Amerika Serikat ke Iraq, perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat mendominasi proyek pengelolaan minyak di Iraq. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Exxon Mobile, Conoco Philips, dan Chevron Texaco. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendukung pertambangan minyak juga mendapatkan keuntungan seperti perusahaan Halliburton dan Schlumberger. Selain itu, proyek rekonstruksi pasca invasi juga tentunya menghasilkan proyek bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Pemerintahan George W. Bush mendapatkan persetujuan kongres untuk biaya awal rekonstruksi di Iraq sebesar 2.45 milyar dollar Amerika. Perusahaan Kellog, Brown, and Root (KBR) yang merupakan anak perusahaan Halliburton mendapatkan tender untuk memadamkan api di ladang-ladang minyak Iraq yang terbakar selama invasi. (Sihbudi, hal.157-158, 2007).

Upaya-upaya Amerika Serikat di Iraq maupun di Arab Saudi tentunya ditujukan untuk menciptakan kemandirian energi yang sangat dibutuhkan bagi Amerika Serikat. Bagaimanapun, teknologi eksplorasi energi, modal, dan besarnya konsumsi energi dari Amerika Serikat membuat negara-negara pengekspor minyak di Timur Tengah juga memiliki ketergantungan pada pasar yang luas dari Amerika Serikat. Menurut Robert Keohane (hal. 28, 1984) bahan mentah, sumber modal, dan pasar merupakan unsur yang penting untuk menciptakan hegemoni. Interdependensi ekonomi yang terjadi antar negara pengekspor dan pengimpor minyak membuat hubungan kedua pihak tampak seimbang dan saling membutuhkan antara satu dan lainnya.

#### **IV.3. Perebutan Pengaruh Dan Hegemoni Antara Iran dan Amerika Serikat**

Hegemoni adalah sebagai bentuk luar dari ekspansi hegemoni nasional yang dilakukan kelas dominan dalam suatu negara. Penyebaran nilai-nilai yang diusung oleh sebuah negara merupakan bentuk luar dari ekspansi hegemoni nasional.(Cox, hal. 137, 1996) Penyebaran nilai-nilai kepada pihak lain diharapkan dapat diterima sebagai suatu konsensus yang mendasari terbentuknya Blok Historis. Keberhasilan dari suatu Blok Historis ditentukan dari upaya penciptaan kepemimpinan nilai-nilai

intelektual, moral ataupun ideologi. Proses penyebaran ini bisa dilakukan lewat institusi agama, media massa, dan institusi-institusi sosial lainnya. (Suseno, hal. 188, 2003)

Permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran yang terjadi dewasa ini bermula pada tahun 1979, pada saat terjadinya Revolusi Islam Iran. Dengan meletusnya Revolusi Islam dan juga penyanderaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, maka menandakan berakhirnya hubungan baik kedua negara yang sebelumnya memiliki kedekatan secara diplomatik ini. Berbagai upaya dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengganti sistem Islam di Iran. Upaya dari Amerika Serikat ini menandai adanya benturan-benturan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Iran juga terus bertahan dari berbagai serangan baik lewat embargo dan sanksi ekonomi maupun pengucilan secara diplomatik terhadap Iran yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Krisis antara Iran dan Amerika Serikat bermula pada saat tragedi penyanderaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran. Kasus ini berdampak pada putusnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Setelah terjadinya penyanderaan ini, Amerika Serikat membekukan berbagai aset Iran di Amerika Serikat senilai 12 milyar dollar Amerika. Di sisi lain, rakyat Iran meminta agar Amerika Serikat memulangkan bekas Shah Iran untuk diadili di Iran. Semenjak saat itu, berbagai konflik mewarnai hubungan kedua negara.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran semakin memburuk pada saat terjadinya Perang Teluk I tahun 1980. Perang ini bermula dari invasi Iraq ke Iran terkait klaim Saddam terhadap daerah Shatt el-Arab. Pada 17 September 1980, Iraq membatalkan secara sepihak perjanjian Algier tahun 1975. Saddam Husein membatalkan perjanjian ini dan menganggap bahwa daerah Shat el Arab "mutlak milik Iraq dan mutlak milik Arab".

Kemudian pada 22 September 1980 pasukan Iraq menginvasi Iran. Lima hari setelah invasi tersebut, Amerika Serikat mengirimkan 4 buah AWACS (*airborne warnings and control system*) dan juga ratusan personel ke Saudi Arabia yang merupakan aliansi utama dan juga penyandang dana bagi Iraq. Hal ini menimbulkan

kecurigaan dari Iran bahwa terjadi kolusi antara Saddam Hussein dan Amerika Serikat. Kecurigaan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Iran saat itu Mohammed Ali Rajai dalam pidatonya di PBB pada 17 Oktober 1980. Rajai mengatakan "Imperialis Amerika Serikat telah membantu secara langsung maupun tidak langsung pemerintah Ba'atis di Iraq, dengan mengirimkan AWACS ke Saudi Arabia untuk memantau pergerakan pasukan Iran." (Fayazmanesh, hal. 24-25, 2008) AWACS adalah sebuah radar yang cukup canggih untuk mendeteksi berbagai gerakan tentara musuh.

Setelah memulai serangan pada tahun 1980, Iraq dengan cepat menguasai wilayah Khuzestan milik Iran. Provinsi ini kaya akan cadangan minyak dan fasilitas penyulingan. Iraq berupaya untuk memprovokasi masyarakat di wilayah ini dengan menyebut wilayah ini sebagai "Arabistan". Namun upaya ini gagal, pasukan Iraq mendapatkan perlawanan yang hebat dari pasukan Iran. Pada tahun 1982 pasukan Iran bukan hanya merebut Khuzestan, tetapi mulai masuk ke dalam wilayah teritori Iraq. Kemenangan Iran ini tentunya tidak bisa diterima oleh Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat waktu itu, Caspar Weinberger menyatakan "Kemenangan Iran ini bukanlah kepentingan nasional kami." Melihat kemenangan Iran ini, maka Amerika Serikat berupaya mempertahankan posisi Saddam Hussein yang mulai terganggu. Untuk itu, Amerika Serikat mengeluarkan Iraq dari daftar teroris dan mencabut sanksi perdagangan dengan Iraq. Dampak dari kebijakan ini adalah Iraq dapat membeli beberapa pesawat jet dan helikopter dari Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan informasi-informasi intelijen kepada Iraq selama berlangsungnya peperangan. (Fayazmanesh, hal. 29-30, 2008)

Dukungan Amerika Serikat kepada Iraq semasa Perang Teluk terlihat jelas pada berbagai aksi Amerika Serikat di Teluk Persia. Satu sisi, Amerika Serikat bersedia mengawal kapal-kapal tanker milik Iraq maupun sekutunya agar tidak diserang Iran. Namun, disisi lain Amerika Serikat membiarkan Iraq untuk menyerang tanker-tanker milik Iran dan Iran tentunya membalas serangan-serangan tersebut. Tahun 1987, Amerika Serikat menyerang kapal Iran di Teluk Persia, serangan tersebut menyebabkan cedera dan terbunuhnya beberapa pelaut Iran. Selain itu,

Amerika Serikat juga berhasil menenggelamkan kapal patroli Iran dan juga menembak jatuh pesawat tempur Iran F-14. Presiden Iran saat itu, Khamenei mengatakan "Kehadiran Amerika Serikat di Teluk merupakan pertanda perang...seluruh kapal tempurnya dalam armada yang besar ini bukanlah untuk pertahanan, melainkan untuk invasi." (Fayazmanesh, hal. 39, 2008). Hal tersebut membuktikan bahwa kekuatan Amerika Serikat di Teluk bukan hanya untuk mengamankan transportasi minyak di Teluk Persia, tetapi juga untuk menyerang Iran.

Pasca Perang Teluk I Iran menghadapi masalah dalam peralatan militernya, dimana Amerika Serikat tidak bersedia menyediakan suku cadang bagi peralatan militer Iran. Sebagian peralatan militer Iran berasal dari Amerika Serikat. Hal tersebut membuat Iran membangun sendiri industri militernya. Setelah berakhirnya Perang Teluk I, Iran harus membangun kembali negaranya yang tentunya menelan biaya yang sangat besar. Ditengah situasi seperti ini, Iran juga harus menghadapi embargo ekonomi yang menyebabkan terbatasnya pendapatan Iran dan inflasi yang sangat besar mencapai 50 %, ditambah lagi dengan sikap Kuwait dan Uni Emirat Arab yang memproduksi minyak diluar batas *quota* yang menyebabkan turunnya harga minyak pada saat itu yang tentunya memberikan kerugian bagi Iran.

Hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat memang telah putus setelah terjadinya Revolusi Islam Iran dan kasus penyanderaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran tahun 1979. Walaupun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik, namun hubungan ekonomi kedua negara masih berlanjut. Hal ini terlihat pada kenyataan bahwa Amerika Serikat tetap mengimpor minyak dari Iran. Selain itu, Halliburton yang merupakan perusahaan Amerika Serikat, lewat anak perusahaannya menjual jasa untuk mengeksplorasi minyak di Iran.(Crane,et al, hal. 70, 2008). Setelah meninggalnya Imam Khomeini, Iran cenderung mengarah pada *detente policy* atau peredaan ketegangan. Sebelumnya pada masa Khomeini, Iran dikenal sebagai negara radikal dengan slogan-slogan ekspor revolusi. Namun pasca meninggalnya Khomeini, Iran merubah sikap kerasnya namun secara prinsip Iran tetap mengusung Islam sebagai landasan bernegaranya. Iran juga cukup berhasil menciptakan citra yang baik bagi negara-negara di Timur Tengah dan Eropa dengan

bersikap netralnya pada saat terjadi Perang Teluk II tahun 1991 antara Amerika Serikat dan Iraq.

Sikap pragmatisme Iran ini memberikan hasil pada hubungan Iran dengan negara-negara Timur Tengah dan Eropa. Sekalipun Iran mulai mengubah sikapnya, tetapi prinsip Republik Islam Iran terkait dengan pengakuan Israel tetap tidak berubah. Iran menjadi satu-satunya negara Timur Tengah non-Arab yang masih menolak segala bentuk kompromi dengan Israel. Oleh sebab itu, Amerika Serikat dibawah pemerintahan Bill Clinton saat itu menekan para sekutu Baratnya untuk tidak menjalin kerjasama apapun dengan Teheran. Selain itu, Clinton juga terus berupaya untuk menjatuhkan rezim di Iran. Pada 30 April 1995, Clinton juga menyatakan akan memutuskan segala bentuk hubungan perdagangan dan investasi dengan Iran, termasuk pembelian minyak dari Iran yang mencapai 4 milyar dollar per tahun. Amerika Serikat melakukan itu semua karena, menurut Amerika Serikat menuduh Iran sebagai negara pendukung terorisme, dan juga Iran dianggap tengah mengembangkan senjata nuklirnya. (Sihbudi, hal. 133-134, 2007).

Pada 5 Agustus 1996, Presiden Amerika Serikat waktu itu Bill Clinton memutuskan untuk menandatangani Akta d'Amato atau undang-undang anti-Iran dan Libya (ILSA, *Iran-Libya Sanction Act*). Undang-undang ini diusung oleh senator dari Partai Republik, Alfonso d'Amato, undang-undang ini menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan asing manapun yang menanamkan modalnya di sektor minyak dan gas bernilai diatas 40 juta dollar di Iran ataupun Libya. Undang-undang ini ditentang oleh sejumlah negara sekutu Amerika Serikat sendiri Uni Eropa, Jepang, dan Australia. (Sihbudi, hal. 140, 2007).

Tuduhan Amerika Serikat bahwa Iran merupakan negara pendukung terorisme dapat mengganggu posisi Iran. Mengingat Iran sedang memperbaiki hubungannya dengan negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Iran saat itu secara perlahan-lahan berhasil memperbaiki hubungannya dengan sejumlah negara di Timur Tengah seperti Kuwait, Qatar, dan juga Mesir. (Sihbudi, hal. 135, 2007). Perbaikan hubungan Iran dengan negara-negara tetangganya juga terlihat pada saat terpilihnya Presiden Iran, Muhammad Khatami pada tahun 2001. Pada saat itu, pemimpin-pemimpin



negara Arab memberikan ucapan selamat kepada Khatami. Pemimpin-pemimpin Arab tersebut adalah Presiden Mesir Hosni Mubarak, Emir Qatar Sheikh Hamd Bin Khalifah At Thani, Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, Presiden Sudan, Omar Hassan Bashir, Presiden Syria, Bashar Al Asad, dan Abdullah Bin Abdul Aziz yang pada saat itu masih menjadi putera mahkota kerajaan Arab Saudi. (Rahman, hal.171, 2003).

Isu tentang Israel memang menjadi sebuah masalah yang sulit dipecahkan diantara Iran dan Amerika Serikat. Sikap Iran yang cenderung untuk memilih peredaan ketegangan juga ternyata belum bisa diterima oleh Amerika Serikat sebelum Iran mau mengakui Israel. Tetapi Iran sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan dan keadilan tentunya tidak bisa menerima eksistensi negara Israel. Sementara Amerika Serikat, bagaimanapun tetap akan terus menjaga eksistensi dari negara Israel. Eksistensi Israel adalah sebuah ancaman bagi kepentingan Iran di kawasan.

Terkait dengan masalah keamanan, Iran berusaha untuk meyakinkan negara-negara di Timur Tengah khususnya negara Arab di kawasan teluk untuk membangun keamanan bersama tanpa adanya intervensi asing. Namun hal tersebut dicurigai adalah sebagai bentuk upaya Iran untuk kembali memegang kendali kawasan teluk mengingat Iran adalah negara *major power* di kawasan. Negara-negara Arab Teluk berusaha untuk melibatkan Syria dan Mesir untuk menjadi *counterbalance* bagi Iran. Presiden Mesir, Hosni Mubarak melihat ini merupakan sebuah peluang bagi Mesir untuk mulai masuk ke kawasan teluk. Nabil Fahmi yang merupakan Duta Besar Mesir di Amerika Serikat menyatakan "Negara-negara teluk tidak mau bergantung dengan Iraq untuk mengimbangi Iran. Oleh karena itu, kami melihat harus ada negara Arab lain untuk mengimbangi Iran, dengan kata lain Syria dan Mesir yang dapat mengimbangi Iran dalam konflik non-strategis." (Parsi, hal. 146-147, 2007).

Kekalahan Iraq pada Perang Teluk II dari Amerika Serikat, memberikan kesempatan sekaligus ancaman bagi Iran. Satu sisi, Iran memang cukup diuntungkan dengan lemahnya Iraq, karena Iraq juga merupakan ancaman tersendiri bagi Iran. Selain itu, Uni Soviet juga sudah runtuh dengan berakhirnya perang dingin.

Runtuhnya Uni Soviet ini membuat Iran tidak lagi berkonsentrasi ke wilayah Utara dan dapat lebih fokus pada kawasan Timur Tengah, karena memang ancaman tampaknya datang dari kawasan Timur Tengah. Dengan kemenangannya atas Iraq maka Amerika Serikat juga menjadi kekuatan penting di Timur Tengah. Kekhawatiran ini diungkapkan oleh penasihat Presiden Iran pada masa Khatami (1997-2005) Mohammad Reza Tajik, ia mengatakan "Hal ini (kekuatan Amerika Serikat) memberikan dampak yang krusial dalam pemikiran kami. Amerika Serikat menjual lebih banyak senjata ke negara-negara Arab, dan akhirnya Amerika Serikat menjadi negara hegemon di kawasan. Sebagai konsekuensinya, Iran berada dibawah ancaman Amerika Serikat secara langsung." Untuk itu, Iran membangun persenjataannya lebih kepada pola bertahan, sebagai respon dari ancaman Amerika Serikat. (Parsi, hal. 143, 2007).

Bagi Iran, Amerika Serikat merupakan ancaman yang utama karena Amerika Serikat berhasil meningkatkan hubungan militer dengan negara-negara teluk seperti Bahrain, Qatar, Uni Emirat, dan Arab Saudi. Posisi dari negara-negara tersebut secara geografis berbatasan dengan Iran, dan hanya dipisahkan oleh Teluk Persia. Namun, Iran tidak melihat Israel sebagai ancaman bagi keamanan Iran secara langsung. Israel bukanlah ancaman secara militer bagi Iran, melainkan hanyalah sebuah ancaman dalam bidang politik terhadap kepentingan Iran dan penyebaran pengaruh di kawasan Timur Tengah. Israel selalu berupaya untuk mensabotase posisi Iran di kawasan. (Parsi, hal. 145, 2007). Israel memang kerap menuduh Iran mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan militer, tetapi hingga saat ini belum ada bukti yang kuat mendukung tuduhan Israel tersebut.

Amerika Serikat dimasa pemerintahan George W. Bush semakin memperlihatkan sikap yang keras terhadap Iran. Amerika Serikat juga semakin membuat suasana kawasan Timur Tengah memanas setelah Bush di tahun 2002 kembali menyatakan bahwa dua negara Timur Tengah yakni Iran dan Iraq masuk dalam daftar "*axis of evil*" (poros kejahatan) bersama Korea Utara. Amerika Serikat memang kerap menyudutkan negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya dengan menyebut "*Axis of Evil*". Pada tahun 2003, Amerika Serikat

menginvasi Iraq dan menjatuhkan Rezim Saddam Hussein. Bush memang kerap menggunakan kemampuan *hard power* dalam kebijakan luar negerinya, khususnya di Timur Tengah. Invasi yang dilakukan Amerika Serikat dibawah pemerintahan Bush setelah tragedi 11 September atas Afghanistan dan Iraq menunjukkan bahwa Amerika Serikat memang cenderung menggunakan kekuatan koersifnya.

Sikap Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militernya terbukti memperburuk citra Amerika Serikat di dunia, khususnya di Timur Tengah. Iran secara jelas menolak serangan militer ke Iraq. Berbeda dengan Perang Teluk II, negara-negara di Timur Tengah kini tidak bersedia mendukung upaya garis keras dari Amerika Serikat terhadap Iraq. Dalam Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat di Doha, Qatar pada 5 Maret 2003, negara-negara anggota Organisasi Konfrensi Islam (OKI) satu suara dalam menolak upaya militer Amerika Serikat ke Iraq. Bahkan lebih lanjut, anggota OKI juga menolak setiap ancaman terhadap keamanan negara Islam manapun. Suara OKI ini juga sejalan dengan hasil KTT Liga Arab maupun Gerakan Non-Blok (GNB) yang telah diselenggarakan sebelumnya. Menyinggung ancaman Amerika Serikat untuk menggulingkan Rezim Saddam Hussein dan "menata kembali" peta Timur Tengah, para pemimpin OKI dengan tegas menentang setiap usaha memaksakan perubahan di kawasan ini dan menentang campur tangan pihak luar terhadap urusan internal mereka. (Sihbudi, 147, 2007).

Sikap anggota OKI yang menolak adanya campur tangan asing dalam mengupayakan perubahan ini menunjukkan adanya keuntungan bagi Iran karena memang Iran selama ini menolak kehadiran pasukan asing di Timur Tengah. Namun, semua itu tampak hanya sebatas penolakan saja, negara-negara OKI belum berani melakukan pembelaan secara militer terhadap kekuatan asing yang menginvasi negara Islam lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada satu kekuatan militer dari negara OKI untuk menghalau serangan Amerika Serikat ke Iraq pada tahun 2003. Invasi Amerika Serikat ini berdampak pada jatuhnya Rezim Saddam Hussein di Iraq.

Amerika Serikat terus memperburuk citra Iran di kawasan Timur Tengah. Iran masuk kedalam list "poros kejahatan" karena Amerika Serikat menilai Iran mendukung kelompok teroris bahkan dituduh memiliki hubungan dengan Al-Qaeda.

Selain itu Iran juga dituduh sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Di tahun 2004, Raja Abdullah II dari Yordania mengingatkan adanya "Bulan Sabit Syiah" dibawah pengaruh Iran. Raja Abdullah II menggunakan istilah ini untuk menggambarkan peta kekuatan kaum Syiah di Timur Tengah. "Bulan Sabit Syiah" ini meliputi negara-negara Iraq (mayoritas penduduknya Syiah dan juga berpeluang untuk berkuasa setelah jatuhnya Rezim Saddam Hussein), Syria (pemerintahnya menganut Syiah Alawi), dan Lebanon (kelompok Hizbullah yang beraliran Syiah). "Bulan Sabit Syiah" yang diyakini dibawah pengaruh Iran ini dinilai menjadi ancaman bagi rezim-rezim Sunni di Timur Tengah, mengingat masyarakat Syiah juga ada di negara-negara seperti Bahrain dan Arab Saudi yang pemerintahnya bermazhab Sunni. (Visser, hal.1, 2009). Raja Yordania, Abdullah II pada tahun 2005 juga menyatakan bahwa "Iran, Suriah, dan Hizbullah menjadi ancaman terbesar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah". (Media Indonesia, 24 Maret 2005). Dari pernyataan tersebut maka terlihat masih ada kecurigaan kepada Iran. Penentangan Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat tidak sepenuhnya disetujui dan didukung oleh seluruh negara di Timur Tengah, hal tersebut terbukti dengan adanya pernyataan dari Raja Yordania tersebut yang menyebutkan Iran dapat membahayakan stabilitas kawasan Timur Tengah.

Pada tahun 2006, George W. Bush menuduh Iran berada di balik kekacauan yang terjadi di Iraq pasca jatuhnya Rezim Saddam. Bush mengatakan "Teheran bertanggungjawab atas meningkatnya serangan terhadap pasukan koalisi, dengan menyediakan pelatihan bagi para militan Syiah untuk membuat alat peledak di Iraq" (Jafarzadeh, hal. 58, 2007). Iran memang kerap dikaitkan dengan masalah stabilitas di Iraq. Iran memang memiliki hubungan dengan kelompok Syiah di Iraq, namun keterkaitan Iran dengan instabilitas di Iraq belum bisa dibuktikan oleh Amerika Serikat sendiri.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran mulai bertambah setelah terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad sebagai Presiden Iran pada tahun 2005. Ahmadinejad sendiri merupakan seorang tokoh yang menurut Barat berhalauan ultra konservatif. Ahmadinejad dianggap akan membawa Iran kembali seperti pada masa

Khomeini (1979-1989). Ahmadinejad memang cukup keras pada Amerika Serikat dan Israel. Ahmadinejad juga kerap melontarkan isu untuk menghapus Israel dari peta dunia. Untuk itu, maka ia juga mempertanyakan kebenaran *holocaust* yang dianggap sebagai dalih bagi kaum Yahudi untuk menduduki tanah Palestina. *Holocaust* adalah peristiwa pembantaian etnis Yahudi oleh Hitler pada masa Perang Dunia ke II.

Pada Oktober 2005, Ahmadinejad menyerang undang-undang yang diberlakukan oleh negara-negara Eropa yang melarang siapapun menolak kejadian *holocaust*. Ahmadinejad mengatakan "Negara-negara Eropa harus mengganti kesalahan mereka kepada kaum Yahudi dengan memberi tanah mereka untuk mendirikan negara yahudi di Eropa, Amerika Serikat, Kanada, atau Alaska daripada bangsa Palestina yang harus membayar kejahatan ini". (Labib, et al, hal. 171-172, 2006).

Ahmadinejad melihat bahwa *holocaust* menjadi dasar dari berdirinya negara Israel. Untuk itulah, maka Ahmadinejad mempertanyakan kebenaran dari peristiwa tersebut. Negara-negara Eropa menganggap setiap penelitian ataupun sikap menentang *holocaust* ini sebagai tindakan kriminal. Beberapa orang yang mencoba meneliti masalah ini dipenjarakan oleh pemerintah negara-negara Eropa. Peneliti-peneliti tersebut diantaranya adalah; ahli sejarah asal Inggris, David Irving; peneliti Perancis, Robert Faurisson; dan ilmuwan Jerman, Fredrick Toeben. Jelas ada sesuatu yang hendak disembunyikan oleh negara-negara Eropa tentang *holocaust* ini.

Terkait dengan *holocaust*, Iran membuat sebuah festival kartun *holocaust*. Hal ini ditujukan untuk merobohkan pandangan Barat soal *holocaust*. Ternyata upaya Iran ini mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat dunia, terbukti ada 62 kartunis dari berbagai negara ambil bagian dalam festival ini. Ini membuktikan bahwa ide yang diusung Iran bisa diterima oleh masyarakat lain. Apresiasi yang cukup meriah ini membuat Sekjen PBB waktu itu, Kofi Annan mengancam festival tersebut dengan menyatakan bahwa *holocaust* adalah kenyataan sejarah dan tidak dapat dibantah. Setelah itu, pada Desember 2006, Iran menggelar konferensi mengenai *holocaust* di Teheran. Konferensi ini dihadiri oleh 67 ahli dan peneliti dari 30 negara. Kebanyakan

peserta konferensi berpendapat hampir sama, yakni menyangkal kebenaran *holocaust*. (Junaedi, hal. 31, 2007).

Masalah *holocaust* yang diajukan oleh Ahmadinejad ini membuat negara Eropa, Amerika Serikat, dan Israel semakin menaruh pandangan negatif terhadap pemimpin Iran ini. Karena, dibalik itu semua, tampak adanya upaya dari Ahmadinejad untuk mengganggu pemikiran dari negara-negara di dunia terkait dengan pengakuan eksistensi dari negara Israel. Ini adalah suatu nilai yang coba disebarakan oleh Ahmadinejad, seperti juga halnya pernyataan Bush terkait dengan terorisme. Baik Iran maupun Amerika Serikat dan Israel juga kerap menyebarkan nilai-nilai, dan ini adalah salah satu upaya mencapai hegemoni di kawasan Timur Tengah. Salah satu unsur yang terpenting dalam hegemoni adalah adanya suatu konsensus nilai-nilai dalam suatu aliansi.

Pada 24 Maret 2007, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi No 1747. resolusi itu memberi sanksi ekonomi terhadap Iran jika terus mengembangkan proyek nuklirnya. Iran diberi kesempatan selama 60 hari untuk menghentikan program nuklirnya. Menteri Luar Negeri Iran, Manoucher Mottaki, saat pidato didepan Dewan Keamanan PBB menetapkan sikapnya untuk terus melanjutkan program nuklirnya. Mottaki mengatakan bahwa Iran bukanlah negara agresor. Dia mengemukakan, dirinya dapat meyakinkan bahwa tekanan dan intimidasi tidak akan membuat kebijakan Iran untuk mengembangkan nuklir menjadi berubah. (Junaedi, hal. 40, 2007).

Dalam beberapa kesempatan Pemerintah Iran sering menyatakan bahwa program nuklir Iran untuk tujuan damai. Bahkan, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khamenei telah mengharamkan pengembangan senjata nuklir. Badan dunia yang menangani masalah nuklir yakni IAEA juga tidak bisa menemukan bukti bahwa Iran berupaya untuk menciptakan senjata nuklir. Namun, Amerika Serikat dan Israel tetap berupaya meyakinkan negara lainnya bahwa Iran memang memiliki niat untuk membangun senjata nuklir.

Ditengah upaya kampanye dari Amerika Serikat dan Israel untuk mengucilkan Iran, Ahmadinejad ternyata dapat diterima oleh negara-negara yang berseberangan

dengan Amerika Serikat. pada awal tahun 2007, Ahmadinejad berkunjung ke beberapa negara di Amerika Latin seperti Venezuela, Nikaragua, dan Ekuador. Ahmadinejad bahkan mendapat dukungan dari pemimpin Venezuela, Hugo Chavez. Selain itu, Ahmadinejad juga berupaya untuk merangkul China dan Russia.

Iran memang lebih dapat diterima oleh negara ataupun kelompok yang sudah jenuh dengan hegemoni Amerika Serikat. Iran perlahan-lahan dapat melakukan terobosan dengan membangun hubungan dengan negara-negara yang berseberangan pendapat dengan Amerika Serikat. Iran mampu memainkan peranan yang cukup baik sebagai negara penantang Amerika Serikat. Peranan Iran ternyata dapat menarik perhatian negara-negara yang memang tidak menyukai keangkuhan Amerika Serikat.

#### **IV.4. Prospek Kawasan Timur Tengah Ditengah Persaingan Antara**

##### **Iran dan Amerika Serikat**

Proses perebutan pengaruh dan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat tentunya masih akan berlangsung. Dikarenakan sifat dari aliansi yang dibangun oleh Amerika Serikat masih terlihat cair. Tidak selamanya seluruh negara ataupun kelompok masyarakat di kawasan Timur Tengah mendukung seluruh kebijakan dari Amerika Serikat. Invasi Amerika Serikat ke Iraq menuai banyak kekecewaan dari negara-negara di Timur Tengah. Liga Arab dengan tegas menolak penggunaan kekuatan militer atas Iraq. Cairnya aliansi yang dibangun oleh Amerika Serikat karena dominannya unsur militer atau keamanan. Karena kekuasaan yang mantap harus atas dasar pengakuan rela mereka (anggota Blok Historis) dan bukan pada dayaancam yang kuat. (Suseno, hal.189, 2003).

Amerika Serikat belum berhasil menanamkan nilai-nilai yang dapat dijadikan konsensus bagi anggota-anggota aliansi. Demokratisasi tentunya akan ditolak oleh negara-negara yang membangun aliansi dengan Amerika Serikat karena kebanyakan dari mereka adalah negara monarki absolut dan negara yang sistem pemerintahannya bersifat otoriter. Universalitas dari nilai-nilai demokrasi ternyata masih harus dipertanyakan. Karena menurut Gramsci (Suseno, hal. 189, 2003) ciri kekuasaan lewat hegemoni bahwa kekuasaan itu tertanam dalam keyakinan-keyakinan, cita-cita, dan pandangan-pandangan normatif seluruh masyarakat. Belum mampunya Amerika

Serikat untuk menciptakan nilai-nilai universal dalam Blok Historisnya membuat hegemoni Amerika Serikat belum sepenuhnya mapan. Kemungkinan berkurangnya pengaruh hegemoni dari Amerika Serikat sangat mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Sementara itu, Iran juga belum dapat sepenuhnya bisa menggantikan posisi dari Amerika Serikat. Iran sebagai negara penantang masih melakukan proses untuk dapat menciptakan hegemoni di kawasan Timur Tengah. Kekhawatiran dan kecurigaan terhadap Iran masih tetap ada bagi negara-negara di Timur Tengah. Iran kerap dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme. Selain itu, Iran juga menganut Islam Syiah, sementara mayoritas rezim yang berkuasa di Timur Tengah menganut mazhab Sunni. Selain itu, Iran belum memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang cukup kuat. Ini menyebabkan Iran belum bisa menjadi tempat bergantung bagi negara-negara lainnya. Kemapanan kekuasaan harus berdasarkan atas dialektika antara paksaan (*dominio*) dan konsensus (*egemonia*).

Namun, Iran berhasil mendapatkan simpati dari kelompok ataupun negara yang anti Amerika Serikat. Iran berhasil mendapat dukungan dari berbagai kelompok seperti HAMAS dan Hizbullah. Selain itu, Iran juga berhasil membangun hubungan dengan Venezuela, Syria, dan Sudan. Iran mampu menarik simpati dari negara-negara yang jenuh dengan kediktatoran Amerika Serikat. Peranan Iran dikawasan Timur Tengah tentunya tidak bisa diabaikan. Keberhasilan Iran mendapatkan simpati ini adalah karena ide, pandangan, ataupun cita-cita yang diusung oleh Iran (Islam, menolak Israel, dan menolak intervensi asing) terbukti dapat diterima oleh sebagian kelompok ataupun negara sehingga dapat membentuk suatu Blok Historis yang lebih stabil daripada Blok Historis yang dibentuk oleh Amerika Serikat.

Sekalipun suatu aliansi yang dibangun atas dasar kesamaan cita-cita, pandangan normatif, dan ideologi yang sama. Namun unsur militer tetap dibutuhkan untuk menjaga eksistensi dari aliansi tersebut. Dalam hal ini, Iran tampak telah melakukan peningkatan kekuatannya. Peningkatan kekuatan militer Iran sejauh ini lebih bersifat *deterrence*, sebagai contoh adalah upaya Iran mengembangkan rudal balistik. Dengan pola *deterrence* ini menunjukkan bahwa,



sekalipun Iran belum dapat menandingi kekuatan militer Amerika Serikat, namun dengan memiliki *deterrence* yang cukup maka eksistensi Iran akan tetap terjaga dan sanggup juga untuk memberikan keamanan bagi aliansinya.

Eksistensi dari negara Israel menjadi salah satu titik persinggungan yang utama bagi hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Israel merupakan salah satu kepentingan bagi Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika Serikat berupaya untuk menjaga eksistensi dari Israel. Sementara Iran, semenjak tahun 1979 hingga saat ini merupakan negara yang paling keras menolak eksistensi dari Israel. Penolakan Iran atas eksistensi dari Israel menjadi ganjalan bagi hubungan antara Iran dan Amerika Serikat.

Semenjak tahun 1970 Amerika Serikat berkomitmen untuk menjaga eksistensi dari Israel, namun tidak pada ekspansi dari negara Yahudi ini. (Fouskas, Hal. 69, 2003). Ini menunjukkan batasan dari Amerika Serikat kepada Israel untuk tidak melakukan ekspansi lagi. Untuk itu, maka Amerika Serikat gencar melakukan pendekatan-pendekatan kepada negara-negara di Timur Tengah untuk mau mengakui Israel. Upaya mendamaikan Israel dengan negara-negara tetangganya menjadi agenda penting bagi Amerika Serikat.

Sementara itu, Iran yang secara tegas menolak eksistensi Israel dan hanya menganggap Israel sebagai saingan dalam hal politik saja. Iran tidak menganggap Israel membahayakan bagi eksistensi Iran. Berbagai pernyataan dari Iran mengenai Israel, selama ini baru sebatas tindakan provokasi saja, seperti masalah *holocaust* yang diungkapkan oleh Ahmadinejad. begitu pula dengan Israel, pernyataan-pernyataan untuk menyerang Iran baru sebatas ancaman-ancaman saja. Selain itu, kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran seperti Hizbullah dan HAMAS juga belum mampu mengganggu eksistensi dari Israel. Sejauh kondisi ini masih berlanjut dan tidak ada perubahan yang signifikan, maka peperangan antara Iran dan Amerika Serikat tidak terjadi.

Republik Islam Iran tetap tidak akan menerima eksistensi dari negara Israel. Terpilih kembalinya Ahmadinejad sebagai presiden Iran untuk periode 2009-2013, menunjukkan tidak akan ada perubahan secara signifikan dari politik luar negeri Iran

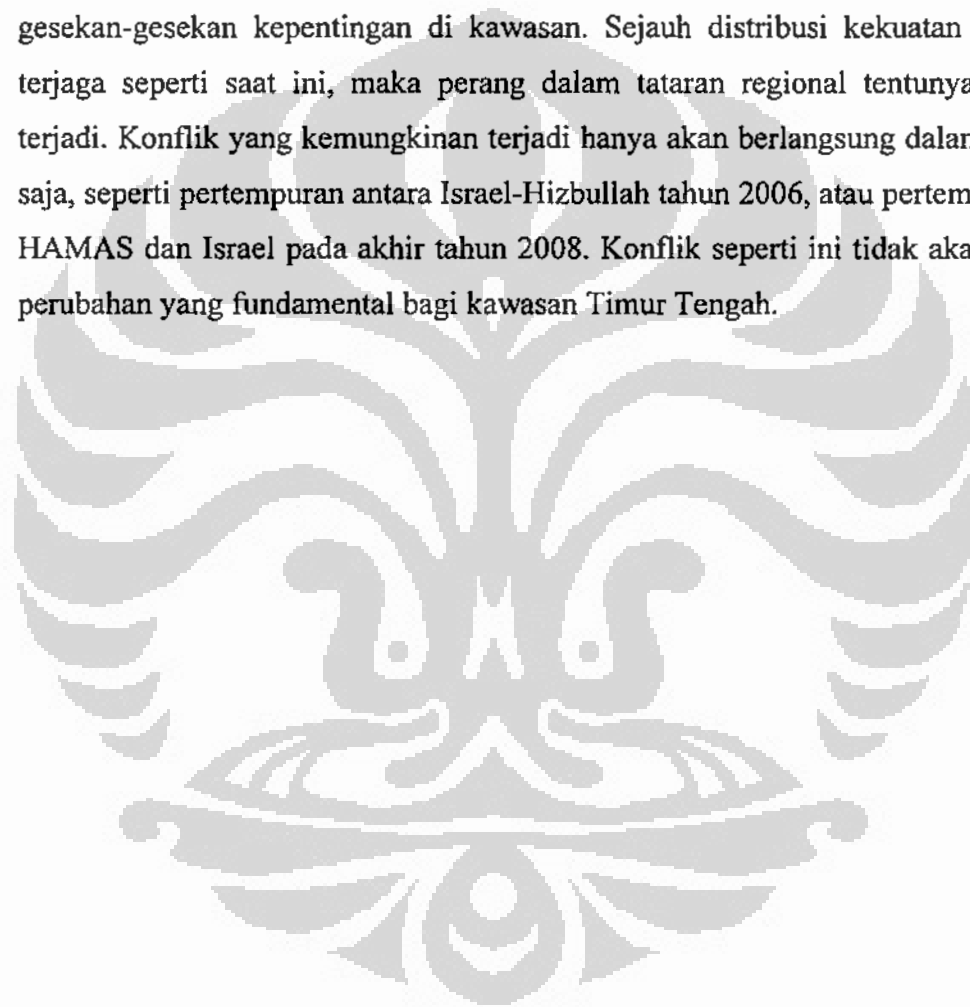
yang anti zionis. Bagaimanapun, masyarakat Iran telah mencapai suatu konsensus untuk tetap menolak rezim zionis Israel. Masalah Israel tentunya masih akan menjadi ganjalan bagi hubungan antara Iran dan Amerika Serikat, karena Iran akan tetap tidak mau mengakui eksistensi dari Israel.

Terpilihnya Barrack Obama pada pemilu Amerika Serikat menggantikan George W. Bush, diharapkan membawa perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pemerintahan Obama menyatakan akan meninggalkan pendekatan "*hard power*" dalam kebijakan luar negerinya, dan akan menggunakan "*smart power*" yang berarti lebih bersifat persuasif. Apabila Obama melakukan hal tersebut maka paling tidak terjadi sedikit peredaan ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya dengan Iran. Pemerintahan Obama diharapkan mampu bersikap lebih persuasif terhadap Iran, mengingat presiden Ahmadinejad memiliki karakter yang keras.

Persaingan antara aliansi Iran dengan aliansi Amerika Serikat di Timur Tengah masih akan terjadi. Sebagai contoh adalah di Lebanon. Negara ini baru saja menggelar pemilihan umum untuk tahun 2009 ini. Pemilu di tahun 2009, secara mengejutkan kelompok koalisi pro-Barat yang dipimpin oleh Saad Hariri meraih 71 kursi dari 128 kursi yang diperebutkan, sementara Hizbullah dan koalisinya meraih 57 kursi. Pemerintahan Obama menyambut baik kemenangan Hariri yang pro-Barat tersebut. Obama juga menilai bahwa hasil pemilu ini sebagai indikasi bahwa rakyat Lebanon menginginkan keamanan dan kesejahteraan. Selain itu, Arab Saudi dan Mesir juga menyambut baik kemenangan sekutunya di parlemen Lebanon. Sementara itu, pihak Hizbullah yang pro-Iran juga mengakui hasil pemilu tahun 2009 ini. Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah mengakui kealahannya dengan mengatakan "suatu latihan kesemangatan", dalam pidatonya. Hizbullah akan melakukan konsultasi-konsultasi dengan pihak oposisi untuk menjalankan fungsinya dengan baik (ANTARA, 9 Juni 2009).

Persaingan antara Iran dan Amerika Serikat membuat kawasan Timur Tengah belum bisa dikatakan stabil, sekalipun memang belum ada indikasi akan terjadinya peperangan dalam tataran regional. Kawasan dikatakan stabil apabila terdapat suatu hierarki kekuatan (*power*) yang jelas dan juga tidak ada penantang bagi kekuatan

hegemon. (Gilpin, hal. 592, 1988). Dengan munculnya Iran sebagai *major power* di kawasan Timur Tengah, yang secara ideologi berseberangan dengan Amerika Serikat, tentunya hal ini menunjukkan sistem yang cenderung tidak stabil. Iran memang belum mampu menandingi kekuatan militer Amerika Serikat, tetapi bukan tidak mungkin bahwa Iran suatu saat nanti dapat melakukan hal tersebut. Konsekuensi dari belum stabilnya suatu kawasan adalah adanya persaingan antara pihak-pihak yang berupaya untuk menciptakan hegemoni. Dampak dari persaingan yang terjadi adalah adanya gesekan-gesekan kepentingan di kawasan. Sejauh distribusi kekuatan masih tetap terjaga seperti saat ini, maka perang dalam tataran regional tentunya tidak akan terjadi. Konflik yang kemungkinan terjadi hanya akan berlangsung dalam skala kecil saja, seperti pertempuran antara Israel-Hizbullah tahun 2006, atau pertempuran antara HAMAS dan Israel pada akhir tahun 2008. Konflik seperti ini tidak akan membawa perubahan yang fundamental bagi kawasan Timur Tengah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul "Iran Versus Amerika Serikat, Perebutan Pengaruh Dan Hegemoni Di Kawasan Timur Tengah (1979-2008)" ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perselisihan antara Iran dan Amerika Serikat dimulai semenjak berdirinya Republik Islam Iran tahun 1979. Politik luar negeri Iran secara yuridis-formal berlandaskan pada 7 prinsip (a) menolak segala bentuk dominasi; (b) mempertahankan dan menjaga keutuhan wilayah; (c) mempertahankan hak-hak umat Islam; (d) berdamai dengan negara-negara yang tidak agresif; (e) menganggap kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan sebagai hak-hak universal; dan (f) menyokong setiap perjuangan kaum *Mustaz'afin* tapi menahan diri dari segala bentuk intervensi. (M.Riza Shihbudi, 1989, h.144). Dari prinsip tersebut, Iran cenderung menggunakan nilai-nilai solidaritas Islam dan anti dominasi asing (Amerika Serikat) dalam upaya menciptakan hegemoni di kawasan Timur Tengah. Hal ini terlihat dari upaya Iran membantu kelompok-kelompok Islam di Timur Tengah seperti Hizbullah di Lebanon, HAMAS di Palestina, juga kelompok Syiah di Iraq. Sementara itu, sikap untuk menolak dominasi dari kekuatan asing dapat dilihat dari aliansi antara Iran dan Syria. Selain itu, nilai-nilai yang diusung Iran ini terbukti cukup efektif bagi Iran untuk menciptakan Blok Historis bersama dengan Syria, Hizbullah, dan HAMAS di kawasan Timur Tengah.
2. Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam hal "*hard power*" di kawasan Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan dari kerjasama militer antara Amerika Serikat dan beberapa negara di Timur Tengah. Amerika Serikat berhasil menempatkan kekuatannya di Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman dan Uni Emirat Arab. Selain itu Amerika Serikat juga menempatkan Armada V di perairan kawasan Timur Tengah. Namun, dari

unsur nilai Amerika Serikat terlihat belum mendapatkan konsensus dari seluruh masyarakat di Timur Tengah. Isu yang kerap diusung oleh Amerika Serikat adalah demokratisasi dan juga eksistensi Israel di Timur Tengah. Demokratisasi tentunya belum dapat diterima oleh aliansi-aliansi Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal ini membuat Blok Historis yang dibangun oleh Amerika Serikat belum kuat. Hegemoni yang dibangun oleh Amerika Serikat lebih bersifat koersif karena masih menggunakan kekuatan dari militer dan ekonomi.

3. Perebutan pengaruh dan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung sejak tahun 1979. Permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat berawal sejak keberhasilan Revolusi Islam Iran dan penyanderaan Keduataan Besar Amerika Serikat di Teheran. Amerika Serikat tampak berupaya untuk mengurangi pengaruh Revolusi Islam Iran yang dikhawatirkan akan menyebar ke kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat banyak membantu Iraq pada saat terjadinya Perang Teluk I antara Iran dan Iraq. Selain itu, Amerika Serikat juga menggiring opini negara-negara lain untuk menekan Iran dengan melakukan embargo dan juga tuduhan-tuduhan negatif terhadap Iran. Disisi lain, Iran juga tampak berupaya untuk keluar dari tekanan. Iran mengambil sikap lebih pragmatis setelah meninggalnya Khomeini tahun 1989. Hal ini berdampak positif pada hubungan Iran dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah seperti Mesir, Qatar, Yaman, dan Arab Saudi. Namun hubungan baik tersebut belum berlanjut ketahap pembentukan aliansi. Hal ini karena masih kuatnya pengaruh Amerika Serikat terhadap negara-negara tersebut. Kelompok aliansi Iran juga tampak semakin bertambah baik. Hizbullah semakin diakui eksistensinya, khususnya setelah mampu untuk menghalau serangan Israel ke wilayah Lebanon tahun 2006. Selain itu, kemenangan HAMAS pada pemilu parlemen Palestina pada tahun 2006 membuktikan popularitas HAMAS. Selanjutnya, runtuhnya Rezim Saddam Hussein di Iraq juga memberikan peluang besar bagi kelompok Syiah untuk mengontrol kekuasaan di Iraq.

4. Perebutan pengaruh dan hegemoni antara Iran dan Amerika Serikat masih akan berlanjut di kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah memang belum dapat dikatakan stabil karena belum ada hirarki kekuatan yang jelas di kawasan ini. Selain itu, kekuatan hegemon Amerika Serikat juga tidak berjalan sendirian, adanya Iran sebagai *rising power* dapat mengganggu hegemoni dari Amerika Serikat. Sejauh ini, belum ada indikasi akan terjadi perang antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah yang akan membawa perubahan secara fundamental. Perang di kawasan Timur Tengah akan terjadi bila ada perubahan yang signifikan dalam konfigurasi kekuatan di kawasan dan perubahan tersebut dapat mengganggu ataupun mengurangi kekuatan negara hegemon atau Amerika Serikat. Sejauh ini, Iran belum mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dengan konfigurasi kekuatan yang seperti ini, maka perang antara Iran dan Amerika Serikat dalam tataran regional tidak akan terjadi. Selama distribusi kekuatan masih berlangsung seperti ini, maka dapat dikatakan tidak akan terjadi perang besar di kawasan Timur Tengah. Kemungkinan konflik bersenjata memang tetap ada, tetapi tidak dalam skala besar. Kemungkinan konflik yang akan terjadi hanya dalam skala kecil seperti pertempuran antara Israel-Hizbullah tahun 2006, atau pertempuran antara HAMAS dan Israel pada akhir tahun 2008. Konflik seperti ini tidak akan membawa perubahan yang fundamental bagi kawasan Timur Tengah. Jadi, selama konfigurasi kekuatan tetap terjaga, maka kawasan Timur Tengah tidak akan mengalami perang yang berakibat pada perubahan tatanan regional secara fundamental.

## V.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian dalam bidang ini pada masa yang akan datang adalah, perlunya dilakukan penelitian secara langsung di lapangan demi terciptanya tingkat akurasi yang lebih valid dan aktual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Yonah, Milton Hoenig, 2008, *The New Iranian Leadership: Ahmadinejad, Terrorism, Nuclear Amition, And The Middle East*, London, Preager Security International.
- Bahgat, Gawdat, 2003, *American Oil Diplomacy in the Persian Gulf and the Caspian Sea*, University Press of Florida
- Basrowi, dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Byman, Daniel, 2001, *Iran's Security Policy in the Post Revolution Era*, Santa Monica, Rand.
- Blaxter, L, Hughes C, and Tight M, 1996, *How To Research*, Buckingham: Open University Press.
- Bogdan, Robert C, and Taylors K.B, 1992, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Ally and Bacon Inc.
- Boothman, Derek, 2008, *Hegemony: Political and Linguistic Sources For Gramsci*, in Richard Howson (ed), *Hegemony: Studies in Consensus and Coercion*, New York: Routledge.
- Cordesman, H Anthony, 1997, *US Forces in Middle East: Resources & Capabilities*, Westview Press.
- Cox, Robert W, 1986, *Social Forces, States, and World Orders: Beyond International Relations Theory*, in Robert O. Keohane (ed), *Neorealism and Its Critics*. Cambridge: Columbia University Press.
- Cox, Robert W, 1992, *Towards a Post-hegemonic Conceptualization of World Order*, in James N Rosenau, and Ernst-Otto Czempiel (ed), *Governance Without Government: Order and Change In World Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cox, Robert W, and Timothy J. Sinclair, 1996, *Approaches to World Order*, Cambridge: Cambridge University Press
- Crane, Keith, Rollie Lal, Jeffrey Martini, 2008, *Iran's political, demographic, economic Vulnerability*, Rand.

- Fayazmanesh, Sasan, 2008, *The United States And Iran: Sanction And The Policy of Dual Containment*, New York: Routledge
- Fielding, N, And Gilbert N, 2000, *Understanding Social Statistic*, London:Sage
- Fontana, Bennedetto, 2008, *Hegemony and Power In Gramsci*, in Richard Howson (ed), *Hegemony: Studies in Consensus and Coercion*, New York: Routledge
- Fouskas, Vassilis K, 2003, *Zones Of Conflict: US Policy In The Balkans And The Greater Middle East*, London: Pluto Press.
- Furchan, Arief, 2004, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gilpin, Robert, 1981, *War and Change In World Politics*, Cambridge: Cambridge University Press
- Habib, A. Hasnan, 1991, *Dimensi Eksternal Timur Tengah Pasca Perang Teluk: Peranan Negara-negara Besar*, Jakarta:CSIS.
- Hamidi, Luthfi, 2007, *Taktik Pukul Balik Iran*, dalam *Kesederhanaan & Keberanian Ahmadinejad*, PT. Visi Gagas Komunika.
- Hawali, Safar al-, 2005, *Belitan Amerika di Tanah Suci: Membongkar Strategi AS Menguasai Timur Tengah*, Penerbit Jazera.
- Harrison, Lisa, 2007, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.
- Harsawaskita, Adrianus, 2007, *Great Power Politics di Asia Tengah: Sudut Pandang Geopolitik*, in Yulius P. Hermawan, *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Huntington, Samuel P, 2004, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam.
- Jafarzadeh, Alireza, 2007, *The Iran Threat: President Ahmadinejad And The Coming Nuclear Crisis*, new York: Pelgrave Macmillan
- Junaedi, Irfan, 2007, *Nyali Besar Membongkar Mitos Holocaust*, dalam *Kesederhanaan & Keberanian Ahmadinejad*, PT. Visi Gagas Komunika.
- Khallaj, Morteza, *Sikap Iran Dalam Masalah Palestina*, 1992, dalam M Riza Sihbudi, Ahmad Yani (ed), 1992, *Palestina: Solidaritas Islam Dan Tata Politik Dunia Baru*, Jakarta: Pustaka Hidayah.



Keohane, Robert, 1984, *After Hegemony: Cooperation and Discord In The World Political Economy*, Princeton: Princeton University

Kirdi Dipoyudo, 1982 *Timur Tengah Dalam Pergolakan*, Jakarta: Yayasan Proklamasi.

Labib, Muhsin, Ibrahim Muharam, Musa Kazhim, Alfian Hamzah, 2006, *Ahmadinejad: David di Tengah Angkara Goliath Dunia*, Jakarta: Penerbit Hikmah

Suseno, Franz Magnis, 2003, *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Miles, Matthew B, & Michael Huberman., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexi J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Parsi, Trita, 2007, *Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, And The United States*, New Haven And London: Yale University.

Quandt, William B, 2005, *Peace Process: American Diplomacy And The Arab-Israeli Conflict Since 1967 (Third Edition)*, Washington D.C: Brookings Institution Press

Rafsanjani, Hashemi, 1992, *Sikap Teheran Dalam Perdamaian Timur Tengah*, dalam M. Riza Sihbudi, Ahmad Yani (ed), 1992, *Palestina: Solidaritas Islam Dan Tata Politik Dunia Baru*, Jakarta, Pustaka Hidayah.

Rahman, Mustafa Abdul, 2003, *Iran Pasca Revolusi: Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Rais, M. Amien, 1990, *Timur Tengah & Krisis Teluk Sebuah Analisa Kritis*, Surabaya: CV Amarpress

Sihbudi, Riza, M Hamdan Basyar, Happy Bone Zulkarnain, 1993, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: PT Eresco

Sihbudi, Riza, 1991, *Bara Timur Tengah*, Bandung, Penerbit Mizan.

Sihbudi, Riza, 2007, *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta, Penerbit Mizan.

Tamara, Nasir, 1980, *Revolusi Iran*, Jakarta: Sinar Harapan

Viotti, Paul R dan Mark V. Kauppi, 1993, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, Second Edition, New York, Macmillan Publishing.

Yaloon, Moshe, Dore Gold, Shimon Shapira, Daniel Diker, Uzi Rubin, Martin Kramer, Jonathan D Halevi, 2007, *Iran, Hizbullah, Hamas, And The Global Jihad: A New Conflict Paradigm For The West*, Jerusalem, Jerusalem Center For Public Affairs.

Yin, Robert K, 2004, *Studi Kasus & Desain Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Jurnal Ilmiah**

Bowen, Wyn Q, and Joanna Kidd, *The Iranian Nuclear Challenge*, International Affairs 80, 2004.

Gilpin, Robert, 1988, *The Theory Of Hegemonic War*, in Journal of Interdisciplinary History, Vol.18, No.4, *The Origin of Prevention of Major War*. (Spring), pp. 591-613

Ozcelic, Sezai, 2005, *Neo-Realist and Neo-Gramscian Hegemony In International Relations and Conflict Resolution During The 1990's*, Washington: George Mason University.

Visser, Reidar, 2009, *Towards a "Shiite Crescent" Incorporating Iraq? A Re-Examination of The Historical Evidence*, Norwegian Institute of International Affairs.

#### **Artikel, Diktat, Majalah, dan Surat kabar**

Tanthowi, Pramono U, Kompas, 23 April 2003

Diktat Mata Kuliah HIK Afrika & Timur Tengah, dosen: Mohammad Noor, 2006.

Sumber: *The Military Balance 1989-1990*, Oxford University Press, 1990

Sumber: *The Military Balance 1998-1999*, Oxford University Press, 1999

Sumber: *The Military Balance 2002-2003*, Oxford University Press, 2003.

Sumber: *The Military Balance 2003-2004*, Oxford University Press, 2004

Sumber: *The Military Balance 2004-2005*, Oxford University Press, 2005

Kompas, 22 September 2004

Kompas, 26 Oktober 2004

Kompas, 18 April 2009

Media Indonesia, 24 Maret 2005

LAMPIRAN 1  
PETA TIMUR TENGAH



<http://www.queenps.com/images/Middle-East-map.gif>

## LAMPIRAN 2

### Konstitusi Iran

## General Principles

### Article 1

The form of government of Iran is that of an Islamic Republic, endorsed by the people of Iran on the basis of their longstanding belief in the sovereignty of truth and Qur'anic justice, in the referendum of Farwardin 9 and 10 in the year 1358 of the solar Islamic calendar, corresponding to Jamadi al-'Awwal 1 and 2 in the year 1399 of the lunar Islamic calendar (March 29 and 30, 1979), through the affirmative vote of a majority of 98.2% of eligible voters, held after the victorious Islamic Revolution led by the eminent marji' al-taqlid, Ayatullah al-Uzma Imam Khomeini.

### Article 2

The Islamic Republic is a system based on belief in:

1. the One God (as stated in the phrase "There is no god except Allah"), His exclusive sovereignty and the right to legislate, and the necessity of submission to His commands;
2. Divine revelation and its fundamental role in setting forth the laws;
3. the return to God in the Hereafter, and the constructive role of this belief in the course of man's ascent towards God;
4. the justice of God in creation and legislation;
5. continuous leadership (imamah) and perpetual guidance, and its fundamental rôle in ensuring the uninterrupted process of the revolution of Islam;
6. the exalted dignity and value of man, and his freedom coupled with responsibility before God; in which equity, justice, political, economic, social, and cultural independence, and national solidarity are secured by recourse to:
  1. continuous ijtihad of the fuqaha' possessing necessary qualifications, exercised on the basis of the Qur'an and the Sunnah of the Ma'sumun, upon all of whom be peace;
  2. sciences and arts and the most advanced results of human experience, together with the effort to advance them further;
  3. negation of all forms of oppression, both the infliction of and the submission to it, and of dominance, both its imposition and its acceptance.

### Article 3

In order to attain the objectives specified in Article 2, the government of the Islamic Republic of Iran has the duty of directing all its resources to the following goals:

1. the creation of a favorable environment for the growth of moral virtues based on

- faith and piety and the struggle against all forms of vice and corruption;
- 2.raising the level of public awareness in all areas, through the proper use of the press, mass media, and other means;
- 3.free education and physical training for everyone at all levels, and the facilitation and expansion of higher education;
- 4.strengthening the spirit of inquiry, investigation, and innovation in all areas of science, technology, and culture, as well as Islamic studies, by establishing research centers and encouraging researchers;
- 5.the complete elimination of imperialism and the prevention of foreign influence;
- 6.the elimination of all forms of despotism and autocracy and all attempts to monopolize power;
- 7.ensuring political and social freedoms within the framework of the law;
- 8.the participation of the entire people in determining their political, economic, social, and cultural destiny;
- 9.the abolition of all forms of undesirable discrimination and the provision of equitable opportunities for all, in both the material and intellectual spheres;
- 10.the creation of a correct administrative system and elimination of superfluous government organizations;
- 11.all round strengthening of the foundations of national defence to the utmost degree by means of universal military training for the sake of safeguarding the independence, territorial integrity, and the Islamic order of the country;
- 12.the planning of a correct and just economic system, in accordance with Islamic criteria in order to create welfare, eliminate poverty, and abolish all forms of deprivation with respect to food, housing, work, health care, and the provision of social insurance for all;
- 13.the attainment of self-sufficiency in scientific, technological, industrial, agricultural, and military domains, and other similar spheres;
- 14.securing the multifarious rights of all citizens, both women and men, and providing legal protection for all, as well as the equality of-all before the law;
- 15.the expansion and strengthening of Islamic brotherhood and public cooperation among all the people;
- 16.framing the foreign policy of the country on the basis of Islamic criteria, fraternal commitment to all Muslims, and unsparing support to the mustad'afin of the world.

#### **Article 4**

All civil, penal financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on Islamic criteria. This principle applies absolutely and generally to all articles of the Constitution as well as to all other laws and regulations, and the fuqaha' of the Guardian Council are judges in this matter.

#### **Article 5**

During the Occultation of the Wali al-Asr (may God hasten his reappearance), the wilayah and leadership of the Ummah devolve upon the just ('adil] and pious [muttaqi] faqih, who is fully aware of the circumstances of his age; courageous, resourceful, and

possessed of administrative ability, will assume the responsibilities of this office in accordance with Article 107.

### **Article 6**

In the Islamic Republic of Iran, the affairs of the country must be administered on the basis of public opinion expressed by the means of elections, including the election of the President, the representatives of the Islamic Consultative Assembly, and the members of councils, or by means of referenda in matters specified in other articles of this Constitution.

### **Article 7**

In accordance with the command of the Qur'an contained in the verse ("Their affairs are by consultations among them" [42:38]) and ("Consult them in affairs" [3:159]), consultative bodies - such as the Islamic Consultative Assembly, the Provincial Councils, and the City, Region, District, and Village Councils and the likes of them - are the decision-making and administrative organs of the country. The nature of each of these councils, together with the manner of their formation, their jurisdiction, and scope of their duties and functions, is determined by the Constitution and laws derived from it.

### **Article 8**

In the Islamic Republic of Iran, al-'amr bilma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar is a universal and reciprocal duty that must be fulfilled by the people with respect to one another, by the government with respect to the people, and by the people with respect to the government. The conditions, limits, and nature of this duty will be specified by law. (This is in accordance with the Qur'anic verse; "The believers, men and women, are guardians of one another; they enjoin the good and forbid the evil" [9:71]).

### **Article 9**

In the Islamic Republic of Iran, the freedom, independence, unity, and territorial integrity of the country are inseparable from one another, and their preservation is the duty of the government and all individual citizens. No individual, group, or authority, has the right to infringe in the slightest way upon the political, cultural, economic, and military independence or the territorial integrity of Iran under the pretext of exercising freedom. Similarly, no authority has the right to abrogate legitimate freedoms, not even by enacting laws and regulations for that purpose, under the pretext of preserving the independence and territorial integrity of the country.

### **Article 10**

Since the family is the fundamental unit of Islamic society, all laws, regulations, and pertinent programmes must tend to facilitate the formation of a family, and to safeguard its sanctity and the stability of family relations on the basis of the law and the ethics of Islam.

## **Article 11**

In accordance with the sacred verse of the Qur'an ("This your community is a single community, and I am your Lord, so worship Me" [21:92]), all Muslims form a single nation, and the government of the Islamic Republic of Iran has the duty of formulating its general policies with a view to cultivating the friendship and unity of all Muslim peoples, and it must constantly strive to bring about the political, economic, and cultural unity of the Islamic world.

## **Article 12**

The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari school [in usual al-Din and fiqh], and this principle will remain eternally immutable. Other Islamic schools, including the Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, and Zaydi, are to be accorded full respect, and their followers are free to act in accordance with their own jurisprudence in performing their religious rites. These schools enjoy official status in matters pertaining to religious education, affairs of personal status (marriage, divorce, inheritance, and wills) and related litigation in courts of law. In regions of the country where Muslims following any one of these schools of fiqh constitute the majority, local regulations, within the bounds of the jurisdiction of local councils, are to be in accordance with the respective school of fiqh, without infringing upon the rights of the followers of other schools.

## **Article 13**

Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are the only recognized religious minorities, who, within the limits of the law, are free to perform their religious rites and ceremonies, and to act according to their own canon in matters of personal affairs and religious education.

## **Article 14**

In accordance with the sacred verse; ("God does not forbid you to deal kindly and justly with those who have not fought against you because of your religion and who have not expelled you from your homes" [60:8]), the government of the Islamic Republic of Iran and all Muslims are duty-bound to treat non-Muslims in conformity with ethical norms and the principles of Islamic justice and equity, and to respect their human rights. This principle applies to all who refrain from engaging in conspiracy or activity against Islam and the Islamic Republic of Iran.

# Foreign Policy

## Article 152

The foreign policy of the Islamic Republic of Iran is based upon the rejection of all forms of domination, both the exertion of it and submission to it, the preservation of the independence of the country in all respects and its territorial integrity, the defence of the rights of all Muslims, non-alignment with respect to the hegemonist superpowers, and the maintenance of mutually peaceful relations with all non-belligerent States.

## Article 153

Any form of agreement resulting in foreign control over the natural resources, economy, army, or culture of the country, as well as other aspects of the national life, is forbidden.

## Article 154

The Islamic Republic of Iran has as its ideal human felicity throughout human society, and considers the attainment of independence, freedom, and rule of justice and truth to be the right of all people of the world. Accordingly, while scrupulously refraining from all forms of interference in the internal affairs of other nations, it supports the just struggles of the mustad'afun against the mustakbirun in every corner of the globe.

## Article 155

The government of the Islamic Republic of Iran may grant political asylum to those who seek it unless they are regarded as traitors and saboteurs according to the laws of Iran.

<http://www.iranonline.com/iran/iran-info/Government/constitution-1.html>